

JUAN FARITS ALHAMID, WIRDHATULL MUTHMAINNAH ALKAMIL,
MUHAMMAD RAIHAN TARUNAJAYA, RADHWA ANANDA, NUR YAQIN ZAHEEN BINTI MOHD RAZALI,
IGNATIUS HENDRA SUTIKNO, MUHAMMAD IQBAL DEVANTO, EKA MILASARI,
ASSYFA BESTARI, SEKAR PUTRI MAHARANI, ALYAA SHAAFIVAH ARRASYID



RIVALITAS AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK

DALAM PEMBANGUNAN GLOBAL

EDITOR
MOHAMMAD AYUB MIRDAD
SITI ROKHMAWATI SUSANTO

Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok dalam Pembangunan Global

Juan Farits Alhamid
Wirdhatull Muthmainnah Alkamil
Muhammad Raihan Tarunajaya
Radhwa Ananda
Nur Yaqin Zaheen Binti Mohd Razali
Ignatius Hendra Sutikno
Muhammad Iqbal Devanto
Eka Milasari
Assyfa Bestari
Sekar Putri Maharani
Alyaa Shaafiyah Arrasyid

**Rivalitas Amerika Serikat
dan Tiongkok dalam Pembangunan Global**

Penulis

Juan Farits Alhamid, Wirdhatull Muthmainnah Alkamil,
Muhammad Raihan Tarunajaya, Radhwa Ananda,
Nur Yaqin Zaheen Binti Mohd Razali,
Ignatius Hendra Sutikno, Muhammad Iqbal Devanto,
Eka Milasari, Assyfa Bestari, Sekar Putri Maharani,
Alyaa Shaafiyah Arrasyid

Copyright ©Agustus 2026
All rights reserved

ISBN:

978-634-274-265-5

Editor

Mohammad Ayub Mirdad
Siti Rokhmawati Susanto

Layouter:

Ayasofya M. Candrakirana

Penerbit:

PT. Pustaka Saga Jawadwipa

Jl. Kedinding lor Gang Delima No.4A Surabaya
Nomor Kontak: 085655396657

Anggota IKAPI:

No. 367/JTI/2023

Buku ini dilindungi oleh Pasal 113 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang
Hak Cipta. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
tanpa izin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku **Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok dalam Pembangunan Global**. Buku ini hadir sebagai upaya akademik untuk memahami dinamika persaingan dua kekuatan besar dunia yang semakin membentuk arah pembangunan global pada abad ke-21. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok tidak lagi terbatas pada aspek politik dan keamanan, tetapi telah meluas ke bidang ekonomi, perdagangan, teknologi, infrastruktur, energi, hingga bantuan pembangunan. Perubahan lanskap geopolitik tersebut membawa konsekuensi yang signifikan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang dihadapkan pada berbagai peluang sekaligus tantangan dalam menentukan strategi pembangunan nasional di tengah kompetisi global.

Melalui berbagai tulisan yang disusun oleh para penulis dari beragam latar belakang keilmuan, buku ini mengulas secara komprehensif berbagai dimensi rivalitas pembangunan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pembahasan dimulai dari perbandingan paradigma pembangunan melalui Konsensus Washington dan Konsensus Beijing, model kerja sama pembangunan, persaingan infrastruktur dan konektivitas digital, hingga kontestasi pembiayaan pembangunan di Indonesia. Selain itu, buku ini juga mengangkat isu-isu strategis seperti perdagangan dan investasi, digitalisasi teknologi, kerja sama energi terbarukan, bantuan pembangunan kemanusiaan di Afrika, keamanan kawasan, serta prospek masa depan kepemimpinan global kedua negara. Dengan pendekatan

multidisipliner dan studi kasus yang beragam, setiap bab diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih utuh mengenai bagaimana rivalitas kedua negara memengaruhi tata kelola pembangunan internasional dan ruang kebijakan negara-negara berkembang.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, peneliti, pembuat kebijakan, maupun masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap studi hubungan internasional, ekonomi politik global, dan pembangunan. Kritik serta saran yang membangun senantiasa kami harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh penulis yang telah berkontribusi dengan pemikiran dan analisis terbaiknya sehingga buku ini dapat diterbitkan. Semoga buku ini memberikan manfaat, memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan refleksi dalam memahami dinamika rivalitas global yang terus berkembang.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Pengantar tentang Persaingan AS-Tiongkok dalam Pembangunan Global	1
<i>Mohammad Ayub Mirdad</i>	
<i>Siti Rokhmawati Susanto</i>	
Konsensus Washington, Konsensus Beijing, dan Ruang Kebijakan Indonesia	15
<i>Juan Farits Alhamid</i>	
Model Kerja Sama Pembangunan Amerika Serikat dan Tiongkok dalam Pengembangan Infrastruktur di Negara-negara Berkembang	33
<i>Wirdhatull Muthmainnah Alkamil</i>	
Institutional Balancing dalam Persaingan Digital Silk Road versus Digital Connectivity and Cybersecurity Partnership di Asia Tenggara	46
<i>Muhammad Raihan Tarunajaya</i>	
Kontestasi Pembiayaan Pembangunan Amerika Serikat dan Tiongkok di Indonesia: Analisis Economic Statecraft pada Proyek Kereta Cepat Whoosh dan MCC Compact	58
<i>Radhwa Ananda</i>	
Infrastruktur dan Konektivitas sebagai Strategi Pembangunan: Bagaimana Negara-Negara Asia Tenggara Melakukan Mitigasi Risiko dalam Persaingan Kabel Bawah Laut AS-Tiongkok	73
<i>Nur Yaqin Zaheen Binti Mohd Razali</i>	

Perdagangan, Investasi Dan Pembangunan Ekonomi Di Tengah Perang Tarif As-Tiongkok: Analisis Hilirisasi Nikel Indonesia	89
<i>Ignatius Hendra Sutikno</i>	
Dampak Kompetisi Teknologi Amerika Serikat Dan Tiongkok Terhadap Digitalisasi Teknologi Di Asia Tenggara	103
<i>Muhammad Iqbal Devanto</i>	
Analisis Komparatif Green Development Cooperation Amerika Serikat dan Tiongkok dengan Brasil dalam Pengembangan Energi Terbarukan	116
<i>Eka Milasari</i>	
Lambung Pangan dan Rumah Sakit di Afrika: Rivalitas Bantuan Pembangunan Kemanusiaan AS vs Tiongkok di Ethiopia	131
<i>Assyfa Bestari</i>	
Keamanan dan Pembangunan dalam Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok: Studi Kasus Djibouti	144
<i>Sekar Putri Maharani</i>	
Kekuatan, Kelemahan, dan Masa Depan Kompetisi Pembangunan Amerika Serikat dan Tiongkok: Kontestasi Model Pembangunan dan Kepemimpinan Global	157
<i>Alyaa Shaafiyah Arrasyid</i>	
KATA PENUTUP	173

Pengantar tentang Persaingan AS-Tiongkok dalam Pembangunan Global

Mohammad Ayub Mirdad

Siti Rokhmawati Susanto

Pendahuluan

Selama kurang lebih dua dekade setelah berakhirnya Perang Dingin, sistem internasional secara konvensional digambarkan sebagai unipolar: satu negara adidaya, Amerika Serikat, memimpin tatanan internasional liberal yang dibangun di sekitar pasar terbuka, lembaga multilateral, dan komitmen yang secara luas dianut, meskipun diterapkan secara tidak merata, terhadap pemerintahan demokratis (Ikenberry 2008). Bantuan pembangunan pada periode ini sebagian besar diorganisir di sekitar hierarki donor-penerima yang dikelola melalui lembaga Bretton Woods, Komite Bantuan Pembangunan OECD, dan kerangka kerja normatif di mana "tata kelola yang baik", liberalisasi pasar, dan, kemudian, Tujuan Pembangunan Milenium mendefinisikan apa yang dianggap sebagai praktik pembangunan yang sah. Tiongkok, selama sebagian besar periode ini, diperlakukan sebagai penerima tatanan ini daripada sebagai arsitek saingannya.

Deskripsi tersebut tidak lagi berlaku. Kebangkitan kemampuan material Tiongkok sejak awal tahun 2000-an, yang dikonsolidasikan secara politik melalui Belt and Road Initiative (BRI) setelah tahun 2013, telah menghasilkan apa yang oleh semakin banyak kajian ilmiah digambarkan sebagai tatanan kompetitif bipolar atau, lebih tepatnya, bi-multipolar, di mana

dua kekuatan besar menetapkan persyaratan yang bersaing untuk partisipasi dalam kehidupan ekonomi global sementara sejumlah besar kekuatan sekunder dan regional mempertahankan ruang gerak yang nyata di antara mereka (He dan Feng 2025).

Penjelasan realis tentang transisi ini, mengikuti tradisi "transisi kekuasaan", memperlakukan pergeseran tersebut sebagai sesuatu yang hampir tak terhindarkan secara struktural: kemampuan yang meningkat dari kekuatan yang sedang naik daun menghasilkan gesekan dengan hegemon yang berkuasa terlepas dari niat yang dinyatakan oleh kedua belah pihak, sebuah dinamika yang dipopulerkan oleh Allison (2017) sebagai "Thucydides's Trap," dan yang menurut Mearsheimer (2021) menjadikan persaingan yang berkelanjutan, dan mungkin semakin intensif, sebagai lintasan default dari hubungan tersebut, bukan penyimpangan darinya. Pandangan institusionalis liberal menolak anggapan bahwa kerangka berpikir ini kekal. Ikenberry (2008), yang menulis ketika kebangkitan Tiongkok sedang meningkat pesat tetapi sebelum BRI ada, berpendapat bahwa pertumbuhan Tiongkok sejauh ini terjadi di dalam tatanan yang dipimpin AS, bukan melawannya, dan bahwa kepentingan Beijing yang paling jelas terletak pada akomodasi yang dinegosiasikan dalam aturan yang ada daripada upaya menyeluruh untuk revisi sistemik, sebuah interpretasi yang diperluas oleh Starrs (2015) dengan menunjukkan betapa dalam produksi dan keuangan Tiongkok tetap tertanam secara struktural dalam, dan bergantung pada, kapitalisme global yang berpusat pada AS.

Lantas, mengapa pembangunan, yang secara historis merupakan salah satu aspek hubungan internasional yang lebih teknokratis dan terdepolitisasi, menjadi arena utama di mana kontes ini sekarang berlangsung? Tiga pergeseran struktural menjelaskan pergeseran ini. Pertama, transformasi Tiongkok dari penerima bantuan menjadi kreditor bilateral terbesar di dunia memberi Beijing, untuk pertama kalinya, kapasitas material untuk menawarkan sumber alternatif pembiayaan infrastruktur dan proyek kepada negara-negara yang sebelumnya tidak memiliki alternatif realistis selain modal yang dimediasi oleh Barat dan Bretton Woods (Chin dan Gallagher 2019). Kedua, habisnya selera fiskal Barat pasca-2008 untuk komitmen pembangunan multilateral yang besar menciptakan kesenjangan pembiayaan di wilayah miskin infrastruktur yang secara institusional dan secara politis bersedia diisi dengan cepat oleh bank-bank negara Tiongkok. Ketiga, dan yang terpenting untuk argumen buku ini, baik Washington maupun Beijing mulai mengakui pembiayaan pembangunan sebagai bentuk dari apa yang disebut Blackwill dan Harris (2016) sebagai *geo-economics*, penggunaan instrumen ekonomi, bukan instrumen militer, untuk menghasilkan hasil geopolitik.

Dalam konteks ini, pembiayaan pembangunan hanyalah instrumen yang paling mudah diekspor dan paling fleksibel secara reputasi dalam seperangkat alat *geo-economy* yang lebih luas yang juga mencakup kebijakan perdagangan, kontrol teknologi, dan pengaturan mata uang. Kajian terbaru tentang dimensi "struktural" dari persaingan tersebut menunjukkan bahwa, alih-alih kontes tunggal yang dimenangkan oleh satu pihak, persaingan tersebut lebih tepat dipahami sebagai

perebutan sentralitas di beberapa jaringan global yang saling tumpang tindih dalam, infrastruktur, sistem digital, produksi, dan keuangan, di mana sebagian besar negara ketiga tetap terlibat secara bersamaan, meskipun tidak merata, dengan kedua kekuatan tersebut daripada dipaksa untuk keluar dari satu jaringan sepenuhnya demi jaringan lainnya. Bab ini, dan buku yang mengikutinya, mengambil pembacaan persaingan yang berbasis jaringan dan hanya sebagian bersifat zero-sum sebagai titik awal analisisnya, sambil tetap waspada terhadap biaya yang sangat nyata, fragmentasi, persyaratan yang dipolitisasi, dan berkurangnya daya tawar bagi negara-negara yang paling bergantung pada bantuan, yang ditimbulkan oleh arsitektur kompetitif ini pada negara-negara Selatan.

Amerika Serikat sebagai Kekuatan Global

Amerika Serikat memasuki persaingan ini dengan portofolio keunggulan struktural yang masih tangguh, meskipun semakin diperebutkan, yang didistribusikan secara tidak merata di lima dimensi: bobot ekonomi, kepemimpinan teknologi, jangkauan militer, kekuatan lunak, dan kepemimpinan kelembagaan.

Kekuatan ekonomi. AS tetap menjadi ekonomi terbesar di dunia dalam nominal dan jangkar sistem keuangan internasional melalui dominasi dolar yang berkelanjutan sebagai cadangan global utama dan mata uang penagihan perdagangan. Sentralitas moneter ini memberi Washington bentuk kekuatan struktural yang tidak memiliki padanan langsung di Tiongkok: kemampuan untuk memproyeksikan sanksi keuangan, mengendalikan akses perbankan korespondensi, dan menetapkan ketentuan efektif di mana sebagian besar perdagangan dunia didenominasikan dan diselesaikan. Kajian

yang muncul tentang "*financial lawfare*" mendokumentasikan bagaimana posisi struktural ini semakin dipersenjantai sebagai instrumen yang disengaja dari persaingan, dengan alat hukum dan peraturan yang digunakan untuk mengalihkan atau membatasi aliran modal dalam mengejar tujuan geopolitik, suatu bentuk tata kelola negara yang tersedia bagi Amerika Serikat dalam skala yang belum dapat ditiru oleh Tiongkok.

Teknologi. Kepemimpinan AS dalam komputasi mutakhir, desain semikonduktor, dan ekonomi platform tetap substansial, didukung oleh perusahaan-perusahaan seperti Nvidia, Microsoft, dan Google serta ekosistem penelitian yang masih terkonsentrasi di universitas-universitas Amerika. Sejak 2022, keunggulan ini telah dipertahankan secara aktif melalui kontrol ekspor semikonduktor canggih dan perangkat keras AI, yang diperkuat di dalam negeri oleh CHIPS dan Undang-Undang Sains, yang secara eksplisit dirancang untuk memperlambat kemajuan Tiongkok dalam manufaktur chip mutakhir sambil membangun kembali kapasitas produksi dalam negeri.

Militer. Kekuatan militer AS tetap tak tertandingi secara global dalam proyeksi kekuatan, arsitektur aliansi, dan akses pangkalan, yang menjamin keamanan yang terus menjadi landasan sebagian besar tatanan Indo-Pasifik dan Eropa. Meskipun fokus buku ini adalah pembangunan daripada pertahanan, supremasi militer penting untuk kisah pembangunan karena tetap menjadi penopang implisit yang memberikan kredibilitas pada tawaran pembangunan AS dan sekutu di wilayah yang sensitif terhadap keamanan, negara-negara yang mempertimbangkan pembiayaan BRI di pesisir Laut Cina

Selatan, misalnya, juga mempertimbangkan ketergantungan keamanan mereka pada Washington.

Kekuatan lunak/*soft power*. Konsep *soft power* Joseph Nye, kemampuan untuk membentuk preferensi orang lain melalui daya tarik daripada paksaan, telah lama diperlakukan sebagai aset khas Amerika, yang berakar pada universitas, ekspor budaya, dan legitimasi norma-norma liberal yang dirasakan (Nye 1990). Namun, aset tersebut tidak tetap. Nye dan Keohane, yang menulis tak lama sebelum kematian Nye pada tahun 2025, mencatat erosi substansial *soft power* AS di bawah pemerintahan Trump kedua: penarikan diri dari lembaga-lembaga internasional yang memberikan legitimasi, ketergantungan yang berlebihan pada instrumen yang bersifat memaksa daripada instrumen yang menarik, dan pembingkaihan saling ketergantungan itu sendiri sebagai beban daripada sumber pengaruh, perkembangan yang secara eksplisit mereka perdebatkan menciptakan peluang diplomatik bagi Beijing. Penurunan ini secara langsung relevan dengan kisah pembangunan: kekuatan lunak secara historis adalah apa yang membuat bantuan pembangunan Barat lebih dari sekadar transaksional, dan erosinya mempersempit kesenjangan normatif yang dapat diklaim Amerika Serikat secara kredibel atas tawaran Tiongkok yang murni berbasis kepentingan.

Kepemimpinan lembaga-lembaga internasional. Amerika Serikat tetap menjadi pemegang saham terbesar dan penentu agenda de facto di IMF dan Bank Dunia, sehingga memiliki pengaruh yang tidak proporsional terhadap persyaratan, pengawasan, dan tolok ukur tata kelola, yang melekat pada pembiayaan pembangunan multilateral. Nye (2005) berpendapat

bahwa kepemimpinan institusional ini sendiri merupakan pengganda *soft power*, karena membentuk aturan lembaga multilateral memungkinkan preferensi AS untuk tampak sebagai hasil yang netral dan berbasis aturan, bukan sebagai pemaksaan sepihak. Inilah tepatnya keuntungan yang ingin diredam oleh pembangunan lembaga paralel Tiongkok, terutama *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB), bukan dengan merebut lembaga Bretton Woods, melainkan dengan membangun alternatif yang kredibel di sampingnya.

Tiongkok sebagai Kekuatan yang Sedang Bangkit

Kembalinya Tiongkok sebagai aktor pembangunan utama bertumpu pada fondasi yang multidimensional namun berbeda secara struktural.

Kebangkitan ekonomi. Empat dekade pertumbuhan berkelanjutan telah mengubah Tiongkok dari ekonomi berpendapatan rendah menjadi ekonomi terbesar di dunia berdasarkan paritas daya beli dan kekuatan manufaktur terbesar berdasarkan nilai tambah, menghasilkan surplus fiskal dan lembaga keuangan yang dikelola negara; Tiongkok Development Bank dan Export-Import Bank of Tiongkok adalah yang utama di antaranya, yang kini mendukung perannya sebagai kreditor bilateral tunggal terbesar di dunia bagi negara-negara berkembang (Chin dan Gallagher 2019). Kapasitas pinjaman ini tidak muncul hanya dari strategi besar yang koheren; Jones dan Hameiri (2020) menunjukkan bahwa hal itu dikelola melalui serangkaian bank dan perusahaan milik negara yang terfragmentasi dan terorganisir secara kompetitif, yang mempersulit narasi sederhana tentang pinjaman strategis yang

terkoordinasi secara terpusat meskipun hal itu menjelaskan skala besar dari apa yang telah dicairkan.

Belt and Road Initiative (BRI). Diluncurkan pada tahun 2013, BRI tetap menjadi kendaraan utama diplomasi pembangunan Tiongkok, menggabungkan pinjaman infrastruktur dengan ambisi konektivitas di seluruh Eurasia, Afrika, dan Amerika Latin. Yang penting, dan bertentangan dengan narasi "debt-trap diplomacy" yang dipopulerkan oleh Chellaney (2017), penelitian institusional yang paling sistematis tentang inisiatif ini menemukan bahwa proyek-proyek BRI sering kali diinisiasi oleh pemerintah penerima yang mengejar agenda domestik mereka sendiri daripada dipaksakan sebagai bagian dari rencana induk yang disusun oleh Beijing, dan bahwa kesulitan utang dalam kasus "korban" yang paling sering dikutip, Sri Lanka dan Pakistan di antaranya, sebagian besar disebabkan oleh kegagalan tata kelola lokal dan paparan terhadap pasar modal yang didominasi Barat daripada karena tindakan predator Tiongkok yang disengaja (Jones dan Hameiri 2020; Brautigam 2020). Temuan ini tidak membebaskan pinjaman Tiongkok dari kritik yang sah seputar ketidaktransparanan kontrak dan lemahnya perlindungan lingkungan, tetapi mengharuskan BRI diperlakukan sebagai objek empiris yang benar-benar diperdebatkan daripada sebagai kisah moral yang sudah mapan.

Industri. Basis industri Tiongkok telah bergerak maju secara signifikan dalam rantai nilai selama dekade terakhir, dengan perusahaan-perusahaan unggulan domestik seperti Huawei di bidang peralatan telekomunikasi dan BYD di bidang kendaraan listrik kini bersaing langsung di beberapa pasar, bahkan menggantikan perusahaan-perusahaan mapan dari Barat dan

Jepang. Penilaian independen tahun 2025 yang ditugaskan oleh Kamar Dagang AS menemukan bahwa kebijakan industri unggulan Tiongkok telah mencapai sebagian besar ambisi awalnya, secara substansial mengurangi ketergantungan impor dan membangun posisi yang kompetitif secara global di bidang kendaraan energi baru dan peralatan telekomunikasi, meskipun kesenjangan yang signifikan masih ada di segmen yang paling menuntut secara teknologi seperti semikonduktor kelas atas dan kedirgantaraan canggih.

Teknologi. Seiring dengan peningkatan industrinya, Tiongkok telah mengejar swasembada teknologi melalui "Made in Tiongkok 2025" dan, khususnya di ranah digital, Jalur Sutra Digital, perluasan dari BRI yang diluncurkan pada tahun 2015 yang menggabungkan infrastruktur serat optik, peralatan 5G, platform e-commerce, dan semakin banyak kecerdasan buatan ke dalam satu paket infrastruktur digital yang dapat diekspor dan ditujukan untuk pasar negara berkembang. Para analis mencatat bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok telah membuat kemajuan signifikan dalam penetapan standar teknis internasional, memposisikan Beijing untuk membentuk aturan yang mengatur teknologi baru dengan cara yang dapat secara terukur mengurangi dominasi AS dan sekutunya yang telah membentuk tata kelola digital sejak tahun 1990-an.

Geoekonomi. Strategi pembangunan negara Tiongkok paling baik dipahami melalui lensa geoekonomi yang sama yang diterapkan pada Amerika Serikat di atas, meskipun dengan arsitektur kelembagaan yang berbeda: alih-alih terutama mengandalkan kepemimpinan multilateral, Beijing telah menggabungkan pinjaman bilateral negara, pengaturan sumber

daya untuk infrastruktur, dan kontrol yang semakin meningkat atas rantai pasokan mineral penting sebagai instrumen pengaruh. Dominasi Tiongkok dalam ekstraksi, pengolahan, dan pembuatan magnet logam tanah jarang, dengan tingkat kontrol yang dalam beberapa kategori melebihi delapan puluh atau sembilan puluh persen dari kapasitas global, telah menjadi salah satu ilustrasi paling jelas tentang bagaimana kontrol sumber daya dapat berfungsi sebagai daya tawar dalam hubungan ekonomi yang beragam, seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan pembatasan ekspor logam tanah jarang oleh Beijing sebagai instrumen tawar-menawar dalam negosiasi perdagangan dengan Washington.

Mengapa Pembangunan Menjadi Arena Persaingan?

Dua bagian sebelumnya telah menjelaskan kemampuan asimetris namun tumpang tindih yang dimiliki masing-masing kekuatan dalam persaingan ini. Bagian ini merinci medan sektoral konkret tempat persaingan tersebut berlangsung saat ini.

Infrastruktur. Infrastruktur fisik, pelabuhan, kereta api, pembangkit listrik, dan jalan raya, tetap menjadi medan pertempuran yang paling terlihat, yang mempertentangkan BRI dan AIIB dengan Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGII) yang dipimpin AS (penerus Jaringan Titik Biru dan inisiatif Membangun Kembali Dunia yang Lebih Baik) dan Gerbang Global Uni Eropa, yang diluncurkan pada tahun 2021 dengan target investasi yang dimobilisasi sebesar €300 miliar pada tahun 2027. Setiap alternatif yang bersekutu dengan Barat hingga saat ini kesulitan untuk menyamai kecepatan dan skala pencairan BRI, meskipun masing-masing telah berupaya membedakan diri melalui kosakata bersama tentang

transparansi, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan utang (Bruegel 2024).

Bantuan luar negeri. Arsitektur bantuan bilateral dan multilateral tradisional, USAID, Millennium Challenge Corporation, dan lembaga-lembaga setara di Eropa, semakin beroperasi berdampingan, dan secara implisit bersaing dengan, hibah dan pinjaman lunak Tiongkok yang diberikan tanpa persyaratan tata kelola yang telah lama melekat pada bantuan Barat. Hal ini telah menciptakan efek pilihan yang nyata bagi pemerintah penerima, yang kini dapat secara meyakinkan mengancam untuk mengganti satu sumber pendanaan dengan sumber lain, mengubah dinamika tawar-menawar dalam negosiasi bantuan dengan cara yang tidak diantisipasi oleh literatur donor-penerima tradisional.

Investasi. *Foreign direct investment* telah menjadi instrumen eksplisit persaingan strategis daripada sekadar arus komersial, dengan Washington dan Beijing sama-sama menyaring investasi masuk dan keluar untuk implikasi keamanan nasional dan secara aktif mendekati investasi negara ketiga sebagai bentuk sinyal keselarasan. US International Development Finance Corporation, yang dibentuk pada tahun 2018 khusus untuk memobilisasi modal swasta sebagai penyeimbang terhadap pinjaman Tiongkok yang diarahkan oleh negara, merupakan contoh pergeseran ini menuju perlakuan promosi investasi sebagai strategi geoekonomi negara daripada sekadar fasilitasi pasar.

Teknologi. Infrastruktur digital, jaringan 5G, komputasi awan, dan semakin meningkatnya kecerdasan buatan, telah menjadi

domain di mana penetapan standar itu sendiri merupakan wilayah yang diperebutkan, dengan Jalur Sutra Digital Tiongkok dan rezim kontrol ekspor Washington mewakili dua tawaran yang bersaing untuk membentuk arsitektur teknis yang akan menjadi landasan negara-negara berkembang selama satu generasi. Taruhannya di sini melebihi keuntungan komersial: arsitektur standar apa pun yang diadopsi negara-negara berkembang akan membentuk tata kelola data, kapasitas pengawasan, dan interoperabilitas dengan ekosistem digital Amerika atau Tiongkok selama beberapa dekade mendatang.

Energi. Transisi energi global telah menjadi front ketiga, menggabungkan pembiayaan infrastruktur energi tradisional dengan persaingan yang jauh lebih baru atas mineral-mineral penting—litium, kobalt, grafit, dan unsur tanah jarang—yang menjadi dasar baterai, turbin angin, dan panel surya. Dominasi struktural Tiongkok di bidang ekstraksi, pengolahan, dan manufaktur magnet telah membuat Washington dan sekutunya tertinggal jauh dalam perlombaan yang kini dianggap kedua belah pihak sebagai prioritas strategis utama, menghasilkan gelombang nasionalisme sumber daya dan inisiatif relokasi produksi yang, seperti yang telah diperingatkan oleh para peneliti di Chatham House, biaya lingkungannya berisiko dialihkan ke negara-negara dengan tata kelola yang rapuh yang diklaim sedang dikembangkan oleh persaingan ini.

Digital. Di luar infrastruktur dan perangkat keras, front terakhir dan semakin penting menyangkut tata kelola data itu sendiri: kerangka hukum dan peraturan mana — model berbasis hak Uni Eropa, model berbasis pasar AS, atau model berpusat pada negara Tiongkok — yang diadopsi oleh negara-negara

berkembang saat mereka membangun ekonomi digital mereka sendiri. Pada akhirnya, ini adalah arena persaingan yang paling tidak nyata tetapi berpotensi paling penting, karena akan menentukan bukan hanya infrastruktur mana yang dibangun, tetapi juga di bawah logika normatif dan peraturan mana generasi berikutnya dari ekonomi digital negara berkembang diatur.

Secara keseluruhan, keenam front sektoral ini menunjukkan mengapa "pembangunan" tidak lagi dapat diperlakukan sebagai domain teknokratis yang apolitis dan terisolasi dari persaingan kekuatan besar. Bab-bab selanjutnya mengkaji masing-masing bidang ini secara lebih mendalam dari sudut pandang empiris, sambil kembali pada pokok bahasan kritis utama buku ini: bahwa narasi pembangunan global yang berpusat pada persaingan berisiko mengabaikan peran negara-negara berkembang dalam kisah pembangunan mereka sendiri, bahkan ketika negara-negara tersebut tetap — seperti yang akan ditunjukkan oleh pembahasan strategi lindung nilai di bab-bab selanjutnya — jauh lebih aktif dalam membentuk hasil persaingan ini daripada yang biasanya diakui oleh narasi masing-masing kekuatan besar.

Catatan

Allison, G. (2017). *Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?* Boston: Houghton Mifflin Harcourt. <https://thecic.org/wp-content/uploads/2018/10/180820-Destined-for-War-Graham-Allison.pdf>

Blackwill, R. D., & Harris, J. M. (2016). *War by other means: Geoeconomics and statecraft*. Harvard University Press.

- Brautigam, D. (2020). A critical look at Chinese ‘debt-trap diplomacy’: The rise of a meme. *Area development and policy*, 5(1), 1-14.
- Bruegel. (2024). David and Goliath: The EU's Global Gateway versus China's Belt and Road Initiative. Bruegel Newsletter. <https://www.bruegel.org/newsletter/david-and-goliath-eus-global-gateway-versus-chinas-belt-and-road-initiative>
- Chellaney, B. (2017). China’s debt-trap diplomacy. *Project syndicate*, 23, 2017.
- Chin, G. T., & Gallagher, K. P. (2019). Coordinated credit spaces: The globalization of Chinese development finance. *Development and change*, 50(1), 245-274.
- He, K., & Feng, H. (2025). International relations theory and US–China competition: A theoretical exploration. *The British Journal of Politics and International Relations*, 13691481251391643.
- Ikenberry, G. J. (2008). The rise of China and the future of the West: Can the liberal system survive? *Foreign Affairs*, 87(1), 23–37.
- Jones, L., & Hameiri, S. (2020). Debunking the myth of ‘debt-trap diplomacy’. *Chatham house*, 19(2020), 657-671.
- Mearsheimer, J. J. (2021). The inevitable rivalry: America, China, and the tragedy of great-power politics. *Foreign Aff.*, 100, 48.
- Nye, J. S. (1990). Soft power. *Foreign Policy*, 80, 153–171.
- Nye, J. (2005). Soft power and higher education. *Harvard University*, 14.
- Starrs, S. K. (2015). China's Rise is Designed in America, Assembled in China. *China's World*, 2(2), 9-20.

Konsensus Washington, Konsensus Beijing, dan Ruang Kebijakan Indonesia

Juan Farits Alhamid

Pendahuluan

Perbedaan antara Konsensus Washington dan Konsensus Beijing terlihat dari cara keduanya menempatkan negara, pasar, dan kedaulatan dalam proses pembangunan. Kedua konsensus tersebut berfungsi sebagai rezim legitimasi yang bersaing untuk menentukan arah pembangunan negara berkembang. Persaingan ini tidak membentuk pemisahan yang tegas antara pasar bebas dan negara pembangunan. Sebaliknya, persaingan tersebut menghasilkan ruang kebijakan yang dinamis dan penuh kontradiksi.

Indonesia dapat menggunakan persaingan tersebut untuk memperluas otonomi kebijakan. Namun, hasilnya sangat bergantung pada kapasitas pemerintah dalam mengelola investasi, teknologi, pembiayaan, dan kepentingan politik domestik (Alami dkk 2024 ; Rianto dkk 2024). Artikel ini mempertanyakan Bagaimana persaingan antara Konsensus Washington dan Konsensus Beijing memengaruhi ruang kebijakan pembangunan Indonesia? Hal ini mengacu pada hilirisasi nikel, sengketa perdagangan di WTO, dominasi investasi Tiongkok dalam industri pengolahan mineral, kelemahan pembiayaan iklim Barat, dan pembentukan Danantara. Rangkaian kasus ini menunjukkan bahwa persaingan Washington dan Beijing dapat memperkuat sekaligus membatasi ruang kebijakan Indonesia.

Dua Rezim Legitimasi yang Bersaing

Konsensus Washington menempatkan liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi sebagai dasar pembangunan ekonomi. Kerangka ini menganggap keterbelakangan sebagai akibat dari kelemahan institusi domestik, korupsi, distorsi pasar, dan intervensi negara yang berlebihan (Güven, 2024). Berdasarkan pandangan tersebut, negara perlu mengurangi keterlibatannya dalam kegiatan ekonomi dan memberikan ruang yang lebih besar kepada mekanisme pasar. Lembaga multilateral seperti IMF dan WTO kemudian menjalankan peran penting dalam penyebaran kerangka tersebut. Lembaga ini menggunakan persyaratan pembiayaan, aturan perdagangan, serta standar reformasi ekonomi untuk mempengaruhi kebijakan negara berkembang. Kondisi tersebut mengurangi kewenangan parlemen dan birokrasi domestik dalam menentukan kebijakan pembangunan (Kallis dkk 2025; Wang, Gao, dan Liu 2024).

IMF dan WTO juga memindahkan sebagian proses pengambilan keputusan ke dalam ruang teknokratis internasional. Para ahli, lembaga keuangan, dan organisasi perdagangan internasional memperoleh pengaruh yang semakin besar terhadap arah kebijakan nasional. Akibatnya, keputusan yang memiliki konsekuensi politik sering tampil sebagai kebutuhan teknis yang dianggap netral (Alami, Taggart, dan Chodor 2025; Forster, Honig, dan Kentikelenis 2025; Hopewell 2024).

Konsensus Washington berkembang di atas struktur ekonomi global yang telah terbentuk sejak masa kolonial. Struktur tersebut menempatkan banyak negara di Global Selatan sebagai pemasok komoditas mentah dengan nilai tambah rendah. Negara berkembang menghadapi kesulitan ketika ingin membangun

industri nasional karena perdagangan global mempertahankan pembagian kerja yang tidak seimbang (Dunlap dan Tornel 2025; Suliman, Khwanda, dan Ramana Murthy 2024).

Dengan demikian, Konsensus Washington memperkuat pola ketergantungan yang telah terbentuk sebelumnya. Kerangka ini menjadikan ketergantungan pada ekspor komoditas sebagai bagian dari mekanisme pasar global. Pada saat yang sama, lembaga internasional sering menilai perlindungan industri dan intervensi negara sebagai hambatan terhadap efisiensi pasar. Kebangkitan Tiongkok kemudian menantang dominasi pemikiran tersebut. Pemerintah Tiongkok menggunakan perusahaan milik negara, subsidi industri, pengarahan kredit, dan pengembangan teknologi sebagai instrumen transformasi ekonomi. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa intervensi negara dapat mendorong pertumbuhan, industrialisasi, dan peningkatan kapasitas teknologi (Judijanto, 2026). Konsensus Beijing memberikan legitimasi kepada negara berkembang untuk menjalankan kebijakan industri yang lebih aktif. Pemerintah dapat merujuk pada pengalaman Tiongkok ketika menerapkan hilirisasi, perlindungan sektor strategis, atau pengembangan teknologi domestik. Preseden tersebut memperkuat posisi negara berkembang ketika menghadapi tekanan dari lembaga Bretton Woods (Alami dkk 2025; Haug dkk., 2024).

Namun, pengalaman Tiongkok tidak dapat diterapkan secara otomatis di negara lain. Keberhasilan kebijakan pembangunan tetap bergantung pada kapasitas birokrasi, struktur perusahaan milik negara, dan koalisi politik domestik. Aktor domestik menentukan bagaimana negara menggunakan investasi,

pembiayaan, dan kebijakan industri. Mereka juga dapat mengarahkan kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi atau melayani kepentingan kelompok tertentu (Anguelov 2024; Gupta 2025).

Dukungan negara terhadap kewirausahaan domestik dapat meningkatkan efektivitas usaha ketika pemerintah memiliki kapasitas yang memadai. Pemerintah perlu menyediakan pembiayaan, infrastruktur, regulasi, dan pengawasan yang mendukung kegiatan produksi. Kapasitas tersebut menentukan keberhasilan intervensi negara dalam mendorong pembangunan (Prasannath dkk 2024).

Persaingan Washington dan Beijing akhirnya mendorong proses penyesuaian pada kedua pihak. Donor Barat mulai menawarkan bantuan dan pembiayaan secara lebih kompetitif untuk menghadapi ekspansi investasi Tiongkok. Mereka juga semakin menghubungkan bantuan pembangunan dengan kepentingan ekonomi dan geopolitik. Tiongkok melakukan perubahan serupa dengan memperkuat standar tata kelola dan mekanisme pengendalian risiko. Langkah tersebut bertujuan melindungi investasi, mengurangi risiko gagal bayar, dan merespons kritik terhadap proyek pembiayaan luar negeri (Hameiri dan Jones 2025).

Perkembangan ini menunjukkan bahwa Washington dan Beijing sama-sama membutuhkan negara yang kuat. Konsensus Washington memerlukan negara yang mampu menjaga disiplin fiskal, melindungi hak kepemilikan, dan menegakkan kontrak. Konsensus Beijing memerlukan negara yang mampu

mengarahkan investasi, mengelola perusahaan milik negara, dan melindungi industri strategis.

Perbedaan keduanya terletak pada tujuan penggunaan kapasitas negara. Karena itu, analisis pembangunan perlu mempertanyakan kelompok yang memperoleh manfaat dari kebijakan negara. Jawabannya bergantung pada hubungan kekuasaan di dalam struktur politik domestik. Persaingan tersebut juga bergerak menuju isu geoekonomi dan kemandirian strategis. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok menggunakan kebijakan industri, subsidi, kontrol ekspor, dan pengamanan rantai pasok untuk mempertahankan pengaruh. Mereka bersaing menentukan standar teknologi, akses terhadap bahan baku kritis, dan aturan perdagangan global (Herranz Surrallés, Damro, dan Eckert 2024; Mariotti 2025).

Implikasi bagi Ruang Kebijakan Indonesia

Pengalaman Indonesia memperlihatkan dampak konkret dari persaingan kedua rezim tersebut. Setiap kasus menunjukkan hubungan yang berbeda antara peluang kebijakan, kapasitas domestik, dan risiko ketergantungan.

Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel pada Januari 2020. Pemerintah juga mewajibkan perusahaan mengolah nikel di dalam negeri. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan nilai tambah, menarik investasi industri, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Kebijakan ini menunjukkan peran aktif negara dalam mengarahkan struktur ekonomi. Pemerintah menggunakan kewenangan perdagangan untuk memaksa pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan. Pendekatan tersebut sejalan

dengan gagasan pembangunan yang memberikan ruang besar kepada kebijakan industri.

Uni Eropa menggugat kebijakan Indonesia melalui WTO. Pada November 2022, panel WTO dalam sengketa DS592 menyatakan bahwa larangan ekspor dan kewajiban pemrosesan domestik bertentangan dengan ketentuan GATT. Panel tersebut juga menolak alasan pengecualian yang diajukan Indonesia (WTO 2022). Indonesia kemudian mengajukan banding. Namun, Badan Banding WTO tidak dapat menjalankan fungsinya. Kondisi tersebut menghentikan penyelesaian sengketa dan membuat putusan panel belum memperoleh kekuatan hukum akhir.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia tetap mempertahankan kebijakan larangan ekspor. Pemimpin politik Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk meneruskan hilirisasi meskipun menghadapi tekanan hukum dari WTO (Asia Sentinel 2024). Kasus ini menunjukkan bahwa kelemahan mekanisme penyelesaian sengketa WTO membuka ruang bagi Indonesia untuk mempertahankan kebijakannya. Pemerintah memanfaatkan kondisi tersebut sebagai bagian dari strategi geoekonomi. Tindakan ini menunjukkan bahwa ruang kebijakan dapat berkembang ketika negara mampu membaca kelemahan institusi internasional dan menggunakannya untuk memperkuat posisi nasional.

Ketergantungan pada Modal dan Teknologi Tiongkok

Hilirisasi nikel mendorong peningkatan investasi Tiongkok di Indonesia. Kawasan industri Morowali dan Weda Bay berkembang menjadi pusat pengolahan nikel dalam skala besar.

Perusahaan Tiongkok menguasai sebagian besar kapasitas pemurnian nikel nasional dan memegang peran penting dalam rantai pasok industri tersebut (Readers.id 2026).

Dominasi tersebut menimbulkan persoalan mengenai penguasaan teknologi. Perusahaan Tiongkok tetap mengendalikan teknologi utama, termasuk proses pelindian asam bertekanan tinggi. Tenaga kerja Indonesia lebih banyak memperoleh pengetahuan operasional. Mereka belum menguasai teknologi metalurgi yang memiliki nilai strategis lebih tinggi (Hasan dkk, 2026). Struktur ketenagakerjaan di Indonesia Morowali Industrial Park juga memperlihatkan ketimpangan. Data tahun 2020 mencatat sekitar 43.000 pekerja Indonesia dan 5.000 pekerja Tiongkok. Namun, tenaga kerja Tiongkok menempati banyak posisi pengawas, teknisi, dan manajerial. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan kewenangan dan pendapatan antara kedua kelompok pekerja (Grasia, Tjandra, dan Setiawan 2024)

Pengawasan pemerintah dalam kasus ini juga menghadapi berbagai kelemahan struktural. Transparency International Indonesia (2025) mencatat lemahnya koordinasi antar kementerian dalam mengawasi izin lingkungan dan aktivitas smelter di kawasan Teluk Weda. Lemahnya koordinasi tersebut, pada gilirannya, meningkatkan risiko korupsi, pelanggaran lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa investasi Tiongkok, di satu sisi, membuka ruang bagi keberlanjutan kebijakan hilirisasi Indonesia, tetapi di sisi lain juga menciptakan bentuk ketergantungan baru.

Jika sebelumnya Indonesia bergantung pada arahan kebijakan lembaga-lembaga multilateral, ketergantungan tersebut kini bergeser ke arah modal, teknologi, dan tenaga ahli yang bersumber dari satu mitra dominan. Kondisi ini menuntut pemerintah memastikan bahwa investasi asing benar-benar mendorong penguasaan teknologi nasional, bukan sekadar memindahkan lokasi produksi. Tanpa persyaratan transfer teknologi yang mengikat secara hukum, kebijakan hilirisasi berisiko hanya memindahkan kegiatan pengolahan ke dalam negeri tanpa disertai peningkatan kapasitas teknologi domestik.

Pola ketergantungan terhadap satu mitra investasi tersebut kontras dengan kemitraan yang dibangun Indonesia bersama kelompok negara donor Barat melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP), yang disepakati pada KTT G20 Bali tahun 2022. Kemitraan ini menawarkan pembiayaan senilai USD 20 miliar untuk mendukung percepatan transisi energi Indonesia. Berbeda dari pola investasi Tiongkok yang cenderung berorientasi komersial, skema JETP mencerminkan karakteristik pembiayaan Barat yang disertai target, standar, dan mekanisme tata kelola tertentu, di mana negara-negara donor mengaitkan pencairan dana dengan sejumlah prasyarat, seperti perubahan kebijakan energi, penurunan emisi karbon, dan pengembangan energi terbarukan.

Meskipun demikian, pelaksanaan program JETP di lapangan menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Pada awal 2025, Amerika Serikat menarik diri dari kemitraan tersebut, sehingga Jerman kemudian mengambil alih peran kepemimpinan bersama. Untuk menutupi sebagian komitmen yang ditinggalkan Amerika Serikat, negara-negara mitra

meningkatkan janji pendanaan menjadi sekitar USD 21,4 miliar (IEEFA 2026). Namun, peningkatan komitmen finansial ini belum diikuti oleh percepatan realisasi di lapangan. Lambatnya realisasi tersebut menunjukkan kelemahan mendasar JETP, yakni ketergantungannya pada komitmen politik negara-negara donor yang dapat berubah sewaktu-waktu. Laporan kemajuan tahun 2025, misalnya, hanya mencatat persetujuan dana sekitar USD 2,9 miliar, dengan sebagian di antaranya justru mengalir ke proyek di luar fokus awal kemitraan, seperti pembangunan MRT Jakarta, sementara proyek energi bersih berskala besar yang menjadi inti tujuan JETP belum menunjukkan perkembangan yang berarti (The Diplomat 2026). Ketidakpastian ini turut memengaruhi arah kebijakan energi nasional Indonesia: melalui Kebijakan Energi Nasional tahun 2025, pemerintah bahkan menurunkan target bauran energi terbarukan tahun 2030, dari semula 23 persen menjadi berkisar 19 hingga 23 persen (IEEFA 2026). Penyesuaian target tersebut mengindikasikan bahwa realisasi transisi energi Indonesia masih sangat bergantung pada kepastian dukungan eksternal, alih-alih didorong oleh kapasitas dan komitmen domestik yang kuat.

Dalam konteks model sistem ekonomi negara, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Pemerintah merancang lembaga ini untuk mengkonsolidasikan aset perusahaan milik negara sekaligus mengelola investasi strategis nasional, termasuk aset dari bank-bank besar seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Dengan cakupan konsolidasi tersebut, nilai aset kelolaan Danantara diperkirakan mencapai sekitar USD 900 miliar hingga satu triliun (ASEAN Briefing

2025; Bloomberg 2026). Skala aset yang besar ini menjadikan Danantara instrumen utama pemerintah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Secara konseptual, model Danantara mengikuti logika negara sebagai investor strategis, di mana pemerintah memanfaatkan konsolidasi aset untuk mengarahkan modal ke sektor-sektor yang dianggap penting bagi pembangunan nasional dan sebuah pendekatan yang memiliki kemiripan dengan model Temasek di Singapura.

Meskipun dirancang dengan ambisi besar, tahun pertama operasional Danantara justru memunculkan sejumlah persoalan mendasar. Penggalangan obligasi patriot dari kelompok pengusaha, usulan pemberian kekebalan hukum kepada pejabat, serta besarnya pengaruh politik dalam pengelolaan lembaga menimbulkan kekhawatiran mengenai akuntabilitas (Bloomberg 2026). Selain persoalan tata kelola internal, Danantara juga mulai mensentralisasi ekspor komoditas strategis seperti batu bara dan kelapa sawit melalui anak-anak perusahaannya. Pemerintah berdalih bahwa langkah sentralisasi tersebut bertujuan memperbaiki tata kelola ekspor dan mencegah praktik pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah dari nilai sebenarnya (Caproasia 2026). Namun, alasan tersebut tidak sepenuhnya meredakan kekhawatiran publik mengenai konsentrasi kekuasaan ekonomi pada satu lembaga.

Berbagai persoalan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan Danantara sesungguhnya bergantung pada kualitas tata kelola dan orientasi kebijakannya, bukan semata pada besarnya aset yang dikonsolidasikan. Di satu sisi, lembaga ini berpotensi mengarahkan modal nasional menuju pembangunan industri strategis; di sisi lain, lemahnya pengawasan dapat mengubahnya

menjadi sarana distribusi keuntungan bagi elite politik dan bisnis. Dengan kata lain, kasus Danantara menegaskan peran penting koalisi domestik dalam menentukan arah kebijakan ekonomi: label negara pembangunan (*developmental state*) semata tidak menjamin keberhasilan kebijakan, karena struktur kekuasaan, mekanisme pengawasan, dan kepentingan pengelolalah yang pada akhirnya menentukan arah penggunaan aset negara.

Di luar dinamika kelembagaan domestik tersebut, posisi Indonesia sebagai pemasok utama nikel global turut memberikan daya tawar tersendiri dalam hubungan ekonomi internasional. Amerika Serikat, misalnya, mulai menawarkan kerja sama teknologi hijau dan investasi melalui kerangka ekonomi Indo-Pasifik, sementara Uni Eropa mempertimbangkan dampak mekanisme tarif karbon terhadap produk nikel Indonesia yang masih bergantung pada listrik berbasis batubara (Teknologi.id 2026; Bappenas 2026). Persaingan kepentingan antara kedua mitra besar tersebut sesungguhnya memberi Indonesia ruang untuk menegosiasikan investasi, teknologi, dan akses pasar secara lebih menguntungkan. Akan tetapi, peluang ini hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila pemerintah menetapkan persyaratan domestik yang jelas, mencakup transfer teknologi, pengurangan emisi kawasan industri, perlindungan tenaga kerja, dan pengawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan persyaratan tersebut secara konsisten, Indonesia juga perlu memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah. Kementerian dan badan terkait harus menggunakan standar yang sama ketika menilai kelayakan investasi, sebab

ketidakselarasan kebijakan justru dapat dimanfaatkan investor untuk menghindari kewajiban atau memperoleh konsesi yang berlebihan. Dalam hal ini, kecepatan pencairan investasi tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan; pemerintah perlu turut menilai kontribusi setiap proyek terhadap penguasaan teknologi, kapasitas produksi, pendapatan negara, dan kualitas lingkungan. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi semacam ini, sumber daya nikel Indonesia berpeluang bertransformasi dari sekadar komoditas ekspor menjadi instrumen pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Konsensus Washington dan Konsensus Beijing membentuk dua rezim legitimasi yang bersaing dalam tata kelola pembangunan global. Persaingan tersebut menciptakan peluang bagi Indonesia untuk memperluas ruang kebijakan. Pada saat yang sama, persaingan ini dapat membentuk ketergantungan baru dalam bidang teknologi, pembiayaan, dan investasi.

Indonesia telah memanfaatkan kelemahan mekanisme WTO untuk mempertahankan kebijakan hilirisasi nikel. Namun, dominasi perusahaan Tiongkok dalam pengolahan nikel membatasi penguasaan teknologi nasional. Kerapuhan JETP juga menunjukkan bahwa pembiayaan Barat tidak selalu memberikan kepastian jangka panjang.

Danantara menggambarkan peluang dan risiko dari penguatan peran negara. Lembaga tersebut dapat mengarahkan modal domestik menuju transformasi industri. Namun, pengaruh politik dan lemahnya pengawasan dapat mengubahnya menjadi

sumber rente baru. Ruang kebijakan yang lebih luas tidak muncul secara otomatis dari persaingan antara Washington dan Beijing. Indonesia perlu memperkuat kapasitas birokrasi, koordinasi antar lembaga, tata kelola investasi, dan kemampuan negosiasi. Pemerintah juga perlu menetapkan persyaratan transfer teknologi dan perlindungan kepentingan nasional dalam setiap kerja sama.

Hilirisasi akan mendukung transformasi ekonomi ketika Indonesia mampu menguasai teknologi dan meningkatkan posisi dalam rantai nilai global. Tanpa kemampuan tersebut, hilirisasi hanya akan mempertahankan posisi Indonesia sebagai pemasok bahan baku dan lokasi produksi bagi kepentingan industri negara lain.

Daftar Pustaka

- Alami, I., Taggart, J., Whiteside, H., González-Vicente, R., Liu, I. T., & Rolf, S. (2024). Quo vadis neoliberalism in an age of resurgent state capitalism? *Finance and Space*, 1(1), 340–367.
<https://doi.org/10.1080/2833115x.2024.2392736>
- Alami, Ilias, Jack Taggart, and Tom Chodor. (2025). “Rebuilding the Ladder? Contemporary Contests Over Industrial Policy.” *Global Policy*: 1–14. doi:10.1111/1758-5899.70064.
- Anguelov, Dimitar. (2024). “State-Owned Enterprises and the Politics of Financializing Infrastructure Development in Indonesia: De-Risking at the Limit?” *Development and Change* 55(3): 493–529. doi:10.1111/dech.12828.
- ASEAN Briefing. (2025, 10 Maret). Indonesia officially launches new sovereign wealth fund Danantara.

<https://www.aseanbriefing.com/news/indonesia-officially-launches-new-sovereign-wealth-fund-danantara/>

Asia Sentinel. (2024, 9 Oktober). Indonesia defies WTO in EU nickel dispute. <https://www.asiasentinel.com/p/indonesia-defies-wto-eu-nickel-dispute>

Bloomberg. (2026, 16 Maret). Inside Indonesia sovereign wealth fund Danantara's turbulent first year. <https://www.bloomberg.com/news/features/2026-03-16/inside-indonesia-sovereign-wealth-fund-danantara-s-turbulent-first-year>

Caproasia. (2026, 21 Juli). Indonesia \$1 trillion sovereign wealth fund Danantara (BPI Danantara) to launch single integrated platform in 2026 September to oversee exports of strategic commodities. <https://www.caproasia.com/2026/07/21/indonesia-1-trillion-sovereign-wealth-fund-danantara-bpi-danantara-to-launch-single-integrated-platform-in-2026-september-to-imp/>

Dunlap, Alexander, and Carlos Tornel. (2025). “Was Postdevelopment Too Much? Autonomous Struggle, Academic Coloniality & the Radical Roots of the Pluriverse.” *Globalizations* 22(2): 221–44. doi:10.1080/14747731.2024.2349317.

Forster, Timon, Dan Honig, and Alexandros Kentikelenis. (2025). “Formal Governance Matters: When, How, and Why States Act on the IMF Executive Board.” *Review of International Political Economy* 32(3): 818–46. doi:10.1080/09692290.2024.2441136.

- Grasia, Virginia Ahtali, Sevinka Andrea Tjandra, and Viona Laurentia Setiawan. 2024. "Transformasi Ekonomi: Menggali Potensi Investasi Tiongkok Di Smelter Nikel Indonesia." *Parahyangan Economic Development Review* 3(1):247–57. doi:10.26593/pedr.v3i1.7507.
- Gupta, Surupa. (2025). "Developing India's Food Processing Sector: Farm Politics, Federalism, and State-Directed Development." *Studies in Comparative International Development* 60(2): 386–411. doi:10.1007/s12116-025-09462-6.
- Güven, A. B. (2024). The Washington consensus and the post-Washington consensus (hlm. 108–112). <https://doi.org/10.4324/9780429282348-23>
- Hameiri, Shahar, and Lee Jones. (2025). "International Development Financing in the Second Cold War: The Miserly Convergence of Western Donors and China." *Development and Change* 56(1): 3–30. doi:<https://doi.org/10.1111/dech.12871>.
- Haug, Sebastian, Rosemary Foot, and Max Otto Baumann. (2024). "Power Shifts in International Organisations: China at the United Nations." *Global Policy* 15(S2): 5–17. doi:10.1111/1758-5899.13368.
- Herranz-Surrallés, Anna, Chad Damro, and Sandra Eckert. (2024). "The Geoeconomic Turn of the Single European Market? Conceptual Challenges and Empirical Trends." *JCMS: Journal of Common Market Studies* 62(4): 919–37. doi: <https://doi.org/10.1111/jcms.13591>.
- Hopewell, Kristen. (2024). "The (Surprise) Return of Development Policy Space in the Multilateral Trading System: What the WTO Appellate Body Blockage Means

- for the Developmental State.” *Review of International Political Economy* 31(4): 1245–70. doi:10.1080/09692290.2024.2303681.
- IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis). (2026, 5 Februari). Building credibility in Indonesia's energy transition: Insights from the ETM and JETP Indonesia. <https://ieefa.org/resources/building-credibility-indonesias-energy-transition-insights-etm-and-jetp-indonesia>
- Judijanto, L. (2026). Prospects and Challenges of State Capitalism as Economic Policy: A Review. *Journal on Political Sciences & International Relations*, 4(1), 1–1. [https://doi.org/10.47363/jpsir/2026\(4\)151](https://doi.org/10.47363/jpsir/2026(4)151)
- Kallis, Giorgos, Jason Hickel, Daniel W. O'Neill, Tim Jackson, Peter A. Victor, Kate Raworth, Juliet B. Schor, Julia K. Steinberger, and Diana Ürge-Vorsatz. (2025). “Post-Growth: The Science of Wellbeing within Planetary Boundaries.” *The Lancet Planetary Health* 9(1): e62–78. doi:10.1016/S2542-5196(24)00310-3.
- Kementerian PPN/Bappenas RI. (2026). Working Paper, Volume IX No. 2, Maret 2026. <https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/download/560/197>
- Mariotti, Sergio. (2025). “‘Open Strategic Autonomy’ as an Industrial Policy Compass for the EU Competitiveness and Growth: The Good, the Bad, or the Ugly?” *Journal of Industrial and Business Economics* 52(1): 1–26. doi:10.1007/s40812-024-00327-y.
- Prasannath, Vanitha, Rajendra P. Adhikari, Sarel Gronum, and Morgan P. Miles. (2024). 20 *International*

- Entrepreneurship and Management Journal Impact of Government Support Policies on Entrepreneurial Orientation and SME Performance. Springer US. doi:10.1007/s11365-024-00993-3.
- Readers.id. (2026, 7 April). Mobil listrik China tantang dominasi Jepang di pasar otomotif Indonesia. <https://www.readers.id/mobil-listrik-china-tantang-jepang>
- Rianto, R., Prakoso, L. Y., Alman, F. Z., Soemantri, A. I., Patmi, S., Bermiana, S., Habibie, S. Y., & Al-Mujaddid, T. F. (2024). The Urgency of Indonesian Public Policy in Facing a War Situation in the Peace of Global Economic Competition. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology*, 2(7), 1115–1126. <https://doi.org/10.55927/marcopolo.v2i7.10450>
- Suliman, Forat, Homam Khwanda, and R V Ramana Murthy. (2024). “Travails of Conflict and Economic Development in Syria.” *International Critical Thought* 14(1): 97–118. doi:10.1080/21598282.2024.2332972.
- Teknologi.id. (2026, 9 Januari). Krisis nikel dunia! Harta karun Indonesia makin langka, jadi rebutan AS dan China. <https://teknologi.id/bisnis-nasional/krisis-nikel-dunia-harta-karun-indonesia-makin-langka-jadi-rebutan-as-dan-china>
- The Diplomat. (2026, 29 Mei). Why Southeast Asia's Just Energy Transition Partnerships have stalled. <https://thediplomat.com/2026/05/why-southeast-asias-just-energy-transition-partnerships-have-stalled/>
- Transparency International Indonesia. (2025, 9 September). Korupsi dan ancaman masa depan Teluk Weda di tengah

industrialisasi nikel. <https://ti.or.id/korupsi-dan-ancaman-masa-depan-teluk-weda-ditengah-industrialiasi-nikel/>

Wang, Fanglei, Jianbo Gao, and Feiyan Liu. (2024). 11 United States Centre Unlocking Africa's Development Potential: Insights from the Perspective of Global Hierarchy and Competition. Springer US. doi:10.1057/s41599-024-03336-3.

World Trade Organization (WTO). (2022). DS592: Indonesia — Measures relating to raw materials [Panel Report, 30 November 2022]. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm

Zidan Hasan, Muhammad, Grace Evelina Buji, and dan Rinto Alexandro. 2026. "Studi Literatur Perjanjian Investasi Smelter Nikel Indonesia-China: Peluang Dan Tantangan Transfer Teknologi." *Journal* 7(1):2025–37.

Model Kerja Sama Pembangunan Amerika Serikat dan Tiongkok dalam Pengembangan Infrastruktur di Negara-negara Berkembang

Wirdhatull Muthmainnah Alkamil

Pendahuluan

Kerja sama pembangunan internasional merupakan aspek penting dalam hubungan antarnegara, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan kelembagaan, khususnya di negara-negara berkembang. Dalam sistem internasional yang semakin saling bergantung, pembangunan tidak lagi semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah domestik tetapi juga melibatkan berbagai aktor eksternal, seperti negara donor, organisasi internasional, lembaga keuangan global, dan sektor swasta. Salah satu bidang pembangunan yang mendapat perhatian utama dalam kerja sama internasional adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur memainkan peran strategis karena berfungsi sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas, penguatan perdagangan, dan peningkatan kualitas hidup (Regilme & Hodzi, 2021).

Bagi banyak negara berkembang, pembangunan infrastruktur tetap menjadi tantangan yang signifikan. Anggaran nasional yang terbatas, kapasitas teknologi yang rendah, kurangnya investasi, dan meningkatnya kebutuhan pembangunan berarti banyak negara membutuhkan dukungan eksternal. Oleh karena itu, kerja sama pembangunan dengan negara-negara maju merupakan alternatif untuk mempercepat pembangunan

nasional. Dalam konteks ini, Amerika Serikat dan Tiongkok adalah dua negara yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk pola kerja sama pembangunan global (Ismail et al., 2025).

Amerika Serikat memiliki sejarah panjang dalam memberikan bantuan pembangunan internasional. Sejak periode pasca Perang Dunia II, Amerika Serikat telah menggunakan bantuan luar negeri sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan ekonomi sekaligus memperkuat hubungan diplomatik dengan berbagai negara. Melalui berbagai lembaga seperti *International Development Finance Corporation* (DFC), Amerika Serikat memberikan dukungan di berbagai sektor pembangunan, termasuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, energi, dan penguatan lembaga pemerintah. Model kerja sama pembangunan Amerika Serikat umumnya menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagai fondasi pembangunan yang sukses. Amerika Serikat memandang pembangunan infrastruktur tidak hanya terkait dengan pembangunan fisik tetapi juga harus didukung oleh sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang mampu mengelola sumber daya secara efektif. Oleh karena itu, bantuan pembangunan Amerika Serikat sering disertai dengan berbagai syarat yang berkaitan dengan demokrasi, pemberantasan korupsi, perlindungan hak asasi manusia, dan reformasi kebijakan ekonomi (Regilme & Hodzi, 2021).

Berbeda dengan Amerika Serikat, Tiongkok adalah aktor baru dan semakin berpengaruh dalam kerja sama pembangunan internasional. Munculnya Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi

global telah membuatnya semakin aktif dalam memberikan investasi dan bantuan pembangunan kepada negara-negara berkembang. Salah satu bentuk utama kerja sama pembangunan Tiongkok adalah *Belt and Road initiative* (BRI), yang diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013. Program ini bertujuan untuk membangun konektivitas ekonomi global melalui pembangunan berbagai proyek infrastruktur seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan, bandara, pembangkit energi, dan kawasan industri. Model pembangunan Tiongkok menekankan pembangunan ekonomi melalui investasi infrastruktur dan kerja sama perdagangan. Tidak seperti pendekatan Amerika Serikat, yang sering mengaitkan bantuan pembangunan dengan reformasi politik dan kelembagaan, Tiongkok berpegang pada prinsip non-intervensi dalam urusan domestik negara-negara mitra. Tiongkok percaya bahwa setiap negara berhak menentukan sistem politik dan kebijakan pembangunannya sendiri tanpa tekanan eksternal. Pendekatan ini menjadikan Tiongkok sebagai mitra yang menarik bagi beberapa negara berkembang yang membutuhkan pembiayaan infrastruktur yang substansial dan proses kerja sama yang lebih fleksibel (Regilme & Hodzi, 2021).

Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur semakin terlihat di berbagai wilayah, khususnya Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Negara-negara berkembang sangat penting karena mereka memiliki kebutuhan yang signifikan akan pembangunan infrastruktur dan juga menjadi arena persaingan pengaruh antara dua kekuatan besar tersebut. Di satu sisi, kerja sama dengan Amerika Serikat dan Tiongkok memberikan peluang bagi negara-negara

berkembang untuk mendapatkan investasi, teknologi, dan dukungan pembangunan. Namun, di sisi lain, negara-negara berkembang juga menghadapi tantangan seperti risiko ketergantungan ekonomi, tekanan geopolitik, dan kebutuhan untuk melindungi kepentingan nasional (Kudadiri et al., 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, pembahasan model kerja sama pembangunan Amerika Serikat dan Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang sangat penting. Analisis kedua model ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana kekuatan besar menggunakan kerja sama pembangunan sebagai strategi ekonomi dan politik, serta dampaknya terhadap negara penerima.

Argumen utama yang dikemukakan dalam makalah ini adalah bahwa model kerja sama pembangunan infrastruktur AS dan Tiongkok pada dasarnya merupakan dua sisi dari fenomena yang sama, yaitu penyediaan barang publik global oleh kekuatan hegemonik sebagai instrumen untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh, sebagaimana dijelaskan oleh Teori Stabilitas Hegemonik dan perspektif geoekonomi kontemporer. Namun, perbedaan mendasar dalam desain kelembagaan BRI yang berbasis pada pinjaman bilateral antar negara dengan sedikit persyaratan tata kelola, dibandingkan dengan DFC/PGII yang berbasis pada campuran modal swasta-publik dengan standar transparansi dan keberlanjutan yang lebih ketat membuat kedua model tersebut sebenarnya bersaing untuk mendapatkan pengaruh, tetapi secara fungsional saling melengkapi dalam mengatasi kebutuhan pembiayaan yang

sangat besar dari negara-negara berkembang yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh satu model pun.

Kerangka Teoretis: Stabilitas Hegemonik dan Geoeconomi

Teori Stabilitas Hegemonik, yang dikembangkan oleh Charles Kindleberger dan kemudian diperluas oleh Robert Gilpin, didasarkan pada gagasan bahwa ketertiban dalam ekonomi politik internasional, termasuk penyediaan barang publik lintas batas seperti stabilitas moneter, keterbukaan perdagangan, dan infrastruktur konektivitas hanya dapat terwujud secara stabil jika ada satu kekuatan dominan (hegemon) yang bersedia dan mampu menanggung biaya penyediaannya. Hegemon melakukan ini bukan hanya karena altruisme, tetapi karena manfaat yang diperolehnya dalam bentuk legitimasi, pengaruh normatif, dan keterikatan ekonomi negara-negara lain pada sistem yang telah dibangunnya jauh lebih besar daripada biayanya (Gilpin, 1981).

Ketika satu kekuatan hegemonik mulai digantikan oleh kekuatan yang sedang naik daun, seperti yang terjadi dalam hubungan saat ini antara Amerika Serikat dan Tiongkok, penyediaan barang publik menjadi arena persaingan untuk mendapatkan pengaruh. Di sinilah konsep geoekonomi penggunaan instrumen ekonomi (investasi, perdagangan, bantuan keuangan) untuk mencapai tujuan geopolitik menjadi pelengkap penting bagi Teori Stabilitas Hegemonik.

Model Tiongkok: Inisiatif Sabuk dan Jalan sebagai Instrumen Konektivitas dan Pengaruh

Presiden Xi Jinping meluncurkan Belt and Road initiative (BRI) pada September 2013 di Kazakhstan (Sabuk Ekonomi Jalur

Sutra) dan diikuti sebulan kemudian di Indonesia (Jalur Sutra Maritim Abad ke-21). Inisiatif-inisiatif ini kemudian digabungkan menjadi satu kerangka kerja komprehensif yang mencakup jalan raya, jalur kereta api, pelabuhan, dan jalur pipa energi di seluruh Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin. Model pembiayaan BRI bergantung pada bank kebijakan milik negara seperti Tiongkok Development Bank dan Tiongkok Exim Bank, ditambah dengan instrumen investasi seperti Silk Road Fund dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Karakteristik utama model ini adalah sifat bilateral antar negara, proses persetujuan yang relatif cepat, dan persyaratan tata kelola dan lingkungan yang secara historis lebih longgar dibandingkan dengan pinjaman dari lembaga multilateral tradisional seperti Bank Dunia (Nedopil, 2026).

Proyek-proyek awal BRI, seperti jalur kereta api standar Mombasa–Nairobi di Kenya dan jalur kereta api Ethiopia–Djibouti, menunjukkan keunggulan model ini dalam hal kecepatan implementasi proyek, sebuah kebutuhan penting bagi negara-negara berkembang yang sering dihadapkan pada proses birokrasi yang panjang di bawah skema pembiayaan Barat. Fokus investasi juga mulai bergeser dari bahan bakar fosil dan proyek mega-infrastruktur konvensional ke energi terbarukan dan apa yang disebut "Tiga Sektor Baru": sel surya, baterai lithium, dan kendaraan listrik, yang menunjukkan adaptasi strategis Tiongkok terhadap kritik keberlanjutan yang telah lama dilayangkan terhadap BRI (Nedopil, 2026).

Namun, model ini juga menuai kritik tajam terkait risiko diplomasi jebakan utang meskipun validitas tuduhan ini masih

diperdebatkan di kalangan akademisi serta masalah transparansi kontrak, ketergantungan pada kontraktor dan tenaga kerja Tiongkok, dan minimnya keterlibatan publik di negara tuan rumah selama proses perencanaan proyek. Kasus penyerahan kendali operasional pelabuhan Hambantota di Sri Lanka kepada Tiongkok karena ketidakmampuannya untuk membayar utang adalah contoh klasik dan sering dikutip, meskipun beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa arah kebijakan BRI kini bergerak menuju proyek-proyek yang lebih kecil dan lebih selektif berdasarkan penilaian kelayakan yang lebih matang, sejalan dengan pengalaman implementasi selama satu dekade (Wibisono, 2019).

Model Amerika Serikat: DFC dan PGII sebagai Instrumen Pembiayaan Berbasis Pasar

Model Amerika Serikat berkembang melalui jalur kelembagaan yang berbeda. International Development Finance Corporation (DFC) AS dibentuk melalui Undang-Undang BUILD pada tahun 2018 dan mulai beroperasi pada tahun 2019 sebagai penerus OPIC, dengan mandat untuk memobilisasi modal sektor swasta AS untuk investasi strategis di negara-negara berkembang (U.S. Embassy Jakarta, 2026). Tidak seperti BRI, yang bergantung pada pinjaman bank yang didanai negara, DFC beroperasi sebagai lembaga pemberi pinjaman dan asuransi, menjembatani modal swasta dengan proyek-proyek di pasar negara berkembang yang dianggap terlalu berisiko bagi investor swasta. DFC juga memperoleh wewenang baru untuk menyediakan pembiayaan ekuitas dan hibah wewenang yang sebelumnya tidak dimilikinya untuk memungkinkan kecepatan dan

fleksibilitas yang lebih besar dalam bersaing dengan skema pembiayaan Tiongkok (Zahira, 2026).

Di tingkat multilateral, negara-negara G7 (7 negara dengan perekonomian maju) mengonsolidasikan inisiatif *Build Back Better World* menjadi Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGII) pada tahun 2022, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Jaringan Titik Biru: transparansi fiskal, keberlanjutan lingkungan, standar tenaga kerja, dan tata kelola yang baik sebagai prasyarat untuk pembiayaan proyek. PGII menargetkan mobilisasi kolektif hingga US\$600 miliar oleh negara-negara G7 pada tahun 2027, dengan mobilisasi melebihi US\$60 miliar sejak diluncurkan. Model ini secara eksplisit diposisikan sebagai alternatif untuk BRI, yang menekankan kualitas dan standar tata kelola daripada kecepatan implementasi proyek (Izza, 2025).

Karakteristik model Amerika Serikat menawarkan keuntungan dalam hal standar keberlanjutan proyek, transparansi data tingkat proyek yang dapat diakses publik, dan keterlibatan sektor swasta, yang berpotensi menghasilkan proyek dengan kualitas manajemen yang lebih tinggi. Namun, model ini juga memiliki kelemahan struktural: proses persetujuan yang lebih lambat karena uji tuntas investasi yang ketat, ketergantungan pada minat investor swasta yang mungkin tidak sejalan dengan prioritas pembangunan negara tuan rumah, dan skala pembiayaan yang, secara agregat, masih jauh lebih kecil daripada komitmen tahunan Tiongkok melalui BRI.

Relevansi Teoretis terhadap Kasus Ini: Antara Persaingan Hegemonik dan Komplementaritas Fungsional

Berdasarkan Teori Stabilitas Hegemonik dan geoekonomi, pola yang muncul sangat konsisten dengan prediksi teoretis: kedua kekuatan besar menyediakan barang publik infrastruktur bukan semata-mata untuk kepentingan negara berkembang, tetapi lebih sebagai instrumen untuk mempertahankan atau merebut posisi pengaruh struktural (Gilpin, 1981). Ekspansi drastis anggaran DFC pada tahun 2025 dan peluncuran PGII sebagai tantangan eksplisit terhadap BRI menunjukkan bahwa Amerika Serikat memandang penyediaan pembiayaan infrastruktur sebagai front baru dalam perebutan kekuasaan global, sama seperti Amerika Serikat secara historis menggunakan Rencana Marshall dan Bretton Woods untuk membangun tatanan hegemoniknya pasca-1945. Tiongkok, sebagai kekuatan penantang, menggunakan BRI dengan logika serupa: membangun pengaruh struktural melalui konektivitas fisik dan hubungan keuangan jangka panjang, sekaligus memperluas pasar untuk kelebihan kapasitas industrinya sendiri (Trudeau, 2026).

Namun, argumen bahwa kedua model tersebut murni kompetitif perlu diimbangi dengan dua fakta empiris penting. Pertama, kesenjangan pembiayaan infrastruktur global di negara-negara berkembang diperkirakan mencapai triliunan dolar AS per tahun. Jumlah yang jauh melebihi kapasitas gabungan BRI, DFC, dan PGII. Dalam konteks ini, kedua model tersebut sebenarnya saling melengkapi kebutuhan yang berbeda: BRI unggul dalam pembiayaan skala besar dan kecepatan implementasi untuk proyek konektivitas fisik dasar (jalan raya, kereta api, pelabuhan), sementara DFC/PGII lebih relevan untuk

proyek yang membutuhkan standar keberlanjutan tinggi dan keterlibatan investor swasta jangka panjang, seperti energi terbarukan dan infrastruktur digital (Moses et al., 2022).

Dengan demikian, relevansi teori terhadap kasus ini berlapis-lapis: pada tingkat motif dan desain kebijakan, logika geoekonomi hegemonik terbukti ampuh dalam menjelaskan mengapa Amerika Serikat dan Tiongkok bersedia menanggung biaya besar untuk menyediakan pembiayaan infrastruktur bagi negara lain. Namun, pada tingkat dampak dan hasil bagi negara berkembang, logika ini tidak sepenuhnya menjelaskan keseluruhan realitas, karena persaingan antar hegemon sebenarnya dapat menghasilkan eksternalitas positif berupa lebih banyak pilihan pembiayaan dan standar yang terus meningkat asalkan negara berkembang memiliki kapasitas kelembagaan untuk mengelola dan menegosiasikan kedua model tersebut dengan cermat, daripada hanya menjadi penerima pasif dari salah satu skema.

Kesimpulan

Studi tentang model kerja sama pembangunan infrastruktur Amerika Serikat dan Tiongkok di negara-negara berkembang ini menghasilkan beberapa pelajaran penting. Pertama, kedua model tersebut lahir dari motif geopolitik yang konsisten dengan prediksi Teori Stabilitas Hegemonik dan geoekonomi, yaitu penggunaan instrumen ekonomi sebagai sarana untuk mempertahankan atau merebut pengaruh global. Oleh karena itu, negara-negara berkembang perlu menyadari bahwa tidak ada pembiayaan infrastruktur yang sepenuhnya bebas dari kepentingan strategis para penyedianya. Kedua, di luar dimensi

kompetitif, keberadaan dua model BRI yang berbeda—yang cepat tetapi minim regulasi versus DFC/PGII yang lebih lambat tetapi berstandar tinggi —dalam praktiknya membuka komplementaritas dan pilihan yang sebelumnya tidak tersedia bagi negara-negara berkembang di era ketika Barat adalah satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan. Ketiga, dan yang terpenting, manfaat persaingan antara kedua model ini bagi negara-negara berkembang sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan domestik masing-masing negara untuk melakukan negosiasi, penilaian kelayakan, dan pengawasan proyek secara independen. Negara-negara berkembang yang mampu membangun kapasitas ini akan dapat memposisikan diri sebagai peserta aktif dalam persaingan kekuatan besar demi pembangunan nasional mereka, alih-alih secara pasif tunduk pada persaingan geoekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Daftar Pustaka

- Gilpin, R. (2010). *War and Change in World Politics*. Cambridge University Press.
- Ismail et al., F. F. (2025). Pengaruh Globalisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Berkembang: Analisis Dampak Investasi Asing Langsung (FDI), Ekspor, dan Perdagangan Bebas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Berkembang. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*.
- Izza, A. (2025). *United States Strategy Change: From Build Back Better World (B3W) To Partnership For Global*

- Infrastructure And Investment (PGII). Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Kudadiri et al., I. S. (2026). Partnership For The Goals: Utang, Investasi, dan Bantuan Luar. *Journal of Golden Generation Economic*.
- Moses et al., O. (2022, November 14). Spot the Difference: Comparing the Belt Road Initiative and the Partnership for Global Infrastructure and Investment. Retrieved from <https://www.bu.edu:https://www.bu.edu/gdp/2022/11/14/spot-the-difference-comparing-the-belt-road-initiative-and-the-partnership-for-global-infrastructure-and-investment/>
- Nedopil, C. (2026). China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2025.
- Regilme, S. s., & Hodzi, O. (2021). Comparing US and Chinese Foreign Aid in the Era of Rising Powers. *The International Spectator: Italian Journal of International Affairs*.
- Trudeau, E. K. (2026). The U.S. has a key tool for national, economic security in international development financing.
- U.S. Embassy Jakarta. (2026, Januari 21). DFC Umumkan Direktur Pelaksana Regional Baru untuk Pimpin Operasi Regional dari Jakarta. Retrieved from <https://id.usembassy.gov:https://id.usembassy.gov/id/dfc-umumkan-direktur-pelaksana-regional-baru-untuk-pimpin-operasi-regional-dari-jakarta/>
- Wibisono, A. N. (2019). China's "Belt and Road Initiative" in Sri Lanka : Debt Diplomacy in Hambantota Port Investment. *Ilmu Hubungan Internasioanl*.

Zahira, A. (2026, Mei 9). Trump Ubah DFC Jadi "Mesin Finansial" AS, Tantang Bank Dunia & China. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com:https://www.cnbcindonesia.com/research/20260509134654-128-733668/trump-ubah-dfc-jadi-mesin-finansial-as-tantang-bank-dunia-china>

Institutional Balancing dalam Persaingan Digital Silk Road versus Digital Connectivity and Cybersecurity Partnership di Asia Tenggara

Muhammad Raihan Tarunajaya

Pendahuluan

Selama satu dekade terakhir, persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam kebijakan pembangunan tidak lagi hanya berfokus pada proyek jalan, pelabuhan, atau rel kereta, melainkan telah bergeser ke aspek yang lebih tidak kasatmata namun sama strategisnya, yaitu infrastruktur digital. Kabel bawah laut, jaringan 5G, pusat data, dan sistem pembayaran digital kini menjadi arena baru di mana institusi dan aktor dari kedua negara adidaya saling berhadapan untuk memperebutkan pengaruh, terutama di kawasan Asia Tenggara yang tumbuh menjadi salah satu ekonomi digital paling dinamis di dunia. Di satu sisi, Tiongkok mengoperasionalkan *Digital Silk Road* atau DSR sebagai perpanjangan *Belt and Road Initiative*, yang ternyata lebih banyak digerakkan oleh perusahaan teknologi nasional seperti Huawei, Alibaba, dan Tencent ketimbang oleh instrumen kebijakan pemerintah yang eksplisit. Di sisi lain, Amerika Serikat merespons melalui *Digital Connectivity and Cybersecurity Partnership* atau DCCP, sebuah inisiatif lintas-lembaga yang dipimpin USAID dan Departemen Luar Negeri untuk mempromosikan model internet yang terbuka dan berbasis pasar. Semakin tingginya nilai ekonomi digital ASEAN yang diperkirakan bisa tumbuh dari 300 miliar dolar AS menuju hampir 1 triliun dolar AS pada 2030 secara organik, dan angka

ini bisa tumbuh lagi jika implementasi DEFA berjalan secara optimal (ASEAN, 2023).

Fenomena ini penting untuk dikaji karena ini memperlihatkan bahwa kebijakan pembangunan kontemporer tidak lagi semata-mata soal transfer modal atau teknologi, melainkan juga pertarungan norma tata kelola, standar teknis, dan kedaulatan data yang berdampak jangka panjang terhadap negara-negara berkembang penerima. Berbeda dari infrastruktur fisik seperti pelabuhan atau rel kereta yang dampaknya relatif mudah diukur, infrastruktur digital bekerja secara jauh lebih tersembunyi sebuah kabel bawah laut atau kamera pengawas yang terpasang hari ini dapat menentukan ke mana data suatu negara mengalir, siapa yang memiliki akses terhadapnya, dan aturan main teknis seperti apa yang harus diikuti puluhan tahun ke depan. Karena itu, kajian mengenai institusi dan aktor di balik ekspansi digital Tiongkok dan Amerika Serikat tidak dapat dilepaskan dari perdebatan yang lebih luas mengenai masa depan tatanan pembangunan internasional itu sendiri.

Pertanyaan penelitian yang muncul pada bab ini adalah bagaimana teori *institutional balancing* dapat menjelaskan dinamika kompetisi kelembagaan antara *Digital Silk Road* Tiongkok dan *Digital Connectivity and Cybersecurity Partnership* Amerika Serikat di Asia Tenggara, dan sejauh mana kompetisi tersebut turut mendorong konsolidasi institusional di tingkat regional ASEAN?

Bab ini berargumen bahwa persaingan DSR-DCCP merupakan manifestasi kontemporer dari *institutional balancing*, di mana Tiongkok, sebagai *order challenger*, menjalankan strategi

inclusive-exclusive balancing melalui aktor hibrida negara-korporasi, sementara Amerika Serikat, sebagai *order defender*, cenderung menjalankan *exclusive balancing* melalui koalisi negara-negara yang sepaham. Namun, alih-alih menghasilkan konflik *zero-sum* semata, persaingan ini pada akhirnya memberikan efek positif yang tidak terduga yaitu membuat pihak ketiga seperti ASEAN menjadi lebih solid dalam membangun dan memperkuat institusi kawasan mereka sendiri, yang terlihat dari inisiatif ASEAN membangun Digital Economy Framework Agreement (DEFA) sebagai respons atas perpecahan yang ditimbulkan oleh kedua kekuatan besar tersebut.

Institutional Balancing sebagai Kerangka Teoretis

Teori institutional balancing yang dikembangkan oleh He (2008) (2008b) menjelaskan bahwa dalam kondisi interdependensi ekonomi yang mendalam, negara-negara cenderung tidak lagi mengandalkan *balancing* militer konvensional untuk merespons pergeseran distribusi kekuasaan, melainkan menggunakan institusi multilateral maupun minilateral sebagai instrumen soft balancing. He (2008a) membedakan dua bentuk strategi ini, *inclusive institutional balancing*, yakni upaya melibatkan negara target ke dalam institusi tertentu agar perilakunya dapat dibatasi oleh norma dan aturan institusi tersebut, serta *exclusive institutional balancing*, yakni upaya membangun atau mendominasi institusi baru yang secara sengaja mengecualikan negara target. Dalam kerangka ini, peran yang dimainkan sebuah negara turut menentukan strategi yang dipilih negara yang berperan sebagai *order defender*; pihak yang berkepentingan mempertahankan tatanan yang ada, seperti Amerika Serikat,

cenderung memilih *exclusive balancing* untuk mengecualikan pesaingnya dari institusi yang didominasinya, sementara *order challenger* seperti Tiongkok cenderung mengombinasikan strategi *inclusive* dan *exclusive* untuk memaksimalkan pengaruh sekaligus legitimasinya.

Perkembangan lebih lanjut dari teori ini oleh He dan Feng (2025) memperkenalkan konsep *institutional peace*, yang berargumen bahwa *institutional balancing* antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik pasca krisis finansial global 2008 justru menghasilkan tiga dampak positif yang tidak diniatkan, dinamisme institusional yang berkelanjutan, insentif baru bagi kerja sama regional, dan penyediaan barang publik oleh kedua kekuatan besar tersebut. Argumen ini penting sebagai koreksi terhadap pandangan yang berlebihan dalam melihat persaingan AS-Tiongkok semata sebagai jalan menuju konflik terbuka, dan menjadi pijakan analitis utama bab ini dalam membaca kasus DSR versus DCCP.

Relevansi kerangka ini untuk kasus infrastruktur digital terletak pada dua asumsi dasarnya. Pertama, *institutional balancing* mengasumsikan bahwa institusi bukan sekadar wadah netral kerja sama, melainkan instrumen strategis yang secara sengaja dibentuk, dimasuki, atau didominasi untuk tujuan memperoleh atau mempertahankan pengaruh. Kedua, teori ini mengasumsikan bahwa perilaku sebuah negara dalam memilih strategi *balancing* sangat dipengaruhi oleh peran atau posisinya dalam tatanan yang sedang bertransisi apakah ia berkepentingan mempertahankan status quo atau menantanginya. Kedua asumsi ini memberikan framework yang tepat untuk membaca persaingan DSR dan DCCP, sebab kedua inisiatif tersebut,

meskipun secara permukaan tampak sebagai proyek teknis pembangunan konektivitas, pada dasarnya adalah instrumen kebijakan luar negeri yang dirancang untuk memperluas atau mempertahankan pengaruh struktural masing-masing negara di kawasan berkembang.

Digital Silk Road adalah Institusi yang Samar namun Aktor yang Nyata

Yang membedakan DSR dari komponen Belt and Road Initiative lainnya adalah karakter kelembagaannya yang blur dan tidak terlalu terpusat pada kebijakan negara secara eksplisit. Harding (2019) mencatat bahwa dorongan Tiongkok ke ranah digital ini justru lebih banyak digerakkan oleh raksasa teknologi nasional seperti Huawei, ZTE, Alibaba, dan Tencent, yang mampu menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga rendah, sebagian karena dukungan pemerintah. Dalam bahasa *institutional balancing*, inilah bentuk *exclusive balancing* yang dijalankan bukan melalui institusi antarnegara formal, melainkan melalui ekosistem korporasi nasional yang secara *de facto* menjadi kepanjangan tangan kebijakan negara sebuah varian aktor yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh teori awal He, yang lebih berfokus pada institusi antarnegara seperti APEC atau ASEAN Regional Forum.

Skala keterlibatan aktor-aktor ini di Asia Tenggara sangat signifikan. Patil dan Gupta (2024) mendokumentasikan bahwa Tiongkok telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama digital dengan sekitar 24 negara di kawasan Indo-Pasifik, dengan total investasi hampir 23 miliar dolar AS antara 2017 dan 2022. Di Indonesia sendiri, Industrial and Commercial Bank of Tiongkok memberikan pinjaman senilai 177 juta dolar AS untuk

proyek Palapa Ring Middle, sementara HMN Technologies dahulu Huawei Marine turut membangun sejumlah kabel bawah laut domestik yang menghubungkan pulau-pulau di Nusantara. Ini menegaskan bahwa institusi bukan hanya berwujud lembaga formal, tetapi juga jejaring korporasi-negara yang bekerja melalui logika komersial namun membawa implikasi geostrategis.

Dimensi kedua dari DSR adalah pembentukan norma dan standar teknis yang secara implisit merupakan bentuk *institutional balancing* di ranah pengetahuan, yaitu *knowledge structure*. Mochinaga (2021) menjelaskan bahwa Tiongkok memanfaatkan ekspansi kabel serat optik dan pusat data untuk memperdalam keterikatan ekonomi digital Asia Tenggara pada platform-platform Tiongkok, sehingga negara-negara di kawasan berisiko terkunci pada infrastruktur dan platform yang didukung DSR. Upaya menstandarisasi arsitektur teknis global melalui inisiatif semacam Tiongkok Standards 2035 dapat dibaca sebagai *exclusive institutional balancing* generasi baru, bukan mengecualikan negara pesaing dari institusi antarnegara, melainkan membangun rezim standar teknis alternatif, yang jika berhasil mendominasi, akan memaksa negara maupun perusahaan lain termasuk dari Amerika Serikat untuk tunduk pada aturan main yang dibuat Beijing.

Digital Connectivity and Cybersecurity Partnership Balancing melalui Koalisi

Sebagai *order defender* dalam tatanan digital global yang sebelumnya didominasi perusahaan dan standar Barat, Amerika Serikat merespons ekspansi DSR melalui DCCP, yang diluncurkan tahun 2018 sebagai inisiatif *whole of government*

untuk mempromosikan internet yang terbuka, mudah dioperasikan, dan aman (Chaisse et al., 2025). Berbeda dari DSR yang digerakkan aktor korporasi dengan dukungan negara yang relatif tersembunyi, DCCP justru eksplisit sebagai instrumen kebijakan luar negeri resmi yang dikoordinasikan lintas lembaga USAID, Departemen Luar Negeri, Departemen Perdagangan, dan Department of Homeland Security dengan tujuan yang dinyatakan secara terbuka mendorong kompetisi yang adil, investasi yang dipimpin sektor swasta, dan tata kelola internet multi-pemangku kepentingan.

Pola ini konsisten dengan prediksi teori *institutional balancing* bahwa *order defender* lebih cenderung menjalankan *exclusive balancing* melalui pembentukan koalisi negara-negara sepaham (*like-minded coalition*) ketimbang melakukan inklusi terhadap pesaingnya. DCCP tidak dirancang untuk melibatkan Tiongkok, melainkan untuk membangun jejaring mitra alternatif di kawasan berkembang sejalan dengan inisiatif lain seperti Quad dan Partnership for Global Infrastructure and Investment yang juga eksklusif sifatnya. Namun demikian, dibandingkan dengan skala investasi DSR yang mencapai puluhan miliar dolar, sumber daya DCCP relatif terbatas, dengan alokasi tahunan untuk kegiatan siber berkisar puluhan juta dolar AS, sebuah ketimpangan sumber daya yang menjadi keterbatasan signifikan dalam efektivitas *exclusive balancing* yang dijalankan Washington.

Ketimpangan ini juga mencerminkan perbedaan mendasar dalam susunan kelembagaan pada kedua strategi tersebut. DSR beroperasi melalui logika pasar yang digerakkan oleh insentif komersial perusahaan swasta dan negara, sehingga dapat

bergerak cepat dan menjangkau banyak negara sekaligus tanpa harus menunggu persetujuan legislatif yang panjang. DCCP, sebaliknya, beroperasi melalui birokrasi bantuan pembangunan konvensional yang terikat pada siklus anggaran tahunan Kongres serta prosedur akuntabilitas yang ketat, sehingga meskipun secara normatif menawarkan tata kelola yang lebih terbuka, kecepatan dan skala implementasinya kalah jauh dibandingkan dengan mitra Tiongkoknya. Perbedaan tempo institusional inilah yang membuat negara-negara Asia Tenggara kerap kali memilih infrastruktur Tiongkok bukan karena preferensi ideologis, melainkan karena pertimbangan pragmatis kecepatan pembangunan dan biaya.

Kekuatan dan Keterbatasan Teori dalam Kasus Ini

Jika dibaca melalui lensa institutional balancing, persaingan DSR-DCCP menunjukkan pola yang sangat sesuai dengan tipologi peran negara yang diajukan He (2008b) Tiongkok sebagai *order challenger* memadukan *inclusive balancing* nota kesepahaman bilateral dengan puluhan negara, keterlibatan dalam forum-forum ASEAN dengan *exclusive balancing* yaitu pembangunan standar dan infrastruktur alternatif, sementara Amerika Serikat sebagai *order defender* memilih *exclusive balancing* melalui koalisi eksklusif. Pola ini juga konsisten dengan argumen He dan Feng (He & Feng, 2025) bahwa kompetisi kelembagaan semacam ini tidak serta-merta destruktif sebaliknya, ia mendorong dinamisme institusional yang pada akhirnya menguntungkan pihak ketiga.

Bukti paling jelas dari eksternalitas positif ini adalah respons ASEAN sendiri. Alih-alih terjebak sebagai medan pasif pertarungan dua kekuatan besar, ASEAN tengah menyusun

Digital Economy Framework Agreement DEFA, sebuah kerangka hukum mengikat yang secara eksplisit dirancang untuk mengatasi ketidakjelasan tata kelola data dan keamanan siber yang selama ini dieksploitasi oleh ekspansi DSR maupun ditinggalkan longgar oleh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Dalam tipologi He, ASEAN dapat dipahami memainkan peran sebagai *kingmaker* atau *second-tier state yang proaktif, alih-alih memihak pada* salah satu kekuatan besar, memilih strategi *inter-institutional balancing* dengan membangun institusinya sendiri untuk menyeimbangkan pengaruh kedua kekuatan besar tersebut sekaligus memperkuat kedaulatan digital kawasan.

Meski demikian, penerapan *institutional balancing* pada kasus ini juga memperlihatkan keterbatasan teoretis yang perlu dicatat. Pertama, teori ini pada mulanya dirumuskan untuk menjelaskan balancing keamanan antarnegara melalui institusi multilateral formal seperti APEC atau ASEAN Regional Forum, sehingga kurang memiliki basis konseptual yang jelas untuk menjelaskan peran aktor korporasi-negara hibrida seperti Huawei atau HMN Technologies, yang beroperasi dengan logika komersial namun membawa fungsi kebijakan luar negeri. Kedua, asimetri sumber daya antara DSR yang didukung puluhan miliar dolar investasi negara dan swasta versus DCCP yang jauh lebih terbatas anggarannya menunjukkan bahwa *institutional balancing* tidak selalu simetris dalam praktiknya sebuah negara dapat memilih strategi *balancing* yang tepat secara teoretis, namun tetap kalah dalam implementasi karena keterbatasan kapasitas fiskal maupun kemauan politik domestik. Ketiga, teori ini cenderung berfokus pada kalkulasi strategis negara-negara besar, sementara

agensi negara penerima seperti Indonesia atau Vietnam yang pada praktiknya membuat pilihan pragmatis berdasarkan biaya, risiko keamanan, dan kebutuhan konektivitas domestik kurang mendapat tempat sentral dalam kerangka analisis ini.

Aspek temporalitas dalam *institutional balancing* juga perlu untuk dilihat: *exclusive* balancing yang dijalankan oleh Tiongkok melalui DSR sehingga unggul dalam kecepatan jangka pendek karena tidak terikat prosedur birokrasi yang panjang. Namun, keunggulan ini berpotensi menjadi bumerang dalam jangka panjang jika negara penerima mulai mempertanyakan ketergantungan teknis dan finansial yang menyertainya. Sebaliknya, *exclusive balancing* Amerika Serikat melalui DCCP lebih lambat dan terbatas secara sumber daya. Sehingga, potensi berkelanjutannya lebih besar akrean dibangun atas kerangka regulasi dan akuntabilitas yang jelas. Sehingga, keunggulan *institutional balancing* pada satu pihak tidak selalu menjamin keunggulan yang sama untuk jangka panjang.

Kesimpulan

Kasus persaingan Digital Silk Road dan Digital Connectivity and Cybersecurity Partnership di Asia Tenggara menunjukkan bahwa teori *institutional balancing* tetap relevan untuk membaca kompetisi kelembagaan kontemporer antara Amerika Serikat dan Tiongkok, sekaligus perlu direvisi untuk mengakomodasi aktor-aktor non-negara dan hibrida yang semakin dominan di era digital. Pelajaran utama yang dapat ditarik adalah bahwa kompetisi kelembagaan besar tidak selalu berujung pada konflik *zero-sum* ia juga dapat memicu konsolidasi institusional oleh pihak ketiga, sebagaimana

ditunjukkan oleh inisiatif ASEAN untuk membangun DEFA sebagai respons atas fragmentasi tata kelola digital regional. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, pelajaran praktisnya adalah pentingnya membangun kapasitas kelembagaan sendiri secara proaktif alih-alih hanya menjadi objek pasif pertarungan dua kekuatan besar, agar konektivitas digital yang diperoleh tidak berbanding lurus dengan hilangnya kendali atas kedaulatan data dan arah kebijakan teknologi nasional.

Kasus DSR dengan DCCP ini menjelaskan bahwa dalam persaingan pembangunan antar dua kekuatan besar, negara dan institusi regional yang paling diuntungkan bukanlah yang pasif memilih salah satu pihak, melainkan yang mampu memanfaatkan kompetisi tersebut sebagai *leverage* untuk memperkuat posisi tawarnya sendiri. ASEAN, melalui DEFA, dan Indonesia, melakukan kombinasi penerimaan investasi digital Tiongkok dengan menguatkan regulasi domestik, ini menunjukkan bahwa *institutional balancing* yang dijalankan oleh aktor besar justru bisa menjadi ruang untuk negara berkembang untuk mendapatkan konektivitas sekaligus kendali, asalkan kapasitas kelembagaan domestik dibangun secara sengaja dan tidak dibiarkan tertinggal di belakang laju investasi asing.

Daftar Pustaka

ASEAN. (2023). Digital Economy Framework Agreement (DEFA): ASEAN to leap forward its digital economy and unlock US\$2 Tn by 2030. <https://asean.org/asean-defa-study-projects-digital-economy-leap-to-us2tn-by-2030/>

- Chaisse, J., Dimitropoulos, G., & Mosquera, I. J. (2025). 'Advancing Digital Integration in the Indo-Pacific-Legal Strategies for a Cohesive Digital Economy. Global Value Chains of Digital Economy in the Indo-Pacific: Challenges and Opportunities., 2, 1–20.
- Harding, B. (2019). China's Digital Silk Road and Southeast Asia. CSIS. <https://www.csis.org/analysis/chinas-digital-silk-road-and-southeast-asia>
- He, K. (2008a). Institutional Balancing and International Relations Theory: Economic Interdependence and Balance of Power Strategies in Southeast Asia. *European Journal of International Relations*, 14, 489–518. <https://doi.org/10.1177/1354066108092310>
- He, K. (2008b). Institutional Balancing in the Asia Pacific. *Institutional Balancing in the Asia Pacific*. <https://doi.org/10.4324/9780203886618>
- He, K., & Feng, H. (2025). The positive externalities of US–China institutional balancing in the Indo-Pacific. *International Affairs*, 101(1), 35–52. <https://doi.org/10.1093/ia/iiae272>
- Mochinaga, D. (2021). The Digital Silk Road and China's Technology Influence in Southeast Asia. *Asia Unbound*. <https://www.cfr.org/articles/digital-silk-road-and-chinas-technology-influence-southeast-asia>
- Patil, S., & Gupta, P. (2024). The Digital Silk Road in the Indo-Pacific: Mapping China's Vision for Global Tech Expansion. Observer Research Foundation. <https://doi.org/10.18043/ncm.81.2.137>

Kontestasi Pembiayaan Pembangunan Amerika Serikat dan Tiongkok di Indonesia: Analisis Economic Statecraft pada Proyek Kereta Cepat Whoosh dan MCC Compact

Radhwa Ananda

Pendahuluan

Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok saat ini, tidak lagi hanya berlangsung di bidang militer dan keamanan. Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan tersebut semakin bergeser ke bidang ekonomi melalui perdagangan, investasi, bantuan luar negeri, dan pembiayaan pembangunan. Perubahan ini menunjukkan bahwa instrumen ekonomi telah menjadi sarana penting untuk memperluas pengaruh politik dan mempertahankan kepentingan strategis suatu negara. Melalui pembiayaan pembangunan, negara tidak hanya menyediakan sumber pendanaan, tetapi juga membangun hubungan ekonomi, memengaruhi arah pembangunan, serta membentuk tata kelola di negara penerima (Poon et al., 2024).

Indonesia menjadi salah satu negara yang berada di tengah dinamika tersebut. Posisi geografis yang strategis, kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang besar, dan kebijakan luar negeri bebas aktif menjadikan Indonesia sebagai mitra penting bagi Amerika Serikat maupun Tiongkok. Kedua negara menawarkan model pembiayaan yang berbeda untuk memperkuat pengaruhnya. Tiongkok mengembangkan kerja sama melalui *Belt and Road Initiative (BRI)* yang berfokus pada pembiayaan infrastruktur berbasis pinjaman. Pada sisi yang lain Amerika

Serikat menawarkan pembiayaan berbentuk hibah melalui Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact yang lebih menekankan pada reformasi tata kelola, penguatan institusi, dan peningkatan kapasitas ekonomi (Adhikari & Acharya, 2026).

Perbedaan pendekatan tersebut terlihat pada proyek yang dijalankan di Indonesia. Tiongkok mendukung pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) melalui skema pembiayaan yang melibatkan pinjaman dan perusahaan milik negara. Proyek ini dipandang sebagai salah satu contoh praktik *Chinese state capitalism* yang memadukan kepentingan ekonomi dan strategi geopolitik dalam pembiayaan infrastruktur (Raharja & Sthefanny, 2026). Amerika Serikat memilih pendekatan yang berbeda melalui *Indonesia Infrastructure and Finance Compact* senilai USD 649 juta yang dikelola MCC. Program ini berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur transportasi dan logistik, perluasan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penguatan sistem intermediasi keuangan melalui mekanisme hibah (Millennium Challenge Corporation, 2024). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua negara menggunakan instrumen pembiayaan yang berbeda untuk mencapai tujuan strategisnya di Indonesia.

Data terbaru semakin memperlihatkan perbedaan karakter kedua model pembiayaan tersebut. Tiongkok merupakan penyedia pembiayaan pembangunan bilateral terbesar bagi Indonesia sepanjang periode 2000-2023 dengan sekitar 90 persen portofolionya berbentuk pinjaman (Custer et al., 2025). Pembiayaan tersebut terkonsentrasi pada sektor energi, transportasi, industri, dan mineral strategis. Sebaliknya, MCC

Compact dirancang untuk mengatasi hambatan struktural pembangunan melalui hibah yang diarahkan pada peningkatan kualitas institusi, pembiayaan infrastruktur, dan penguatan sektor keuangan (Millennium Challenge Corporation, 2024). Kondisi ini memperlihatkan adanya dua pendekatan yang berbeda. Tiongkok lebih memfokuskan pada pembangunan aset fisik melalui pinjaman, sedangkan Amerika Serikat menekankan penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan melalui hibah.

Bab ini menggunakan perspektif *Economic Statecraft* yang dikembangkan oleh Blackwill dan Harris (2016). Perspektif ini memandang bahwa instrumen ekonomi dapat digunakan sebagai bagian dari strategi negara untuk mencapai tujuan politik dan kepentingan nasional. Melalui kerangka tersebut, pinjaman dan hibah tidak hanya dipahami sebagai bentuk kerja sama pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu membentuk preferensi kebijakan, memperluas pengaruh, dan memperkuat posisi strategis suatu negara di tingkat internasional. Pendekatan ini dinilai relevan untuk menjelaskan mengapa Amerika Serikat dan Tiongkok memilih instrumen pembiayaan yang berbeda dalam menjalin hubungan dengan Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Amerika Serikat dan Tiongkok menggunakan dua model pembiayaan pembangunan yang berbeda melalui proyek Kereta Cepat Whoosh dan MCC Compact sebagai instrumen *economic statecraft* di Indonesia?”. Tulisan ini berargumen bahwa pinjaman dan hibah bukan sekadar instrumen pembangunan, tetapi juga merupakan

instrumen politik luar negeri yang digunakan untuk memperluas pengaruh strategis. Tiongkok memanfaatkan pembiayaan berbasis pinjaman untuk memperkuat konektivitas ekonomi dan posisi geo-ekonominya, sedangkan Amerika Serikat menggunakan hibah untuk mendorong reformasi tata kelola dan memperkuat kapasitas institusi. Melalui perbandingan kedua studi kasus tersebut, tulisan ini bertujuan menjelaskan bagaimana pembiayaan pembangunan menjadi bagian dari kontestasi pengaruh Amerika Serikat dan Tiongkok di Indonesia.

Diplomasi Pinjaman Tiongkok melalui Proyek Kereta Cepat Whoosh

Whoosh dibiayai melalui skema *business-to-business* dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan milik negara Tiongkok. Sebagian besar pendanaan berasal dari pinjaman *China Development Bank (CDB)*, sedangkan sisanya berasal dari penyertaan modal kedua konsorsium. Meskipun secara formal proyek ini bukan pinjaman pemerintah, keterlibatan BUMN dan bank kebijakan Tiongkok menunjukkan bahwa proyek tersebut tetap mendapat dukungan kuat dari negara sehingga tidak sepenuhnya bersifat komersial (KCIC, n.d.). Dominasi badan usaha milik negara dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa proyek ini tetap memperoleh dukungan politik dan ekonomi dari masing-masing pemerintah sehingga tidak sepenuhnya bersifat komersial. Model pembiayaan tersebut mencerminkan karakteristik *Chinese state capitalism*, yaitu keterlibatan aktif negara melalui bank kebijakan dan perusahaan milik negara dalam mendukung proyek strategis di

luar negeri. Dengan menyediakan pembiayaan, teknologi, dan pelaksana proyek secara bersamaan, Tiongkok tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi jangka panjang dengan negara mitra. (Raharja & Sthefanny, 2026).

Mekanisme pinjaman Whoosh menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan pinjaman pemerintah. Dana proyek disalurkan kepada perusahaan patungan sebagai *project financing*, sehingga secara hukum kewajiban pembayaran berada pada badan usaha, bukan pemerintah Indonesia. Karena mayoritas pemegang saham Indonesia merupakan BUMN, risiko ekonomi yang muncul tetap berpotensi mempengaruhi sektor publik. Kondisi tersebut semakin terlihat ketika proyek mengalami pembengkakan biaya. Nilai proyek yang semula diperkirakan sekitar 6,07 miliar dolar AS meningkat sekitar 23 persen, sehingga membutuhkan tambahan pembiayaan sekitar 1,2 miliar dolar AS. Faktor penyebabnya meliputi perubahan desain teknis, kendala pembebasan lahan, pandemi COVID-19, serta meningkatnya harga material konstruksi (Salim et al., 2024). Penyelesaian atas kenaikan biaya dilakukan melalui negosiasi tambahan pinjaman dari Tiongkok Development Bank dan penambahan modal dari para pemegang saham (Ayuningrum, 2025). Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa proyek infrastruktur berskala besar selalu melibatkan proses tawar-menawar politik mengenai alokasi risiko, tanggung jawab pembiayaan, dan keberlanjutan proyek.

Negosiasi politik berlangsung pada beberapa tingkatan. Pemerintah Indonesia, pemerintah Tiongkok, konsorsium

KCIC, *China Development Bank*, serta kementerian dan BUMN yang terlibat harus mencapai kesepakatan mengenai tambahan pembiayaan dan mekanisme penyelesaiannya. Pemerintah Indonesia pada awalnya berupaya membatasi tambahan beban yang harus ditanggung pihak Indonesia. Akan tetapi, struktur kepemilikan dan mekanisme pembiayaan membuat Indonesia tetap harus menanggung sebagian biaya tambahan melalui peningkatan penyertaan modal BUMN. Implementasi proyek kereta cepat di Asia Tenggara tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan Tiongkok, tetapi juga sangat bergantung pada dinamika politik domestik negara penerima (Lim et al., 2021). Hal tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan proyek BRI tidak hanya ditentukan oleh kemampuan finansial, tetapi juga oleh proses negosiasi politik yang berlangsung selama implementasi proyek.

Dari perspektif *Economic Statecraft*, Whoosh memperlihatkan bagaimana pembiayaan pembangunan menjadi instrumen untuk memperluas pengaruh ekonomi dan strategis. Melalui pembiayaan dari *China Development Bank*, keterlibatan perusahaan milik negara, serta transfer teknologi kereta cepat, Tiongkok tidak hanya membangun infrastruktur di Indonesia, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai mitra pembangunan utama di kawasan Asia Tenggara. Infrastruktur yang dibangun menjadi simbol kapasitas teknologi dan finansial Tiongkok sekaligus memperkuat citra Belt and Road Initiative sebagai alternatif pembiayaan pembangunan global. Bagi Indonesia, proyek Whoosh memberikan manfaat berupa peningkatan konektivitas, percepatan mobilitas, transfer teknologi, serta modernisasi infrastruktur transportasi nasional. Namun, proyek

ini juga memperlihatkan tantangan yang menyertai pembiayaan berbasis pinjaman, seperti pembengkakan biaya, meningkatnya eksposur risiko BUMN, dan ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap tata kelola proyek, pembagian risiko, dan posisi tawar negara penerima.

Dengan demikian, Whoosh tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proyek transportasi. Proyek ini merupakan representasi dari bagaimana Tiongkok menggunakan pembiayaan pembangunan sebagai instrumen *Economic Statecraft*. Pinjaman, kebijakan bank, perusahaan milik negara, dan kerja sama infrastruktur dipadukan dalam satu strategi yang memungkinkan Tiongkok memperluas pengaruh ekonomi sekaligus memperkuat hubungan politik dengan Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari strategi geoekonomi yang mendukung kepentingan nasional Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

Diplomasi Hibah Amerika Serikat melalui Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact

Millennium Challenge Corporation (MCC) merupakan lembaga bantuan pembangunan yang dibentuk pemerintah Amerika Serikat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di negara mitra melalui pembiayaan berbasis hibah. Berbeda dengan lembaga pemberi pinjaman pembangunan pada umumnya, MCC menempatkan bantuan pembangunan sebagai instrumen yang tidak hanya bertujuan mengurangi kemiskinan, tetapi juga mendorong reformasi tata kelola, peningkatan kapasitas

institusi, dan penguatan iklim investasi (U.S. Embassy in Indonesia, n.d.). Dalam hubungan Amerika Serikat dan Indonesia, peluncuran Indonesia Infrastructure and Finance Compact pada 2024 menunjukkan bahwa kerja sama pembangunan menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara sekaligus meningkatkan keterlibatan Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik.

Compact Indonesia memiliki nilai sekitar USD698 juta, terdiri atas USD649 juta hibah dari pemerintah Amerika Serikat dan USD49 juta kontribusi pemerintah Indonesia. Program ini dilaksanakan selama lima tahun melalui MCA-Indonesia sebagai lembaga pelaksana yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Berbeda dengan pinjaman luar negeri, seluruh dana yang diberikan melalui MCC berbentuk hibah sehingga tidak menimbulkan kewajiban pembayaran kembali bagi pemerintah Indonesia (Millennium Challenge Corporation, 2024). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa instrumen pembiayaan yang digunakan Amerika Serikat lebih menekankan dukungan terhadap pembangunan jangka panjang tanpa meningkatkan beban fiskal negara penerima.

Mekanisme pembiayaan MCC didasarkan pada prinsip *country ownership*, yaitu negara penerima berperan aktif dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan. Meskipun demikian, setiap pendanaan tetap disertai persyaratan mengenai kualitas tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan program. Pendekatan ini berbeda dari bantuan pembangunan yang hanya berorientasi

pada penyaluran dana, karena pencairan hibah MCC dikaitkan dengan kesiapan institusi, kemampuan implementasi, serta pencapaian indikator kinerja yang telah disepakati bersama (U.S. Embassy in Indonesia, n.d.). Keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan negara penerima melakukan reformasi kelembagaan dan meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan.

Compact Indonesia berfokus pada tiga bidang utama. Pertama, ATLAS Project bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan infrastruktur transportasi dan logistik di sejumlah provinsi prioritas. Kedua, Financial Market Development Project diarahkan untuk memperkuat pasar pembiayaan proyek dan mendorong keterlibatan investasi swasta melalui skema *blended finance*. Ketiga, Women-Owned and MSME Finance Project bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, terutama usaha milik perempuan, melalui penguatan sistem pembiayaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha. Ketiga program tersebut dilaksanakan di lima provinsi yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Bali (MCC, 2024).

Dalam perspektif *Economic Statecraft*, bantuan pembangunan melalui MCC merupakan instrumen ekonomi yang digunakan Amerika Serikat untuk memperkuat pengaruhnya di Indonesia. Blackwill dan Harris (2016) menjelaskan bahwa negara dapat menggunakan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan politik

dan strategis. Melalui skema hibah, Amerika Serikat tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi Indonesia, tetapi juga mendorong penerapan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pasar. Dengan kata lain, bantuan pembangunan menjadi sarana untuk membangun hubungan ekonomi sekaligus memperkuat nilai dan standar yang diusung Amerika Serikat. Keberadaan Compact MCC memberikan sejumlah manfaat strategis bagi Indonesia. Skema hibah memungkinkan pemerintah memperoleh tambahan pembiayaan tanpa meningkatkan rasio utang luar negeri. Program-program yang dijalankan juga berpotensi memperbaiki kualitas tata kelola pembangunan, memperkuat pasar pembiayaan domestik, serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Manfaat yang didapatkan tidak hanya berupa penyediaan dana pembangunan, tetapi juga peningkatan kapasitas institusi yang dapat mendukung pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Perbandingan Model Pembiayaan Tiongkok dan Amerika Serikat dalam Perspektif *Economic Statecraft*

Blackwill dan Harris (2016) menjelaskan bahwa economic statecraft merupakan penggunaan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan politik dan strategis suatu negara. Pendekatan ini terlihat dari perbedaan strategi Tiongkok melalui proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dan Amerika Serikat melalui program Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact di Indonesia. Meskipun sama-sama menggunakan instrumen ekonomi, keduanya menerapkan pendekatan yang berbeda dalam membangun pengaruh terhadap Indonesia.

Tiongkok mengandalkan pembiayaan berbasis pinjaman untuk mendukung pembangunan infrastruktur berskala besar melalui *Belt and Road Initiative* (BRI). Whoosh menjadi contoh bagaimana pinjaman dari *China Development Bank* dipadukan dengan keterlibatan perusahaan milik negara Tiongkok dalam pembangunan proyek strategis. Melalui mekanisme tersebut, Tiongkok tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi, memperluas penggunaan teknologi Tiongkok, serta meningkatkan posisi strategisnya di Indonesia. Pembangunan infrastruktur menjadi sarana untuk memperkuat pengaruh ekonomi dan politik secara jangka panjang. Sebaliknya, Amerika Serikat menggunakan pendekatan yang berbeda melalui MCC Compact. Bantuan diberikan dalam bentuk hibah sehingga tidak menambah beban utang Indonesia. Pendanaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan, memperkuat pasar keuangan, memperbaiki perencanaan infrastruktur, serta memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Melalui pendekatan ini, Amerika Serikat berupaya membangun pengaruh melalui penguatan institusi dan peningkatan kapasitas pembangunan, bukan melalui kepemilikan aset infrastruktur.

Perbedaan kedua model juga terlihat dari prinsip tata kelolanya. Pembiayaan BRI lebih berorientasi pada penyelesaian proyek fisik melalui kerja sama antarpemerintah, perusahaan milik negara, dan bank kebijakan Tiongkok. Sebaliknya, MCC menerapkan prinsip *country ownership* yang disertai persyaratan mengenai transparansi, akuntabilitas, serta pencapaian target pembangunan. Pendanaan hibah hanya diberikan kepada negara yang memenuhi standar tata kelola yang telah ditetapkan,

sehingga reformasi kelembagaan menjadi bagian dari proses implementasi program. Dari perspektif *economic statecraft*, kedua negara memanfaatkan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan strategis yang berbeda. Tiongkok menggunakan investasi infrastruktur sebagai sarana memperkuat konektivitas sekaligus memperluas pengaruh ekonomi di kawasan. Amerika Serikat memanfaatkan bantuan pembangunan untuk memperkuat tata kelola, menciptakan lingkungan investasi yang lebih baik, serta mempertahankan pengaruhnya melalui pembangunan institusi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa instrumen ekonomi tidak hanya digunakan untuk mendukung pembangunan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi politik luar negeri.

Bagi Indonesia, kedua model menawarkan manfaat sekaligus konsekuensi yang berbeda. Pembiayaan Tiongkok mampu mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, tetapi membawa risiko pembengkakan biaya, ketergantungan pembiayaan, dan negosiasi ulang ketika terjadi perubahan biaya proyek. Sebaliknya, model hibah MCC tidak menambah beban utang dan memperkuat kapasitas kelembagaan, meskipun dampaknya lebih bersifat jangka panjang dan tidak menghasilkan proyek fisik berskala besar dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjaga keseimbangan dalam memanfaatkan kedua bentuk kerja sama agar pembangunan nasional tetap berjalan tanpa mengurangi ruang gerak dalam menentukan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri.

Kesimpulan

Persaingan ekonomi antara Tiongkok dan Amerika Serikat di Indonesia menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan telah menjadi instrumen penting dalam economic statecraft. Tiongkok memanfaatkan skema pinjaman melalui Belt and Road Initiative (BRI) untuk membangun proyek infrastruktur strategis seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh), sehingga memperkuat konektivitas sekaligus memperluas pengaruh ekonomi dan politiknya. Sebaliknya, Amerika Serikat menggunakan pendekatan berbasis hibah melalui Millennium Challenge Corporation (MCC) yang berfokus pada penguatan tata kelola, pengembangan pasar keuangan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta perluasan akses pembiayaan bagi UMKM tanpa menambah beban utang Indonesia.

Bagi Indonesia, kedua model pembiayaan tersebut menghadirkan manfaat sekaligus konsekuensi yang berbeda. Pembiayaan Tiongkok menawarkan pembangunan infrastruktur dalam skala besar dengan implementasi yang relatif cepat, tetapi disertai risiko pembengkakan biaya dan ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal. Di sisi lain, hibah MCC memberikan dukungan terhadap reformasi kelembagaan dan pembangunan jangka panjang dengan risiko fiskal yang lebih rendah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia perlu menjaga keseimbangan dalam memanfaatkan kedua bentuk kerja sama agar pembangunan nasional dapat berlangsung tanpa mengurangi kemandirian ekonomi maupun ruang gerak kebijakan luar negerinya.

Daftar Pustaka

- Adhikari, M., & Acharya, A. (2025). Navigating Infrastructural Rivalries in Global Politics: The MCC, the BRI, and Nepal's Domestic Agency. *Asian Studies Review*, 1-22.
- Ayuningrum, R. (2025, Oktober 27). Awal mula proyek kereta cepat Whoosh yang kini diselidiki KPK. *detikFinance*. <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-8181244/awal-mula-proyek-kereta-cepat-whoosh-yang-kini-diselidiki-kpk>
- Blackwill, R. D., & Harris, J. M. (2016). *War by other means: Geoeconomics and statecraft*. Harvard University Press.
- Custer, S., Burgess, B., Kim, H. K., Krisnadi, M. F., Marshall, K., Mathew, D., Patrick, F., Saputra, A. D., Solis, J. A., & Sritharan, N. (2025). Balancing risk and reward: Who benefits from China's investments in Indonesia?. *AidData* at William & Mary. <https://www.aiddata.org/publications/balancing-risk-and-reward>
- KCIC. (n.d.). Profil perusahaan. KCIC. Diakses 22 Juli 2026, dari <https://kcic.co.id/tentang-kami/profil/>
- Lim, G., Li, C., & Syailendra, E. A. (2021). Why is it so hard to push Chinese railway projects in Southeast Asia? The role of domestic politics in Malaysia and Indonesia. *World Development*, 138, 105272.
- Millennium Challenge Corporation. (2024, September 6). MCC, Government of Indonesia Launch \$649 Million Infrastructure and Finance Compact. MCC. <https://www.mcc.gov/news-and-events/release/release-090624-indonesia-compact-launch/>

- Poon, J. P., Peng, P., Qian, X., & Yang, Y. (2024). End of the Asia-Pacific: Geoeconomics, belt and road and the Indo-Pacific. *Political Geography*, 108, 103026.
- Raharja, D. P., & Sthefanny. (2026). Jakarta-Bandung High-Speed Rail Project: Recognizing Chinese State Capitalism at Play.
- Salim, I. P., Simanjuntak, M. R. A., & Oei, F. J. (2025). Model of cost management for the Jakarta–Bandung high-speed railway project. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Management, Procurement and Law*, 178(4), 199-220.
- U.S. Embassy in Indonesia. (n.d.). MCC Board approves monumental development grant for Indonesia. U.S. Embassy in Indonesia. <https://id.usembassy.gov/mcc-board-approves-monumental-development-grant-for-indonesia/>

Infrastruktur dan Konektivitas sebagai Strategi Pembangunan: Bagaimana Negara-Negara Asia Tenggara Melakukan Mitigasi Risiko dalam Persaingan Kabel Bawah Laut AS-Tiongkok

Nur Yaqin Zaheen Binti Mohd Razali

Pendahuluan

Lebih dari 95% pertukaran data internasional menggantungkan diri pada jaringan kabel bawah laut yang jadi tulang punggung konektivitas digital, kemudian mendukung transaksi perekonomian, pelayanan keuangan, komunikasi, hiburan, sampai ke banyak kegiatan masyarakat di seluruh dunia. (Cha, 2025). Panjang jaringan kabel bawah laut sudah melampaui 1,4 juta kilometer membuatnya jadi infrastruktur digital yang menopang konektivitas global walau posisinya jarang disadari publik, kemudian kapasitas satelit masih jauh ada di bawah kecakapan transmisi jaringannya, di lain sisinya ada transaksi keuangan senilai sekitar US\$10 triliun terus mengalir tiap harinya yang menjadikan adanya gangguan pada kabel bawah laut bisa memicu konsekuensi ekonomi yang luas. (Bloomberg Graphics, 2025).

Persaingan diantara AS dan Tiongkok mampu mentransformasi kabel bawah laut dari sekadar infrastruktur telekomunikasi jadi aset strategis yang diperebutkan dikarenakan menentukan arus data internasional juga memberi efek luas kepada pengendalian informasi di tingkat global. (Cha, 2025) Perselisihan di proyek SeaMeWe-6 memberi sebuah gambaran akan persaingan perebutan kendali infrastruktur digital dunia dikala tekanan diplomatik AD mendorong pindahnya kontrak dari HMN

Technologies asal Tiongkok ke SubCom dari AS. AS menerapkan strategi regulasi seperti program *Clean Network* untuk membatasi keterlibatan Tiongkok, sementara Tiongkok memperluas pengaruhnya melalui *Digital Silk Road* (DSR) lewat perusahaan kabel yang didukung pemerintah serta skema pendanaan yang kompetitif. (Chow M. , 2026). Persaingan strateginya itu memberi potensi adanya fragmentasi internet mengikuti garis pemisah geopolitik, kemudian pada kawasan Asia Tenggara memperoleh efek yang besar dikarenakan posisinya ada di jalur utama pembangunan dan pengoperasian jaringan kabel bawah laut

Wilayah ini merupakan titik penting dalam infrastruktur kabel bawah laut global, dengan Singapura berperan sebagai pusat bagi 26 kabel serta 13 kabel tambahan yang sedang dalam berbagai tahap pembangunan. (Chow M. , 2026). Menjelang tahun 2025, diperkirakan sekitar 10 proyek kabel utama di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya akan mulai beroperasi secara resmi (Telecom Review Asia, 2025). Asia Tenggara menikmati peluang besar dari pesatnya perkembangan ekonomi digital, tapi di saat bersamaan ada dalam posisi rawan sebab jadi wilayah strategis yang diperebutkan di tengah rivalitas negara berkekuatan besar. Tapi sistem kabel bawah laut yang melintasi Selat Malaka termasuk Batam-Dumai-Malacca (BDM), Asia Pacific Gateway (APG), dan SMW-5 rentan terhadap kerusakan akibat tindakan sengaja maupun gangguan, sehingga menjadikannya titik rawan potensial pada masa-masa pergolakan. (Chow M. , 2026). Makalah ini berargumen bahwa negara-negara Asia Tenggara tidak lagi sekadar menjadi aktor pasif dalam persaingan ini. Negara-negara demikian

menjalankan sebuah strategi *hedging* dengan menjaga fleksibilitas kebijakan luar negerinya supaya selalu mandiri sambil memaksimalkan peluang yang muncul dari persaingan antarkekuatan besar tanpa harus memihak penuh.

Persaingan dari AS dan Tiongkok dimaksimalkan celahnya oleh negara Asia Tenggara untuk meluaskan pilihan mitra penyedia infrastruktur, kemudian menguatkan kapasitas institusi di tingkat domestik, sampai memanfaatkan kerja sama ASEAN supaya bisa menyingkat agenda transformasi digital. Bahasan pada bagian ini lebih mengarah pada strategi yang dijalankan oleh Singapura, Vietnam sampai Indonesia dalam memberi tanggapan akan dinamika pembangunan kabel bawah laut, lalu menelaah posisi ASEAN menjadi wadah dari koordinasi bagi pelaksanaan berbagai agenda digital di kawasan (Chow M. , 2026).

Strategic Hedging dalam Infrastruktur Digital di Asia Tenggara

Meskipun persaingan AS-Tiongkok mendominasi diskusi akademis dan kebijakan, realitas yang lebih multidimensi dan multipolar muncul saat dicermati lebih jauh. Berdasarkan Peta Kabel Bawah Laut TeleGeography, Jepang melalui NEC dan Fujitsu menguasai 41% infrastruktur kabel bawah laut di Asia Tenggara, melampaui AS (20%) dan Tiongkok (19%). Selain itu, Prancis berkontribusi sekitar 18% dan Jerman mencakup 2%. Keberagaman pemasok ini menantang narasi konflik AS-Tiongkok serta memungkinkan negara-negara Asia Tenggara untuk menerapkan strategi hedging (mitigasi risiko). (Cha, 2025).

Sektor kabel bawah laut terutama dikuasai oleh empat perusahaan: (1) SubCom (Amerika Serikat), (2) NEC dan Fujitsu (Jepang), dan (3) ASN (Prancis), yang menguasai sekitar 98% pangsa pasar global (Cha, 2025; Gupta, 2025). Di sisi lain, penggabungan berbagai penyedia ini memfasilitasi strategi diversifikasi: negara-negara bisa memilih dari sejumlah pemasok untuk menyeimbangkan aspek biaya, keamanan, dan pertimbangan geopolitik. Kendati demikian, situasi ini sedang berubah dengan cepat. Amerika Serikat dan sekutunya semakin memilih aliansi minilateral eksklusif untuk membendung pengaruh Tiongkok, dengan sengaja menyingkirkan perusahaan-perusahaan Tiongkok melalui paksaan politik dan potensi sanksi. Kondisi yang terpecah ini diperkirakan akan semakin memburuk, sehingga kawasan ini harus mampu menavigasi lanskap kabel bawah laut yang kian terfragmentasi (Cha, 2025). Selama beberapa dekade, sektor kabel bawah laut global sebagian besar dikuasai oleh Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Sebaliknya, dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah muncul sebagai pesaing yang signifikan di bidang ini. Perusahaan-perusahaan Tiongkok menerima bantuan keuangan, pinjaman, dan dukungan pemerintah yang substansial dari otoritas serta lembaga keuangan Tiongkok untuk proyek-proyek infrastruktur internasional di bawah inisiatif Digital Silk Road (DSR).

Pemerintah Tiongkok diyakini telah mengalokasikan dana sebesar US\$70 miliar untuk berbagai inisiatif infrastruktur digital yang mencakup kabel bawah laut, jaringan 5G, dan pusat data di sekitar 80 negara di seluruh dunia. (Cha, 2025). Keunggulan ini terutama bersumber dari kemampuan

perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk terlibat dalam persaingan harga yang sengit, yang memungkinkan mereka memenangkan kontrak di pasar-pasar negara berkembang. Tiongkok juga telah mencapai kemajuan signifikan menuju kemandirian dalam teknologi kabel bawah laut, di mana para produsen di negara tersebut semakin mampu memproduksi seluruh komponen untuk kabel komunikasi bawah laut. Kendati demikian, didorong oleh kekhawatiran akan keamanan nasional khususnya risiko sabotase dan spionase Amerika Serikat telah memberlakukan pembatasan untuk membatasi partisipasi Tiongkok yang kian meluas dalam sistem kabel bawah laut global. Keputusan Amerika Serikat untuk memasukkan perusahaan kabel bawah laut Tiongkok, termasuk HMN Technologies, Huawei, dan Wuhan FiberHome, ke dalam "Daftar Entitas" perdagangan mereka pada tahun 2020 merupakan contoh nyata dari hal ini. Kekhawatiran utamanya adalah bahwa dominasi atau pengaruh Tiongkok atas kabel bawah laut bisa dimanfaatkan untuk kegiatan mata-mata yang membahayakan keamanan informasi rahasia, atau memungkinkan dilakukannya sabotase taktis pada masa konflik.

Berbeda dengan pendekatan Tiongkok yang menekankan inklusivitas dan penciptaan saling ketergantungan, AS mengandalkan strategi eksklusif, sekuritisasi, dan pembentukan aturan. (Chow M. , 2026). Inisiatif "Clean Network" AS bertujuan untuk memastikan bahwa jaringan internasional tetap tepercaya dan bebas dari pengaruh asing yang berbahaya. Melalui badan-badan seperti USTDA, AS mendanai proyek kabel yang dianggap "tepercaya" dan melobi negara-negara seperti Vietnam agar tidak menggunakan perusahaan pemasang

kabel asal Tiongkok (Cha, 2025; Bloomberg Graphics, 2025). Salah satu contoh paling menonjol adalah intervensi AS dalam proyek SeaMeWe-6. Didorong oleh tekanan diplomatik yang dilancarkan oleh duta besar dan diplomat senior Amerika terhadap para eksekutif telekomunikasi asing, ancaman potensi sanksi AS terhadap HMN Technologies yang bisa membuat kabel tersebut "tidak bernilai" serta tawaran hibah pelatihan senilai hampir US\$4 juta, kontrak kabel bawah laut tersebut akhirnya lepas dari genggaman HMN Technologies dan jatuh ke tangan SubCom. (Cha, 2025). Tapi AD menolak untuk menerbitkan izin operasional bagi Pacific Light Cable Network (PLCN) sebuah inisiatif kolaboratif antara Google, Meta, dan China Soft Power yang bertujuan membangun sambungan langsung antara Los Angeles dan Hong Kong.

Meskipun pembangunan kabel telah rampung, pemerintah AS menanggukkan koneksi ke Hong Kong pada tahun 2020 karena kekhawatiran bahwa Tiongkok bisa memantau informasi penting dari pusat-pusat data yang berlokasi di wilayah administratif khusus tersebut. (Nguyen & Vo, 2025). Singapura merupakan contoh nyata model "badan koordinasi", yang menjalankan pengaruhnya melalui keunggulan teknis, regulasi yang efisien, dan posisi sentral dalam jaringan. Singapura jadi satu contoh simpul utama jaringan kabel bawah laut dunia karena telah mempunyai 28 kabel aktif yang terhubung ke berbagai stasiun pendaratan domestik, ditambah sedikitnya 13 proyek baru yang masih dikembangkan, keadaan demikianlah yang membuat lebih dari 99% komunikasi internasional negara itu bergantung pada jaringan kabel bawah laut. Pada 2024 perekonomian digital diperkirakan menyumbang sekitar SGD

113 miliar atau USD 88 miliar setara 17,7% terhadap PDB, nilainya melampaui Malaysia yang sampai di angka USD 60 miliar maupun Thailand kisaran USD 36 miliar (Murphy & Bryja, 2025).

Infocomm Media Development Authority (IMDA) bertindak sebagai satu-satunya penghubung untuk urusan kabel bawah laut, memfasilitasi proses perizinan serta melakukan koordinasi antarberbagai instansi pemerintah. IMDA telah menerbitkan pedoman rinci mengenai pemanfaatan kabel bawah laut dan penanganan insiden yang melibatkannya. (Murphy & Bryja, 2025). Singapura juga memimpin Kelompok Kerja ASEAN mengenai Kabel Bawah Laut dan memelopori pengembangan Pedoman ASEAN yang Disempurnakan untuk Memperkuat Ketahanan dan Perbaikan Kabel Bawah Laut, yang disahkan pada Pertemuan Menteri Digital ASEAN bulan Januari 2026 (Chow M. , 2026). Di tingkat internasional, Singapura telah mendukung Pernyataan Bersama New York mengenai Keamanan dan Ketahanan Kabel Bawah Laut ("Prinsip-Prinsip New York"), yang menegaskan bahwa "melindungi keamanan, ketahanan, dan integritas kabel bawah laut sangatlah penting bagi komunikasi global, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan" (Murphy & Bryja, 2025).

Vietnam merupakan contoh nyata dari agensi adaptif yakni modifikasi praktis kebijakan infrastruktur sebagai respons terhadap perubahan situasi geopolitik. Kapasitas kelembagaan yang terbatas, kondisi perbatasan geografis, dan risiko keamanan yang signifikan (terutama kedekatan dengan Tiongkok dan sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan) turut membentuk strategi negara tersebut (Cha, 2025; Chow M. ,

2026). Insiden tahun 2023, di mana kelima kabel internet bawah laut Vietnam mengalami kerusakan secara bersamaan dan berdampak pada sekitar 75% kapasitas bandwidth-nya, menyoroti kerentanan infrastruktur ini serta perlunya pendekatan yang adaptif. Saat ini, Vietnam berencana membangun setidaknya 10 jalur kabel baru hingga tahun 2030 dan telah meresmikan jalur darat pertamanya yang terhubung ke Singapura melalui Thailand, Malaysia, dan Laos (Chow M. , 2026). Meskipun ada upaya lobi AS untuk menghindari perusahaan pemasang kabel asal Tiongkok, Vietnam tetap mempertahankan pendekatan pragmatis.

Vietnam telah menyetujui pemasangan 10 kabel bawah laut tambahan yang ditargetkan rampung pada tahun 2030 dan secara aktif bekerja sama dengan berbagai penyedia layanan. Strategi pemerintah Vietnam yang komprehensif melibatkan berbagai instansi dalam kegiatan perizinan, pemasangan, pemeliharaan, dan pengamanan kabel bawah laut, termasuk Kementerian Informasi dan Komunikasi (MIC), Kementerian Pertahanan Nasional (MND), dan Kementerian Sumber Daya Alam (MONRE) (Murphy & Bryja, 2025). Indonesia telah menerapkan pendekatan yang berorientasi pada pengendalian, dengan membentuk hasil pembangunan infrastruktur melalui kontrol akses yang ketat dan proses persetujuan yang rumit. Lanskap kelembagaan Indonesia yang terfragmentasi, posisinya di titik-titik strategis (perairan kepulauan dan Laut Tiongkok Selatan), dan tingkat kerentanannya yang moderat turut memfasilitasi pendekatan ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Indonesia menjalankan kedaulatan atas perairan, wilayah laut, dan dasar

laut di bawahnya. Meskipun terdapat 62 kabel bawah laut di Indonesia, sebagian besar di antaranya menghubungkan berbagai wilayah di dalam negeri; Indonesia hanya memiliki empat titik pendaratan internasional, yang membatasi kemampuannya untuk memanfaatkan keuntungan geografisnya secara optimal.

Sebagai institusi regional, ASEAN berperan sebagai "penyangga" yang meredam tekanan dari AS dan Tiongkok terhadap negara-negara anggotanya. Pedoman ASEAN untuk Memperkuat Ketahanan dan Perbaikan Kabel Bawah Laut (2019) serta versi yang disempurnakan (2026) bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, menetapkan satu titik kontak pemerintah, dan meningkatkan koordinasi antara instansi serta operator kabel guna mempercepat waktu perbaikan. (Cha, 2025). ASEAN Digital Masterplan 2025 mendorong keseragaman dalam kegiatan terkait kabel serta penyelarasan regulasi di seluruh kawasan. Kendati demikian, ASEAN menghadapi tantangan dalam menyelaraskan kebijakan dan mendorong keterlibatan, khususnya di kalangan negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan tata kelola dan kapasitas finansial untuk menerapkan kebijakan serta regulasi yang efektif. (Murphy & Bryja, 2025).

Tantangan dan Keterbatasan Strategi Lindung Nilai di Asia Tenggara

Meskipun strategi hedging menawarkan prospek yang cukup besar bagi negara-negara Asia Tenggara, pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. (Lee Kuan Yew, 2025). Setidaknya terdapat empat kendala signifikan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, variasi kapabilitas

kelembagaan antarnegara anggota ASEAN menghambat efektivitas strategi hedging (mitigasi risiko) secara kolaboratif. Negara-negara seperti Singapura menunjukkan kapabilitas kelembagaan yang tangguh melalui badan terpadu (IMDA), sementara Indonesia dan Filipina memperlihatkan kerangka regulasi yang tidak terpadu.

Kedua, "sekuritisasi" kabel bawah laut yang kian meningkat oleh Amerika Serikat dan sekutunya bisa membatasi peluang mitigasi risiko. (Agastia, 2026). Inisiatif "Clean Network" AS dan sanksi yang dijatuhkan terhadap HMN Technologies mencerminkan kesiapan Amerika Serikat untuk memberikan tekanan politik yang signifikan guna meminggirkan Tiongkok. Agastia (2026) menemukan bahwa sikap AS yang semakin bernuansa militer telah memberikan pengaruh diplomatik yang cukup besar, sehingga mendorong negara-negara ASEAN untuk menentukan keberpihakan mereka. Ketiga, ketergantungan yang terus-menerus terhadap teknologi dari negara-negara maju menciptakan kondisi ketergantungan teknis yang sulit diatasi. Sektor kabel bawah laut terutama dikuasai oleh empat perusahaan: SubCom (Amerika Serikat), HMN Technologies (Tiongkok), NEC/Fujitsu (Jepang), dan ASN (Prancis), yang secara kolektif menguasai sekitar 98% pangsa pasar global. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara terus bergantung pada kekuatan dominan untuk memperoleh teknologi vital, yang pada akhirnya membatasi kemandirian sejati mereka seiring berjalannya waktu. (Chow M. , 2026).

Keempat, tidak adanya peraturan perundang-undangan khusus untuk perlindungan kabel bawah laut di sebagian besar negara ASEAN merupakan kelemahan serius. Su (2025) fokus ke

penerapan efektif Pasal 113 UNCLOS, termasuk kriminalisasi terhadap tindakan perusakan kabel bawah laut yang disengaja. Beckman dkk. (2024) menemukan bahwa tidak ada negara anggota ASEAN yang memiliki peraturan perundang-undangan khusus mengenai perlindungan kabel bawah laut. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang bisa dimanfaatkan, sehingga membuat kabel rentan terhadap kerusakan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pendekatan hedging (strategi penyeimbang risiko) di Asia Tenggara bergantung pada kemampuan negara-negara anggota untuk mengatasi berbagai kendala di bidang kelembagaan, teknologi, dan hukum. Malaysia, sebagai Ketua ASEAN untuk tahun 2025, bisa memimpin upaya ini melalui inisiatif peningkatan kapasitas dan forum regional. (Annathurai, 2025).

Kesimpulan

Bagian ini telah menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara bukan sekadar entitas pasif dalam persaingan antara AS dan Tiongkok terkait kabel bawah laut. (Chow M. , 2026). Melalui badan koordinasi di Singapura, badan adaptif di Vietnam, dan badan pengendali di Indonesia, negara-negara ini secara proaktif memengaruhi hasil pembangunan infrastruktur demi menjaga kedaulatan dan memajukan tujuan nasional. Taktik lindung nilai (hedging) yang dijalankan negara Asia Tenggara memperlihatkan dimana persaingan antarnegara kekuatan besar bisa menciptakan ruang fiskal dan memperoleh kondisi yang lebih menguntungkan terkait belanja infrastruktur vital

Sejumlah konsekuensi besar bagi rencana pengembangan digital di Asia Tenggara bisa diidentifikasi. Pertama, keragaman

pemasok yang mencakup Jepang (41%), AS (20%), Tiongkok (19%), dan Prancis (18%) sebagai pemasok utama memperlihatkan bahwa infrastruktur kabel bawah laut di Asia Tenggara bersifat multipolar, bukan biner (Cha, 2025). Hal ini memungkinkan negara-negara Asia Tenggara untuk memilih dari berbagai pemasok guna mengelola biaya, keamanan, dan faktor geopolitik. Kedua, kapabilitas kelembagaan internal merupakan faktor krusial yang memengaruhi kapasitas suatu negara untuk memperoleh manfaat pembangunan dari persaingan geopolitik. Singapura, dengan memanfaatkan IMDA sebagai entitas terpadu, secara efektif memanfaatkan situasi AS-Tiongkok rivalry, while Indonesia, characterised by disjointed institutions, was less adept in this regard (Chow M. , 2026; Murphy & Bryja, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kemajuan infrastruktur digital bergantung pada investasi eksternal serta pada kemampuan institusi lokal untuk "menilai" dan "menyempurnakan" proposal dari pihak asing.

Ketiga, ASEAN berfungsi sebagai wadah terpadu yang krusial dalam meredakan tekanan dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Pedoman ASEAN yang Disempurnakan (Enhanced ASEAN Guidelines) dan ASEAN Digital Masterplan 2025 menunjukkan kapasitas ASEAN dalam menetapkan norma terkait regulasi kabel bawah laut di kawasan (Chow M. , 2026; Murphy & Bryja, 2025). Kendati demikian, persoalan terkait penyelarasan kebijakan dan minimnya regulasi yang spesifik di sebagian besar negara anggota memerlukan perhatian segera. Potensi fragmentasi internet akibat persaingan antara AS dan Tiongkok sangat nyata. Amerika Serikat beserta sekutunya meminggirkan perusahaan-perusahaan Tiongkok melalui paksaan politik dan

sanksi, sementara Tiongkok terus mengembangkan Digital Silk Road (Jalur Sutra Digital), yang berpotensi memicu pembelahan lanskap digital. Negara-negara Asia Tenggara perlu terus menerapkan taktik hedging (penyeimbangan risiko) agar tidak terjebak dalam perpecahan ini (Cha, 2025; Nguyen & Vo, 2025). Akhirnya maka konsep *strategic hedging* pada infrastruktur digital layak dinilai menjadi pilihan pembangunan yang realistis, bukan hanya tanggapan atau respons kepada rivalitas geopolitik saja. Pengalaman dari negara Asia Tenggara yang bisa menjaga keseimbangan hubungan dengan AS dan Tiongkok lewat diversifikasi mitra, kemudian penguatan kapasitas institusi nasional, sampai dengan pemanfaatan kerja sama ASEAN, mempunyai potensi tinggi untuk menjadi rujukan bagi banyak negara berkembang yang mengarungi tekanan serupa karena meningkatnya persaingan antarkekuatan global. (Chow M. , 2026). Masa depan konektivitas digital Asia Tenggara ditentukan dari kecakapan kawasan ini menjaga kemandiriannya dalam menentukan aturan, arah, kemudian kebijakan, memperluas pilihan mitra agar tak menggantungkan diri ke hanya satu pihak, menguatkan kapasitas kelembagaan, sekaligus mengelola persaingan antara AS dan Tiongkok sebagai peluang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital yang menjadi penopang pokok dari kegiatan perekonomian dan komunikasi pada abad ke-21.

Daftar Pustaka

Agastia, I. G. (2026). To Securitize or Not? Comparing Securitization of Undersea Cables in Southeast Asia. Retrieved from Ritsumeikan University, Institute of International Relations and Area Studies:

<https://www.ritsumeai.ac.jp/research/iiras/event/article.html/?id=511>

- Annathurai, R. M. (2025). ASEAN's Digital Future: Strengthening Malaysia's Leadership in Submarine Cable Governance and IMO Advocacy. Retrieved from Maritime Institute of Malaysia: <https://www.mima.gov.my/aseans-digital-future-strengthening-malaysias-leadership-in-submarine-cable-governance-and-imo-advocacy/>
- Beckman, R., Bressie, K., & Ong, J. (2024). Law of The Sea And Submarine Cables. Centre of International Law. Singapore: ICPC. Retrieved from <https://iscpc.org/documents/?id=4224>
- Bloomberg Graphics. (2025). US vs. China Undersea Internet Cables. Retrieved from Bloomberg: <https://www.bloomberg.com/graphics/2025-us-vs-china-undersea-internet-cables/?srnd=phx-latinamerica>
- Cha, H. W. (2025). The Struggle for Subsea Cable Supremacy in Southeast Asia: ASEAN Relying on Diverse Suppliers. ISEAS Perspective, 21(2025), 1-23. Retrieved from <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2025-21-the-struggle-for-subsea-cable-supremacy-in-southeast-asia-asean-relying-on-diverse-suppliers-by-cha-hae-won/?utm>
- Chow, M. (2026). Competing for Control: US and China's Infrastructural Power in Southeast Asia's Undersea Cable Infrastructure. IAFOR American Conference Series. Washington: IAFOR (The International Academic Forum). Retrieved from <https://wcsc.iafor.org/presentation/submission105030/>

- Chow, M. (2026). Undersea Cable Risks: Lessons for Southeast Asia. Retrieved from Fulcrum: <https://fulcrum.sg/undersea-cable-risks-in-hormuz-lessons-for-southeast-asia/#content>
- Gupta, A. (2025). The Undersea Kingdom: Submarine Cables and the Practice of Geopolitics. Retrieved from Indian Council of World Affairs: https://icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=13762&lid=8368
- Lee Kuan Yew. (2025). Infrastructural Agency: How Southeast Asian States Navigate the US-China Submarine Cable Competition. Retrieved from Lee Kuan Yew School of Public Policy: <https://lkyspp.nus.edu.sg/news-events/events/details/infrastructural-agency--how-southeast-asian-states-navigate-the-us-china-submarine-cable-competition>
- Murphy, E., & Bryja, T. (2025). The Strategic Future of Subsea Cables: Singapore Case Study. Center for Strategic and International Studies. Retrieved from https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2025-09/250924_Murphy_Subsea_Singapore.pdf?VersionId=WOW7P2the8YcTTzpnQrOdeD_WfNKEVDI#1#1
- Nguyen, H. V., & Vo, H. C. (2025). Undersea Cables in the South China Sea: A New Frontier of Us-China Strategic Competition and The Dilemma for Southeast Asian Countries. *Jurnal of Cultural Analysis and Social Change*, 10(2), 1-12. doi:<https://doi.org/10.64753/jcasc.v10i2.1640>
- Su, W. M. (2025). Protection of Submarine Cables and Pipelines: The Legal and Regulatory Practices of ASEAN Member States. *International Law and the Protection of*

Submarine Cables and Pipelines (pp. 1-24). Singapore: Centre for International Law, National University of Singapore. Retrieved 22 7, 2026, from <https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2025/09/Session-2-Dr.-SU-Wai-Mon-Protection-of-Submarine-Cables-and-Pipelines-The-Legal-and-Regulatory-Practices-of-ASEAN-Member-States.pdf>

Telecom Review Asia. (2025). Submarine Cable Resilience: Beyond Infrastructure. Retrieved from Telecom Review Asia: <https://www.telecomreviewasia.com/news/featured-articles/12473-submarine-cable-resilience-beyond-infrastructure/?tmpl=component&print=1&layout=default>

Perdagangan, Investasi Dan Pembangunan Ekonomi Di Tengah Perang Tarif As-Tiongkok: Analisis Hilirisasi Nikel Indonesia

Ignatius Hendra Sutikno

Pendahuluan

Hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok sangat penting untuk memahami ekonomi abad ke-21. Sejak Tiongkok menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2001, perdagangan bilateral antara Tiongkok dan beberapa negara lain telah meningkat pesat. Selain itu, peningkatan perdagangan, foreign direct investment (FDI), dan pembentukan Global Value Chains (GVC) telah meningkatkan hubungan ekonomi antara dua negara (Gilpin, 2001; Baldwin, 2016). Namun, keadaan berubah ketika AS menerapkan tarif impor terhadap produk Tiongkok pada 2018 dan dibalas dengan kebijakan serupa. Perang dagang ini mengubah perdagangan dan investasi global serta hubungan bilateral kedua negara tersebut.

Lebih jauh lagi, konflik dimulai setelah Amerika Serikat menuduh Tiongkok melakukan pelanggaran perdagangan, seperti penggunaan subsidi industri, transfer teknologi paksa, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Sejalan dengan argumen dari Bown (2023), perang dagang selanjutnya berkembang menjadi bidang strategi kompetitif yang berkaitan dengan teknologi, investasi, perlindungan rantai pasokan, dan geopolitik. Dengan demikian, tahap terbaru perdagangan internasional menunjukkan bahwa perdagangan bukan sekadar kegiatan ekonomi, tetapi juga sarana untuk menegaskan kekuasaan global.

IMF melaporkan bahwa ketidakpastian kebijakan perdagangan dan tarif dapat menghambat pertumbuhan ekonomi global. Hal ini menyebabkan peningkatan biaya produksi, penurunan perdagangan dan investasi, dan reorganisasi rantai nilai global (GVCs). Sebaliknya, UNCTAD mengamati *trade diversion*. Perdagangan dan investasi ke negara lain, seperti Vietnam, Meksiko, Taiwan, dan beberapa negara Asia Tenggara, disebut "trade diversion". Akibatnya, perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi setiap negara semakin ditentukan oleh kepentingan geopolitik.

Dalam konteks ini, Undang-Undang *CHIPS* dan Undang-Undang *Science AS* memperkuat kebijakan industri, dan Tiongkok mempercepat rencana *Made in China 2025*. Dengan kebijakan-kebijakan ini, ada peningkatan keamanan ekonomi dan persaingan geo-ekonomi, yang menempatkan ekonomi di bawah pengaruh tujuan strategis nasional yang lebih besar. Tetapi sebagian besar penelitian berfokus pada dampak tarif dan perdagangan, dan tidak menjelaskan mengapa kedua negara menerapkan kebijakan proteksionis dan mengeluarkan biaya ekonomi yang besar.

Dalam tulisan ini, Neo-Merkantilisme melihat perdagangan, investasi, tarif, dan kebijakan industri sebagai alat untuk meningkatkan kekuatan nasional (Gilpin, 2001). Bagaimana perang tarif AS-Tiongkok berdampak pada investasi, perdagangan, dan pembangunan ekonomi? Mengapa kedua negara tersebut mengadopsi kebijakan proteksionis?

Penulis ini berpendapat bahwa Perang Dagang AS-Tiongkok adalah lebih dari sekadar perang perdagangan; itu adalah

pertarungan strategis untuk menguasai teknologi, industri, dan geopolitik. Kebijakan kedua negara menyebabkan perpecahan ekonomi dunia, reorganisasi GVC, dan perubahan gaya investasi internasional. Ini semuanya telah menciptakan tantangan baru bagi kemajuan ekonomi negara berkembang.

Perang Dagang Amerika Serikat–Tiongkok

Perang Dagang Amerika-Tiongkok adalah bukti pergeseran kebijakan perdagangan ke arah perlindungan strategis daripada liberalisasi. Ini adalah salah satu peristiwa ekonomi politik terpenting di dunia pada abad ke-21. Amerika Serikat telah menjadi bagian dari sistem perdagangan bebas selama beberapa dekade melalui WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) sampai kebijakan diubah pada tahun 2018. Perubahan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi Tiongkok yang cepat, defisit perdagangan yang meningkat dengan negara tersebut, dan tuduhan tidak berdasar tentang praktik perdagangan yang tidak adil (Gilpin, 2001).

Investigasi yang dilakukan berdasarkan *301 of the Trade Act of 1974* menimbulkan konflik karena menunjukkan bahwa Tiongkok terlibat dalam transfer teknologi paksa, pencurian properti intelektual, kebijakan diskriminasi terhadap warga negara asing, dan perolehan teknologi strategis oleh pemerintah. Karena tuduhan ini, AS memberlakukan tarif impor sebesar 7,5-25% pada impor Tiongkok senilai sekitar 370 miliar dolar AS, yang dibalas oleh Tiongkok dengan tarif pada barang ekspor AS senilai 110 miliar dolar AS. Sementara *Phase One Trade Agreement* ditandatangani pada tahun 2020, sebagian besar tarif masih diberlakukan dan konflik perdagangan masih berlanjut.

Ini menunjukkan bahwa selain efisiensi ekonomi, keamanan nasional dan rivalitas geopolitik memengaruhi hubungan ekonomi AS-Tiongkok. Selain mempertahankan tarif era Trump, pemerintahan Joe Biden meluncurkan Undang-Undang *CHIPS* dan *Science*, Undang-Undang *Inflation Reduction*, dan Undang-Undang Pembatasan Investasi dalam bidang teknologi tertentu untuk memperkuat kontrol ekspor teknologi. Menurut IMF, karena tindakan AS meningkatkan biaya perdagangan global, penggunaan perdagangan dan investasi meningkat untuk keamanan ekonomi. Akibatnya, Tiongkok mempercepat rencana *Made in China 2025* dengan menginvestasikan lebih banyak uang dalam kendaraan listrik, semikonduktor, kecerdasan buatan, dan energi terbarukan. Selain itu, ia menantang WTO atas pembatasan ekspor semikonduktor AS. Dinamika ini menunjukkan bagaimana persaingan antara AS dan Tiongkok telah berkembang dari sengketa tarif menjadi persaingan teknologi dan pengendalian rantai pasok global.

Neo-Merkantilisme sebagai Kerangka Analisis

Untuk memahami dinamika ini, penelitian ini menggunakan perspektif Neo-Merkantilisme dalam Ekonomi Politik Internasional. Perspektif ini melihat negara sebagai aktor utama dalam sistem ekonomi internasional dan menggunakan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kekuatan nasional. Menurut neo-merkantilisme, kepentingan strategis akan diprioritaskan meskipun efisiensi ekonomi dikorbankan (Gilpin, 2001; Oatley, 2019). Liberalisme menekankan perdagangan bebas untuk kemakmuran umum. Sebaliknya, ide Friedrich List (1841) menegaskan bahwa negara harus menjaga industri domestik dengan menerapkan tarif, kebijakan industri, dan

subsidi agar mereka dapat bersaing dengan negara maju. Pembagian kekuasaan politik tidak memengaruhi perdagangan internasional, yang menghasilkan konflik ekonomi dan teknologi antara negara, menurut Gilpin (2001).

Untuk menjelaskan Perang Dagang Amerika-Tiongkok, perspektif Neo-Merkantilisme berguna. Berbeda dengan ramalan liberal bahwa tarif akan mengurangi efisiensi dan kesejahteraan, Amerika Serikat terus mempertahankan tarif terhadap Tiongkok hingga peninjauan *Section 301* tahun 2024. Sebaliknya, karena Tiongkok terus memperkuat subsidi industri, membatasi ekspor mineral strategis, dan meningkatkan investasi dalam industri teknologi tinggi, strategi lebih penting daripada efisiensi ekonomi. Akibatnya, perdagangan internasional dianggap sebagai *economic statecraft*, yaitu penerapan kebijakan ekonomi seperti tarif, pembatasan investasi, pengaturan ekspor semikonduktor, dan subsidi industri untuk mencapai tujuan politik, keamanan nasional, dan mempertahankan keunggulan teknologi. Perang Dagang AS-Tiongkok adalah bukti kembalinya neomarkantilisme ke ekonomi politik internasional masa kini.

Dampak Perang Dagang terhadap Perdagangan Internasional

Pola perdagangan bilateral yang sebelumnya sangat bergantung telah diubah oleh kenaikan tarif impor Amerika Serikat dan tindakan reaksi Tiongkok. Peningkatan tarif sejak 2018 telah meningkatkan biaya perdagangan, menyebabkan penurunan volume perdagangan di banyak sektor strategis. Organisasi Perdagangan Dunia menyatakan bahwa tarif bilateral rata-rata meningkat dari sekitar 3% sebelum perang dagang menjadi 17%

dan hanya sedikit berkurang menjadi sekitar 16% setelah *Phase One Agreement*. Akibatnya, perdagangan bilateral menurun dan restrukturisasi rantai pasokan di Asia Timur.

Selain itu, perang dagang menyebabkan trade diversion, atau pengalihan perdagangan ke negara ketiga, terjadi. UNCTAD melaporkan bahwa tarif AS menyebabkan ekspor Tiongkok ke pasar AS kehilangan sekitar US\$35 miliar pada semester pertama 2019. Sekitar US\$21 miliar (63%) dialihkan ke negara lain seperti Vietnam, Meksiko, Taiwan, Korea Selatan, dan Uni Eropa, dan sisanya digantikan oleh produsen domestik AS atau hilang dari pasar. Perubahan ini menunjukkan bahwa perang dagang tidak menghentikan perdagangan internasional; sebaliknya, mereka mengubah cara perdagangan global dijalankan. Misalnya, di Vietnam, Meksiko, dan Taiwan, ekspor elektronik, manufaktur, mobil, dan TI meningkat. Perusahaan multinasional mendiversifikasi pemasok dan mengalihkan produksi untuk menghindari tarif yang lebih tinggi. Kondisi ini mencerminkan rencana mereka.

Dalam perspektif Neo-Merkantilisme, tarif tidak hanya digunakan untuk mengurangi defisit perdagangan, tetapi juga sebagai instrumen *economic statecraft* guna membentuk kembali struktur produksi internasional. Melalui kebijakan *friend-shoring* dan *reshoring* demi kepentingan ekonomi dan keamanan nasional, Amerika Serikat berusaha mengurangi ketergantungannya pada produksi Tiongkok. Namun, masih ada perdebatan tentang keefektifan pendekatan tersebut. Meskipun dampak langsung perang dagang terhadap PDB global hanya sekitar 0,1%, WTO memperkirakan ketidakpastian kebijakan

perdagangan meningkatkan investasi, meningkatkan biaya produksi, dan mengurangi efisiensi *Global Value Chains*.

Dampak terhadap Foreign Direct Investment

Perdagangan barang dan investasi asing langsung diubah karena perang dagang AS-Tiongkok. Karena infrastruktur manufaktur yang kuat, biaya produksi yang kompetitif, dan keterlibatannya dalam *Global Value Chains* (GVC), Tiongkok menjadi tujuan investasi utama sebelum konflik. Namun, karena kenaikan tarif dan ketidakpastian perdagangan, perusahaan multinasional beralih ke strategi China+1, yang mempertahankan sebagian produksi di Tiongkok sambil berinvestasi di negara lain seperti Indonesia, Vietnam, India, Malaysia, dan Meksiko. Metode ini dapat membantu mereka menghindari tarif dan mengurangi risiko geopolitik. Akibatnya, investasi tidak meninggalkan Tiongkok sepenuhnya, tetapi mengalami diversifikasi geografis daripada meninggalkannya sepenuhnya.

Perubahan ini menunjukkan bahwa keputusan investasi tidak lagi hanya didasarkan pada efisiensi biaya, akses pasar, dan tenaga kerja, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan geopolitik dan keamanan ekonomi. IMF menyebut hal ini sebagai *geo-economic fragmentation*, yaitu pemisahan perdagangan dan investasi berdasarkan kepentingan politik dan keamanan. Ini dapat mengurangi produktivitas global karena berkurangnya skala ekonomi dan keuntungan spesialisasi internasional.

Menurut Neo-Merkantilisme, perubahan dalam pola investasi disebabkan oleh peningkatan persaingan antarnegara. Sementara itu, Amerika Serikat mengurangi investasi pada industri strategis

seperti komputasi kuantum, semikonduktor, dan kecerdasan buatan, Tiongkok membantu perusahaan domestiknya dengan subsidi, pembiayaan industri, dan investasi penelitian. Ini menunjukkan bahwa investasi telah digunakan sebagai alat strategis untuk meningkatkan keunggulan teknologi, kemampuan bisnis, dan posisi negara di ekonomi global.

Secara kritis, perang dagang tidak menyebabkan *decoupling* ekonomi secara penuh, tetapi mendorong rekonfigurasi perdagangan dan investasi global. Meskipun masih ada, hubungan ekonomi AS-Tiongkok semakin terfokus pada bidang strategis seperti semikonduktor, kendaraan listrik, kecerdasan buatan, dan mineral kritis. Kondisi ini mendukung argumen Neo-Merkantilisme bahwa kepentingan negara selalu memengaruhi perdagangan internasional. Ketika keamanan nasional menjadi nomor satu, negara cenderung mengurangi efisiensi ekonomi dengan menerapkan kebijakan tarif, subsidi, pembatasan investasi, dan kontrol ekspor teknologi untuk mempertahankan kekuatan industri dan posisi mereka dalam ekonomi internasional.

Dampak Perang Dagang terhadap Pembangunan Ekonomi Global

Perang dagang AS-Tiongkok memengaruhi pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan, selain berdampak pada perdagangan antara dua negara. Perdagangan, investasi, produksi, dan pertumbuhan ekonomi negara lain dipengaruhi oleh perubahan kebijakan perdagangan dua negara terbesar di dunia. Hal ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di era globalisasi sangat bergantung pada stabilitas hubungan ekonomi internasional.

Peningkatan pembagian ekonomi geografis adalah salah satu akibatnya. Menurut IMF (2023), persaingan geopolitik mendorong pembentukan blok perdagangan dan investasi daripada efisiensi ekonomi. Akibatnya, arus perdagangan dan investasi semakin terfragmentasi, yang mengurangi manfaat spesialisasi internasional dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi global, terutama di negara berkembang yang bergantung pada perdagangan dan investasi asing.

Karena perang tarif, perusahaan multinasional harus menaikkan biaya operasional, membatasi pertumbuhan, dan menunda investasi. Tingkat ketidakpastian kebijakan dalam perang dagang adalah dampak paling merusak dan langsung dari perang dagang tersebut. Yang paling merusak adalah ketidakpastian kebijakan, bukan tarif itu sendiri (Bekkers & Sofia, 2020). Kondisi ini menciptakan lingkungan bagi perusahaan untuk mengurangi jenis investasi tertentu dan, sebagai hasilnya, mendorong tren penurunan dalam produktivitas global. Perang dagang juga mempengaruhi struktur Rantai Nilai Global (GVC). Alih-alih fokus pada efisiensi biaya, perusahaan kini memprioritaskan ketahanan rantai pasok melalui pendekatan reshoring, near-shoring, dan friend-shoring untuk mengurangi risiko geopolitik. Perubahan ini menunjukkan bahwa keamanan ekonomi dari lokasi produksi kini seimbang dengan efisiensi biaya.

Namun, efeknya tidak sepenuhnya buruk. Negara seperti Vietnam, Meksiko, Malaysia, India, dan beberapa negara Asia Tenggara mengalami peningkatan ekspor ke Amerika Serikat melalui mekanisme trade diversion dan relokasi investasi. Menurut UNCTAD, ekspor dari negara lain mengikuti

penurunan impor AS dari Tiongkok dari 2017 hingga 2022. Namun, keuntungan ini dinikmati oleh negara dengan kapasitas industri, infrastruktur, dan iklim investasi yang kompetitif.

Indonesia melihat baik peluang maupun tantangan dari perang dagang. Dengan relokasi investasi, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperkuat industri manufaktur, hilirisasi nikel, baterai, dan kendaraan listrik, sehingga menjadi bagian penting dari rantai pasokan global baru. Namun, negara juga menghadapi risiko perlambatan perdagangan internasional, investasi yang lebih kompetitif, dan penurunan permintaan ekspor. Akibatnya, pemanfaatan peluang tersebut bergantung pada infrastruktur yang lebih baik, kepastian hukum, dan sumber daya manufaktur yang lebih banyak.

Hilirisasi Nikel Indonesia dalam Dinamika Perang Dagang AS–Tiongkok

Dengan sekitar 42% cadangan nikel dunia (USGS, 2025), Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia. Akibatnya, negara ini memainkan peran penting dalam rantai pasokan kendaraan listrik karena nikel adalah bahan baku utama baterai lithium-ion. Transformasi energi mengubah nikel menjadi mineral strategis yang sangat penting secara ekonomi dan geopolitik. Melalui UU No. 4 Tahun 2009, pemerintah mendorong hilirisasi dalam upaya meningkatkan PDB, menarik investasi, dan mengembangkan industri baterai kendaraan listrik. Selain itu, pemerintah melarang ekspor bijih nikel sejak tahun 2020. Kebijakan ini, yang juga dipengaruhi oleh perang dagang AS-Tiongkok, menarik investasi besar dari perusahaan Tiongkok seperti Tsingshan Holding Group, Huayou Cobalt, GEM Co., dan CATL (Kementerian Investasi/BKPM).

Pembatasan perdagangan dan teknologi oleh Amerika Serikat mendorong perusahaan Tiongkok mengalihkan investasi ke negara yang memiliki mineral strategis, termasuk Indonesia yang didukung cadangan nikel besar dan kebijakan hilirisasi.

Menurut Neo-Merkantilisme, hilirisasi digambarkan sebagai penggunaan sumber daya alam sebagai alat ekonomi pemerintahan untuk meningkatkan industri nasional, meningkatkan posisi Indonesia dalam Global Value Chains (GVC), dan menarik investasi bernilai tambah (Gilpin, 2001). Namun, rencana ini menghadapi tantangan, seperti ketergantungan Tiongkok pada investasi dan teknologi, serta gugatan Uni Eropa di WTO. Akibatnya, keberhasilan hilirisasi bergantung pada kemampuan Indonesia untuk mempertahankan otonomi strategis dalam rantai pasokan global melalui transfer teknologi, inovasi industri, dan diversifikasi mitra investasi.

Selain itu, perang dagang AS-Tiongkok menunjukkan bahwa liberalisme tidak cukup untuk menjelaskan dinamika perdagangan internasional. Amerika Serikat dan Tiongkok tidak perlu mengadopsi kebijakan proteksionis dalam perdagangan jika keuntungan bersama menjadi tujuan utamanya. Sebaliknya, mereka menggunakan tarif dan pembatasan teknologi untuk mempertahankan kepentingan strategis mereka, yang mendukung ide neomarkantilisme yang menekankan keuntungan relatif. Tetapi teori ini tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana perusahaan multinasional beroperasi. Daripada meninggalkan Tiongkok sepenuhnya, perusahaan lebih cenderung mendiversifikasi lokasi produksi mereka melalui strategi China+1. Akibatnya, fenomena ini lebih dikenal sebagai reglobalisasi daripada deglobalisasi. Oleh karena itu,

Neo-Merkantilisme memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh daripada Liberalisme karena pertimbangan ekonomi dan keamanan nasional semakin memengaruhi investasi, perdagangan, dan kemajuan ekonomi modern.

Kesimpulan

Perang Dagang AS-Tiongkok telah mengubah cara perdagangan internasional berfungsi di seluruh dunia. Bisnis global di abad ke-21 bukan hanya tentang efisiensi ekonomi; hal ini memiliki kepentingan ekonomi dan strategis karena kompetisi investasi dan teknologi serta keamanan rantai pasokan. Neo-Merkantilisme menjelaskan perubahan ini dengan mempertimbangkan negara sebagai pelaku utama yang memberlakukan tarif, subsidi, pembatasan investasi dan teknologi untuk memperkuat dan melindungi kekuatannya. Oleh karena itu, baik Amerika Serikat maupun Tiongkok ingin mempertahankan posisi dominan mereka di industri dan teknologi serta supremasi geopolitik, selain memiliki neraca perdagangan yang menguntungkan. Perang dagang ini secara negatif memengaruhi perdagangan global, rantai nilai global, dan meningkatkan biaya produksi. Secara keseluruhan, hal ini menyebabkan perpindahan perdagangan dan investasi serta membuka peluang baru bagi negara berkembang melalui strategi yang dikenal sebagai China + 1.

Indonesia dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan memperkuat hilirisasi, industri manufaktur, dan kendaraan listrik jika negara itu mendukung reformasi infrastruktur, undang-undang, sumber daya manusia, dan integrasi ke rantai nilai global. Kebijakan hilirisasi nikel negara tersebut akan memanfaatkan nilai tambah, menarik investasi, dan memperkuat

posisinya dalam industri kendaraan listrik Global Value Chains (GVC). Namun, hilirisasi nikel bergantung pada kemampuan Indonesia untuk meningkatkan transfer teknologi, meningkatkan kapasitas industri domestik, menurunkan ketergantungan pada satu mitra investasi, dan mendiversifikasi kerja sama ekonomi. Ini menunjukkan bahwa negara berkembang dapat memanfaatkan persaingan geoekonomi global untuk industrialisasi dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional mereka.

Daftar Pustaka

- Baldwin, R. (2016). *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv24w655w>
- Bekkers, E., & Sofia, S. (2020). *An Economic Analysis of the US-China Trade Conflict (Covid-19 Reports No. 2020/04; Covid-19 Reports, Vol. 2020/04)*. <https://doi.org/10.30875/827540bd-en>
- Gilpin, R. (2001). *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400831272>
- Bown, C. P. (2023). *US–China Trade War Tariffs: An Up-to-Date Chart*. Peterson Institute for International Economics. <https://www.piie.com/research/piie-charts/us-china-trade-war-tariffs-date-chart>
- International Monetary Fund. (2023). *Geo-Economic Fragmentation and the Future of Multilateralism*. International Monetary Fund.

- International Monetary Fund. (2024). World Economic Outlook: Steady but Slow: Resilience amid Divergence. International Monetary Fund.
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2024). Realisasi Investasi Indonesia Tahun 2024. Kementerian Investasi/BKPM.
- List, F. (1909). The National System of Political Economy (S. Lloyd, Trans.). Longmans, Green, and Co. (Original work published 1841)
- Oatley, T. (2019). International Political Economy (6th ed.). Routledge.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2019). Trade and Trade Diversion Effects of United States Tariffs on China. United Nations.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2023). Trade and Development Report 2023: Growth, Debt, and Climate. United Nations.
- United States Geological Survey. (2025). Mineral Commodity Summaries 2025: Nickel. U.S. Department of the Interior.
- World Trade Organization. (2020). World Trade Report 2020: Government Policies to Promote Innovation in the Digital Age. World Trade Organization.
- World Trade Organization. (2023). World Trade Statistical Review 2023. World Trade Organization.
- World Trade Organization. (2024). World Trade Report 2024: Trade and Inclusiveness. World Trade Organization.

Dampak Kompetisi Teknologi Amerika Serikat Dan Tiongkok Terhadap Digitalisasi Teknologi Di Asia Tenggara

Muhammad Iqbal Devanto

Pendahuluan

Amerika Serikat dan Tiongkok pada dekade kedua abad ke-21 memiliki persaingan baru, yaitu di ranah teknologi digital, persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok sebelumnya hanya berfokus pada ranah perdagangan konvensional dan kekuatan militer. Tetapi persaingan baru berupa teknologi digital tersebut turut membentuk arah pembangunan negara-negara berkembang, khususnya Asia Tenggara. Kompetisi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok tersebut meliputi perebutan pengaruh atas infrastruktur digital, standar teknologi, dan tata kelola data. Negara berkembang seperti di Asia Tenggara menjadi tempat di mana kekuatan besar tersebut menawarkan model, pembiayaan, dan kemitraan teknologi yang berbeda. Asia Tenggara menjadi salah satu tujuan bagi negara tersebut karena beberapa faktor strategis. Pada tahun 2026, jumlah penduduk Asia Tenggara mencapai 700 juta jiwa (Clark, 2026). Melihat potensi dari jumlah penduduk yang ada dan kondisi geografis yang terhubung dengan Samudra Pasifik dan Selat Malaka serta pertumbuhan ekonomi digital yang tinggi, Amerika Serikat dan Tiongkok ingin melebarkan pengaruh teknologi mereka menuju Asia Tenggara.

Fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena kasusnya menempatkan negara-negara Asia Tenggara sebagai aktor yang aktif dalam menavigasi kepentingan bisnis teknologi Tiongkok

dan Amerika Serikat, bukan hanya menjadi objek pasif dari rivalitas kedua negara tersebut. Kuik (2008) menegaskan bahwa negara-negara di Asia Tenggara secara konsisten menghindari keberpihakan langsung terhadap dua negara pendonor, tetapi menggunakan strategi *hedging* untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari persaingan teknologi digital antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Tidak adanya keberpihakan terhadap Amerika Serikat maupun Tiongkok dapat juga menimbulkan risiko yang kecil terhadap negara penerima manfaat. Pemikiran dari Kuik (2008) mengenai hal tersebut sangat relevan untuk memahami bagaimana perilaku negara di Asia Tenggara terhadap tawaran pembangunan infrastruktur teknologi digital dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Dari situ terbitlah satu pertanyaan mendasar, yaitu apakah kompetisi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok memperluas dan memberikan manfaat bagi negara-negara di Asia Tenggara atau hanya menimbulkan bentuk ketergantungan baru dalam kemasan yang lebih modern?

Bab ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kompetisi pembangunan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok bisa memengaruhi perkembangan digitalisasi di negara-negara Asia Tenggara. Studi kasus negara Asia Tenggara di sini adalah Indonesia, Vietnam, Kamboja dan Laos. kompetisi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok berpotensi untuk menciptakan dua konsekuensi yang berjalan beriringan yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dan teknologi di negara penerima namun negara di Asia Tenggara mengembangkan strategi *hedging* yang terdiferensiasi sesuai dengan kapasitas dan kepentingan negara penerima masing

masing,

***Hedging* sebagai Strategi Negara penerima Bantuan**

Kuik (2008) menuliskan konsep *hedging* sebagai alternatif dari dua konsep klasik dalam teori hubungan internasional sebelumnya, yaitu konsep *balancing* dan konsep *bandwagoning*. Konsep tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana respon negara-negara di Asia Tenggara terhadap kebangkitan Tiongkok. Kuik (2008) dalam argumennya menunjukkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara tidak sepenuhnya mengikuti kekuatan besar yang sedang bangkit atau maju seperti yang dilakukan oleh Tiongkok, tetapi mengambil posisi netral untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kekuatan besar tersebut. Negara-negara di Asia Tenggara tidak sepenuhnya mengikuti kekuatan besar tersebut juga karena alasan keamanan; dengan istilah lain, negara penerima tetap menjaga jarak.

Dalam perkembangannya, Kuik (2023) memperluas kerangka pemikiran ini dengan menggambarkan bahwa negara-negara kecil dan menengah di kawasan Indo-Pasifik seperti di Asia Tenggara menghadapi risiko yang bersifat ambigu dan tidak hitam-putih (*shades of grey*), sehingga strategi yang mereka lakukan cenderung merupakan kombinasi dari berbagai instrumen dan kemungkinan yang saling memperkuat, bukan hanya sekadar memilih salah satu blok kekuatan besar seperti Amerika Serikat maupun Tiongkok. Konsep *hedging* tersebut juga diperkaya oleh pemikiran Tran dan Sato (2018) yang menyatakan bahwa strategi *hedging* tersusun dari kombinasi dinamis antara elemen realis dan liberal. Keterlibatan diplomatik, keterlibatan ekonomi, *soft balancing*, dan *hard*

balancing tersebut memiliki porsi yang berubah-ubah sesuai dengan tekanan eksternal yang dihadapi oleh negara di Asia Tenggara. Kerangka pemikiran tersebut sangat penting untuk dipahami karena kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana negara-negara di Asia Tenggara menggunakan strategi yang berbeda satu sama lain untuk bekerja sama di bidang teknologi dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Negara-negara di Asia Tenggara tersebut memiliki strategi yang berbeda dalam melakukan kerja sama teknologi digital.

Kompetisi Donor dan Resiko ketergantungan Terhadap Pendonor

Melihat adanya potensi ketergantungan antara negara pendonor dan penerima, kerangka mengenai kompetisi antarpemberi bantuan atau *donor competition* yang dikembangkan oleh Annen dan Moers (2017) memberikan jalan analitis yang relevan dengan studi kasus. Annen dan Moers (2017) menyatakan bahwa ketika donor yang hadir di negara-negara tujuan lebih dari satu pendonor, maka pemberi bantuan dapat meningkatkan fragmentasi bantuan, karena masing-masing donor cenderung memiliki agendanya masing-masing sehingga negara penerima harus lebih berhati-hati dalam mengelola beberapa kerangka kerja yang sama, berbeda, bahkan saling bertentangan.

Kerangka pemikiran Annen dan Moers (2017) tersebut relevan untuk memahami bagaimana negara-negara, khususnya di Asia Tenggara, harus mengelola dua ekosistem teknologi yang berbeda karena Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki standar ekosistem teknologi digital yang berbeda. Risiko ketergantungan yang lebih ekstrem berpotensi terjadi di Asia

Tenggara, sehingga dibutuhkan kerangka analitis untuk melakukan hal tersebut. Kerangka analitis tersebut dijelaskan melalui konsep debt-trap diplomacy yang dikaji oleh Al-Fadhat dan Prasetio (2024). Berdasarkan studi kasus ekspansi kapital Tiongkok di sejumlah negara Afrika, Al-Fadhat dan Prasetio (2024) menunjukkan bahwa pembiayaan infrastruktur oleh Tiongkok yang pada awalnya ditawarkan sebagai solusi pembangunan dapat berujung pada ketergantungan finansial jangka panjang ketika negara penerima tidak memiliki kapasitas fiskal maupun kelembagaan yang memadai untuk mengelola risiko utang tersebut. Meskipun studi ini berfokus pada kawasan Afrika, kerangka analisisnya relevan untuk membaca pola serupa dalam pembiayaan infrastruktur digital Tiongkok di negara-negara Asia Tenggara dengan kapasitas fiskal yang lebih terbatas.

Kompetisi Teknologi Digital Amerika Serikat dan Tiongkok dalam Ekosistem Pembangunan Teknologi Digital di Asia Tenggara

Strategi digital Tiongkok di Asia Tenggara dilakukan melalui inisiatif Digital Silk Road (DSR). Digital Silk Road adalah salah satu pilar dari Belt and Road Initiative sejak tahun 2015. Hussain dkk. (2024) menjelaskan bahwa DSR dijalankan melalui kolaborasi antara pemerintah Tiongkok dan perusahaan teknologi nasionalnya, seperti Huawei, ZTE, Alibaba, dan Tencent, untuk membangun infrastruktur teknologi generasi baru, termasuk jaringan 5G, komputasi awan, dan kabel serat optik, sekaligus menyediakan layanan konten digital seperti aplikasi pemesanan, sistem pembayaran seluler, dan platform perdagangan elektronik ke pasar-pasar negara berkembang.

Hussain dkk. (2024) menekankan bahwa melalui DSR, raksasa digital Tiongkok secara bertahap menentang dominasi status quo teknologi yang sebelumnya dipegang oleh perusahaan-perusahaan Barat.

Fokus Amerika Serikat terhadap kawasan Asia Tenggara adalah pengembangan *cloud computing*. Pengembangan infrastruktur cloud computing di Asia Tenggara dipandang strategis karena dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital, penggunaan teknologi yang terpercaya, serta penguatan tata kelola yang berbasis demokrasi dan supremasi hukum (Lewis, 2023). Kondisi ini menciptakan asimetri kompetisi di mana Tiongkok relatif lebih unggul dalam penyediaan infrastruktur fisik seperti jaringan telekomunikasi dan kabel bawah laut, sementara Amerika Serikat lebih unggul pada lapisan layanan digital tingkat lanjut. Asimetri ini pada gilirannya membentuk pola respons yang berbeda-beda di antara negara-negara Asia Tenggara, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut melalui tiga studi kasus pada bagian berikut.

Studi Kasus Negara di Asia Tenggara: Indonesia, Vietnam, Kamboja dan Laos

Melihat kompetisi teknologi digital yang dilakukan oleh Tiongkok dan Amerika Serikat, Indonesia mengambil jalan tengah dengan memanfaatkan kompetisi dua negara tersebut. Indonesia memanfaatkan teknologi Tiongkok dengan menggandeng Huawei yang menjadi pemasok utama infrastruktur telekomunikasi Indonesia sejak awal tahun 2000-an. Proyek Indonesia yang bekerja sama dengan Huawei adalah proyek jaringan serat optik nasional Palapa Ring. Hal tersebut membuat Indonesia ketergantungan secara struktural karena

adanya generasi ketiga dan keempat dari proyek jaringan serat optik tersebut. Pola ketergantungan infrastruktur yang dilakukan oleh Indonesia sejalan dengan tulisan Al-Fadhat dan Prasetyo (2024) mengenai bagaimana pembiayaan dan penyediaan infrastruktur oleh Tiongkok dapat menciptakan ketergantungan jangka panjang apabila tidak diimbangi dengan diversifikasi mitra teknologi.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia secara aktif berupaya untuk memperkuat kedaulatan digital melalui program penguatan kelembagaan dan regulasi. Aji (2025) menganalisis bagaimana dinamika politik keamanan siber Indonesia mendorong penguatan peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai instrumen utama untuk membangun kedaulatan siber nasional di tengah meningkatnya frekuensi serangan siber dan kompetisi politik global atas ruang digital. Aji (2025) menekankan bahwa politik keamanan siber menentukan bagaimana lembaga-lembaga negara menegosiasikan kewenangan, mengkoordinasikan kebijakan, dan memobilisasi sumber daya untuk membangun resiliensi digital nasional. Penguatan kelembagaan semacam ini, ditambah dengan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya semata-mata menjadi objek pasif dari ketergantungan teknologi digital, melainkan Indonesia tengah berupaya menyeimbangkan manfaat investasi asing dengan penguatan otonomi kebijakan digitalnya sendiri.

Berbeda dengan yang dilakukan oleh Indonesia, Vietnam menerapkan strategi *hedging* yang efektif di antara negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Vietnam secara konsisten

menghindari ketergantungan hanya pada satu negara, yaitu Tiongkok, khususnya dalam menggunakan Huawei sebagai pengembang dan pembangun jaringan internet generasi keempat dan kelima. Vietnam bekerja sama dengan Ericsson dan Nokia serta tetap mengembangkan teknologi 5G-nya sendiri melalui operator milik negara, yaitu Viettel. Strategi yang dilakukan oleh Vietnam tersebut mencerminkan unsur *hard balancing* dan keterlibatan ekonomi yang selektif dan terarah. Mengacu pada kerangka pemikiran *hedging* oleh Tran dan Santo (2018) mengenai respons terhadap kekhawatiran kedaulatan keamanan atas infrastruktur jaringan keras dan digital. Namun demikian, penelitian terbaru Vo Van dkk. (2025) menunjukkan bahwa penetrasi Digital Silk Road ke Vietnam justru berlangsung secara tidak resmi melalui jalur merger dan akuisisi (M&A) oleh konglomerat teknologi Tiongkok, alih-alih melalui partisipasi formal pemerintah Vietnam dalam kerangka DSR.

Vo Van dkk. (2025) menemukan bahwa tiga raksasa teknologi Tiongkok, yaitu Alibaba, Tencent, dan Jingdong, telah mencapai dominasi pasar melalui akuisisi strategis teknologi digital sehingga menguasai sekitar 99 persen pangsa pasar perdagangan elektronik Vietnam melalui platform e commerce seperti Shopee, Lazada, dan TikTok Shop, dan memperluas ekspansinya pada ekosistem logistik melalui perusahaan korporasi seperti GHTK, GHN, dan J&T Express. integrasi senyap yang dilakukan oleh Vietnam ini berpotensi menciptakan jaringan ketergantungan digital baru yang dapat beroperasi di bawah pengawasan resmi pemerintah Vietnam, sehingga menimbulkan masalah serius bagi kedaulatan digital dan otonomi teknologi Vietnam meskipun negara tersebut secara formal berhasil tidak

mengalami ketergantungan terhadap Huawei pada level infrastruktur jaringan. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi hedging yang dilakukan oleh Vietnam bersifat parsial atau sukses pada infrastruktur keras tetapi tidak sukses pada lapisan platform dan ekosistem digital hilir.

Berbeda dengan Indonesia dan Vietnam, Kamboja dan Laos mengalami pola ketergantungan yang jauh lebih tinggi terhadap Tiongkok dalam pembangunan sistem digital mereka. Kamboja dan Laos mengalami kekurangan atau minimnya diversifikasi mitra pengembangan teknologi. Kamboja dan Laos menyambut dengan baik investasi jaringan 5G, kabel serat optik, serta proyek infrastruktur cerdas dari Huawei dan ZTE sebagai bagian dari investasi agenda pembangunan ekonomi dan teknologi nasional, tetapi hal tersebut tidak disertai oleh upaya yang signifikan untuk menyeimbangkan dengan kerja sama teknologi dari aktor lain yang dapat menciptakan situasi ketergantungan. Situasi tersebut akhirnya berpotensi memunculkan ketergantungan seperti dari kerangka pemikiran Annen dan Moers (2017) mengenai risiko ketergantungan. Risiko ketergantungan dapat meningkat jika Kamboja dan Laos hanya bergantung pada satu sumber pembiayaan dan teknologi utama alih-alih memanfaatkan kompetisi yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok untuk meningkatkan *bargaining power* yang dimiliki oleh Kamboja dan Laos.

Pola ketergantungan yang dilakukan oleh Kamboja dan Laos memiliki potensi terjadinya debt-trap diplomacy seperti kerangka dari Al-Fadhat dan Prasetyo (2024). Negara yang memiliki kapasitas fiskal dan kelembagaan yang terbatas seperti Kamboja dan Laos memiliki resiko mengalami erosi otonomi

kebijakan ketika pembiayaan infrastruktur teknologi digital oleh Tiongkok tidak diimbangi dengan mekanisme tata kelola hutang dan ekonomi yang memadai. Meskipun investasi digital yang dilakukan oleh Tiongkok telah mempercepat pemerataan akses telekomunikasi di kedua negara yang sebelumnya tertinggal dalam konektivitas teknologi digital, minimnya diversifikasi mitra teknologi dapat menimbulkan kerentanan jangka panjang, baik dari sisi keamanan siber maupun dari sisi ketergantungan finansial terhadap satu kekuatan besar saja.

Kompetisi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok tidak secara otomatis menghilangkan risiko ketergantungan, melainkan menimbulkan risiko ketergantungan baru. Sejalan dengan tulisan Annen dan Moers (2017), fragmentasi standar teknologi antara ekosistem Amerika Serikat dan Tiongkok memberikan posisi di mana negara-negara Asia Tenggara mengelola dua kerangka kerja sama yang berbeda sekaligus dan bersifat terpaksa, yang justru dapat meningkatkan beban koordinasi kebijakan alih-alih memangkas birokrasi. Pada saat yang sama, kasus yang terjadi pada Kamboja dan Laos menunjukkan ketiadaan diversifikasi mitra tetap membuka risiko debt-trap diplomacy yang dikonsepsikan oleh Al-Fadhat dan Prasetyo (2024), sekalipun dalam konteks yang secara jelas disebut sebagai persaingan dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok.

Kesimpulan

Kompetisi pembangunan teknologi digital yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok telah menjadi salah satu faktor penentu utama dalam kemajuan digitalisasi Asia Tenggara pada dekade ini. Menggunakan kerangka pemikiran utama yaitu

hedging dari Kuik (2008, 2023) dan Tran serta Sato (2018), ditambah dengan kerangka pemikiran kompetisi antar donor dari pemikiran Annen dan Moers (2017) serta debt-trap diplomacy dari Al-Fadhat dan Prasetio (2024), analisis komparatif studi kasus terhadap Indonesia, Vietnam, serta Kamboja dan Laos menunjukkan bahwa respons negara-negara di kawasan ini bersifat plural dan sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan domestik masing-masing negara.

Indonesia memperlihatkan dengan jelas pola dualisme yang berupaya mengimbangi ketergantungan pada infrastruktur dengan penguatan kedaulatan data melalui lembaga negara seperti BSSN (Aji, 2025). Vietnam memperlihatkan bahwa strategi hedging dapat berhasil pada satu lapisan teknologi digital namun gagal pada lapisan lain, sebagaimana terlihat dari strategi tersembunyi yang dilakukan oleh Tiongkok melalui merger dan akuisisi di sektor perdagangan elektronik (Vo Van dkk., 2025). Sementara itu, Kamboja dan Laos merepresentasikan pola ketergantungan tinggi yang, meskipun mempercepat pemerataan akses digital, menyimpan risiko jangka panjang terkait ketergantungan finansial dan keamanan siber sebagaimana dikonsepsikan dalam kerangka debt-trap diplomacy (Al-Fadhat & Prasetio, 2024).

Temuan ini menunjukkan bahwa rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam ranah pembangunan teknologi digital tidak serta-merta menghasilkan pola ketergantungan yang sama, seperti yang diprediksikan teori dependensi klasik, namun juga tidak secara otomatis membebaskan negara berkembang dari risiko ketergantungan teknologi digital baru. Kompetisi ini justru membuka ruang agensi yang terdiferensiasi

bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menavigasi kepentingan mereka melalui kombinasi strategi hedging yang disesuaikan dengan kapasitas domestik masing-masing. Ke depan, tantangan utama bagi negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, adalah memastikan bahwa manfaat percepatan teknologi digital yang dihasilkan oleh kompetisi ini tidak mengorbankan kedaulatan data penduduk dan otonomi kebijakan jangka panjang, melalui penguatan kapasitas kelembagaan domestik dan diversifikasi mitra teknologi yang berkelanjutan dan tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Aji, M. P. (2025). Cybersecurity politics in building cyber sovereignty in Indonesia through strengthening the role of the National Cyber and Crypto Agency. *Society*, 13(2), 1056–1071. <https://doi.org/10.33019/society.v13i2.960>
- Al-Fadhat, F., & Prasetyo, H. (2024). How China's debt-trap diplomacy works in African countries: Evidence from Zimbabwe, Cameroon, and Djibouti. *Journal of Asian and African Studies*, 59(5), 1463–1483. <https://doi.org/10.1177/00219096221137673>
- Annen, K., & Moers, L. (2017). Donor competition for aid impact and aid fragmentation. *World Bank Economic Review*, 31(3), 708–729. <https://doi.org/10.1093/wber/lhw019>
- Clark, D. (2026, April 16). Total population of the ASEAN countries in 2026. Statista. <https://www.statista.com/statistics/796222/total-population-of-the-asean-countries/>

- Hussain, F., Hussain, Z., Khan, M. I., & Imran, A. (2024). The digital rise and its economic implications for China through the Digital Silk Road under the Belt and Road Initiative. *Asian Journal of Comparative Politics*, 9(2), 238–253. <https://doi.org/10.1177/20578911231174731>
- Kuik, C.-C. (2008). The essence of hedging: Malaysia and Singapore's response to a rising China. *Contemporary Southeast Asia*, 30(2), 159–185. <https://doi.org/10.1355/CS30-2A>
- Kuik, C.-C. (2022). Shades of grey: Riskification and hedging in the Indo-Pacific. *The Pacific Review*, 36(6), 1181–1214. <https://doi.org/10.1080/09512748.2022.2110608>
- Lewis, J. A. (2023, August 7). Cloud computing in Southeast Asia and digital competition with China. Center for Strategic and International Studies. <https://www.csis.org/analysis/cloud-computing-southeast-asia-and-digital-competition-china>
- Tran, T. B., & Sato, Y. (2018). Vietnam's post-Cold War hedging strategy: A changing mix of realist and liberal ingredients. *Asian Politics & Policy*, 10(1), 73–99. <https://doi.org/10.1111/aspp.12368>
- Vo Van, T., Tran Thi Thanh, V., & Le Hoang, K. (2025). How China's Digital Silk Road penetrates Vietnam through M&A activities: Evidence from e-commerce and logistics. *SAGE Open*, 15(4). <https://doi.org/10.1177/21582440251399749>

Analisis Komparatif Green Development Cooperation Amerika Serikat dan Tiongkok dengan Brasil dalam Pengembangan Energi Terbarukan

Eka Milasari

Pendahuluan

Perubahan iklim global telah menjadi salah satu tantangan paling mendesak dalam pembangunan internasional di abad ke-21. Peningkatan suhu bumi, perubahan pola cuaca, hingga semakin seringnya terjadinya bencana hidrometeorologi mendorong masyarakat internasional untuk menempatkan isu perubahan iklim sebagai agenda utama dalam tata kelola global. Dalam konteks tersebut, setiap negara didesak untuk melakukan transformasi kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan melalui upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Komitmen negara-negara terhadap agenda perubahan iklim diwujudkan melalui berbagai rezim internasional, terutama *Kyoto Protocol* dan *Paris Agreement*. *Kyoto Protocol* menjadi instrumen internasional pertama yang menetapkan target pengurangan emisi yang mengikat bagi negara-negara maju, kemudian melalui *Paris Agreement* komitmen tersebut diperluas dengan melibatkan hampir seluruh negara melalui mekanisme *Nationally Determined Contributions* (NDC). Menurut Pramudianto (2016) kedua kesepakatan tersebut menjadi landasan normatif bagi negara-negara untuk mengembangkan kebijakan transisi energi, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, serta mengurangi

ketergantungan pada energi berbasis bahan bakar fosil. Selain melalui rezim iklim internasional, perubahan iklim juga menjadi bagian integral dari agenda pembangunan global yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Namun demikian, implementasi agenda perubahan iklim tidak hanya terbatas pada tujuan tersebut, melainkan juga berkaitan erat dengan pencapaian inovasi pengembangan green energi sebagai bentuk inovasi pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu, upaya mitigasi perubahan iklim semakin dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pembangunan ekonomi, ketahanan energi, dan kerja sama internasional. ketahanan energi telah menjadi isu strategis yang banyak diupayakan secara global. Terutama ditengah terjadinya peningkatan kebutuhan energi diberbagai sektor serta keterbatasan sumber daya fosil untuk mencukupinya. Ketergantungan akan penggunaan energi fosil masih mendominasi struktur energi global. Keadaan tersebut menitikberatkan permasalahan ketergantungan energi yang berimbas kepada keberlanjutan pasok energi hingga isu-isu lingkungan akibat emisi gas yang timbul dari penggunaan bahan bakar fosil.

Sebagai respons terhadap kompleksitas masalah tersebut, banyak negara mulai mengembangkan transisi penggunaan energi, dari energi fosil menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menjadi sumber utama emisi gas rumah kaca, tetapi juga sebagai wujud komitmen negara-negara dalam memenuhi target mitigasi

perubahan iklim yang telah disepakati dalam berbagai rezim internasional (York and Bell 2019). Oleh karena itu, pengembangan EBT kini menjadi bagian penting dari strategi *green development* yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan.

Transformasi menuju *green development* tidak hanya dilakukan oleh negara-negara maju, tetapi juga muncul negara-negara berkembang yang kemudian mulai mengadopsi pengembangan EBT dengan memanfaatkan keberlimpahan potensi sumber daya energi terbarukan yang besar. Salah satu negara berkembang yang paling menonjol dalam pengembangan EBT adalah Brasil. Brasil merupakan negara pertama yang berhasil mengembangkan bioetanol berbasis tebu. Pengembangan bioetanol di Brasil berdampak pada pengurangan tingkat ketergantungan negara tersebut terhadap penggunaan energi fosil. Berkat ketersediaan sumber daya tebu yang melimpah, dukungan kebijakan pemerintah, serta investasi berkelanjutan dalam inovasi teknologi, Brasil berhasil menjadi salah satu pelopor dunia dalam pengembangan bioetanol sebagai energi terbarukan. Keberhasilan tersebut menjadikan bioetanol tidak hanya sebagai instrumen diversifikasi energi nasional, tetapi juga sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi dan pembangunan ekonomi hijau yang mampu meningkatkan ketahanan energi sekaligus mengurangi emisi karbon. Brasil telah lama dikenal sebagai pelopor pengembangan bioethanol berbasis tebu yang tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga dieskpor ke pasar internasional. Pembangunan di Brasil tidak hanya sebatas keberhasilan atas kemandirian energi tetapi juga pengembangan teknologi secara

signifikan. Flex-fuel vehicle merupakan teknologi mesin kendaraan resisten terhadap penggunaan bahan bakar bioetanol (Cassiano et al 2016).

Keberhasilan negara Brasil dalam pengembangan industri bioetanol telah menarik minat negara-negara yang mendominasi perdagangan internasional seperti Amerika Serikat dan Tiongkok untuk melakukan kerja sama pembangunan *green energy* sebagai wujud penguatan ekonomi serta komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Sebagai negara yang pertama kali berhasil mengembangkan bioetanol, Amerika Serikat melirik potensi yang dimiliki Brasil yang secara masif melakukan agenda pembangunan bioetanol berbasis global. Hal tersebut kemudian mendorong kebijakan Amerika Serikat untuk melakukan kerja sama dengan Brasil. Meski demikian, selain berperan sebagai mitra, Amerika Serikat merupakan pesaing alamiah. Hal tersebut dapat dilihat dengan bagaimana kedua negara tersebut menyumbang kontribusi besar terhadap produksi etanol global. Amerika Serikat menguasai hingga 52% pasar global disusul dengan Brasil 29% (Renewable Fuels Association 2025). Brasil saat ini telah secara aktif melakukan kerja sama dengan negara-negara berkembang melalui konsep *south-south cooperation*. Pendekatan yang dilakukan Brasil adalah dengan memberikan bantuan pengetahuan hingga secara teknis berinvestasi dalam pembangunan teknologi industri. Hal ini yang kemudian membawa Amerika Serikat ikut bermain dalam pengembangan *green energy* di negara periferi. Strategi tersebut berhasil mendorong persebaran industri bioetanol ke negara berkembang seperti Guatemala, El Salvador, Honduras hingga

Haiti dibawah kerangka kerja sama AS-Brasil (Organization of American States 2014).

Di sisi lain, pascapembentukan BRICS, kerja sama antara Tiongkok dan Brasil meningkat secara masif. Kerja sama tersebut kuat dalam konteks hubungan dagang, di mana Tiongkok telah menjadi mitra dagang utama Brasil untuk komoditas pertanian dan pertambangan. Selain itu, Tiongkok telah membuat kesepakatan impor bioetanol dari Brasil untuk mendukung kebijakan penggunaan energi domestik. Tidak hanya berfokus pada kerja sama mitra perdagangan, Tiongkok-Brasil memperluas kerja sama tersebut terhadap investasi infrastruktur yang salah satunya adalah pengembangan energi terbarukan. Berdasarkan laporan Quantum (2025) diketahui bahwa perusahaan energi Tiongkok berkomitmen untuk berinvestasi dalam proyek pembuatan *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) berbahan dasar tebu di Brasil guna mengurangi emisi sektor penerbangan. Lantas, Bagaimana perbandingan pola kerja sama antara Tiongkok-Brasil dan Amerika Serikat-Brasil dalam pembangunan *green energy* di tengah rivalitas perdagangan kedua negara adidaya tersebut?. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pola kerja sama yang dilakukan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap negara mitra dalam fokus pembangunan berkelanjutan melalui *climate change* dan pengembangan *green energy*.

Pembahasan

Brasil merupakan salah satu negara yang berhasil mengembangkan energi hijau dengan bahan nabati dalam bentuk bioethanol. Pengembangan bioethanol di Brasil didukung oleh

melimpah ruahnya molase yang di hasilkan dari industri gula. Keberhasilan Brasil tiak hanya terletak pada ketersediaan kapasitas produksi, tetapi juga pada integrasi kebijakan, inovasi teknologi, hingga dukungan institusional yang kuat. Brasil telah lama dikenal sebagai pelopor pengembangan bioethanol berbasis tebu yang tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga dieskpor ke pasar internasional. Pemerintah Brasil mulai memperkenalkan pengembangan bioetanol melalui *programa nacional do alcool (proalcool)*. *Proalcool* muncul sebagai kebijakan mendesak sebagai upaya mengatasi kerentanan energi nasional. Silva et al (2022) mengemukakan bahwa pengembangan bioetanol di Brasil adalah yang paling ramah lingkungan, biaya efisien serta kompetitif. Pemilihan bahan baku yang berasal dari molase tebu memiliki keunggulan dalam proses fermentasi sederhana, sehingga biaya produksi lebih rendah. Selain memopong isu ekonomi, pengembangan energi terbarukan juga tidak lepas dari pertimbangan kelestarian lingkungan. Pemanfaatan momentum perluasan distribusi pasar bioetanol secara global dilihat dari pola perubahan prespektif di banyak negara mengenai kelestarian lingkungan. *Kyoto Agreement* dan *Paris Agreement* berkontribusi pada peningkatan kekhawatiran akan emisi GHG dan keberlanjutan lingkungan.

Kondisi tersebut membuat banyak negara merubah kebijakan penggunaan energi terbarukan, memberi peluang bagi Brasil untuk memperluas jangkauan ekspor bioetanol 2GE (UNCC 2024). Brasil secara aktif menjalin kerja sama bilateral maupun multilateral untuk membuka akses pasar, termasuk dengan negara-negara berkembang yang memiliki kondisi agroklimat

serupa. Upaya ini merupakan bagian dari diplomasi energi Brasil untuk mempertahankan posisinya sebagai eksportir utama bioetanol global. kerja sama dengan negara berkembang dapat dipahami sebagai strategi ganda. Salah satunya adalah bentuk solidaritas pembangunan melalui south-south Cooperation untuk menunjukkan bahwa negara berkembang dapat berinovasi dan membawa keuntungan. Namun, di sisi lain, kesempatan tersebut dapat dipandang sebagai alat untuk membangun hegemoni energi alternatif di tingkat global. Sebagai upaya untuk menganalisis kontribusi kerja sama Amerika Serikat dan Tiongkok dalam memengaruhi strategi Brasil dalam pengembangan bioetanol, teori liberal *interdependency* digunakan dalam penulisan ini. Berdasar pada argumen Keohane and Nye (1987) tentang bagaimana bentuk kerja sama antarnegara tidak lagi berfokus pada isu keamanan, sehingga hubungan internasional didominasi oleh persaingan kekuatan ekonomi dan teknologi yang membentuk suatu hubungan antarnegara yang semakin kompleks.

Analisis Kerja Sama Amerika Serikat-Brasil dalam Pengembangan *Green Energy*

Di tengah perubahan iklim global yang telah menjadi perhatian warga global, isu ketahanan energi juga menyertai kekhawatiran negara-negara yang bergantung pada pasokan energi fosil. Amerika Serikat, sebagai salah satu konsumen energi terbesar di dunia menghadapi tantangan untuk mengurangi ketergantungannya terhadap minyak bumi. Setelah berbagai gejolak harga minyak dan meningkatnya ketidakpastian pasokan energi global, Amerika Serikat berupaya mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi melalui diversifikasi

sumber energi. Bioetanol dipandang sebagai salah satu alternatif penting karena dapat digunakan sebagai bahan bakar transportasi dengan emisi karbon yang lebih rendah. Namun, produksi bioetanol berbasis jagung di Amerika memiliki keterbatasan, baik dari sisi efisiensi maupun biaya produksi. Sebaliknya, Brasil mampu memproduksi bioetanol berbasis tebu dengan biaya lebih rendah dan tingkat efisiensi energi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mendukung perkembangan industri bioetanol Brasil juga berarti memperluas pasokan energi terbarukan yang dapat menunjang keamanan energi global. Di sisi lain, Brasil telah lebih dahulu berhasil membangun industri bioetanol berbasis tebu melalui Program *Proalcool* yang dimulai sejak tahun 1975. Brasil unggul dalam mengimplementasikan inovasi teknologi Flex Fuel Vehicle pada kendaraan yang membuat kendaraan toleran terhadap bahan bakar bioetanol. Hal tersebut berdampak pada tingginya permintaan terhadap Bioetanol (Souza & Pompermayer 2015)

Kerja sama Amerika Serikat dan Brasil dalam pengembangan bioetanol merupakan salah satu contoh paling menonjol dari *green development cooperation* di bidang energi terbarukan. Hubungan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi bioetanol sebagai energi alternatif, tetapi juga mencerminkan transformasi hubungan internasional dari yang sebelumnya berorientasi pada isu keamanan menuju kerja sama dalam bidang energi, perubahan iklim, inovasi teknologi, dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam *MoU on Biofuels* tahun 2007 yang memiliki salah satu tujuan utama membangun pasar biofuel global melalui harmonisasi standar, pengurangan hambatan perdagangan, dan penyebaran teknologi

bioetanol ke negara-negara berkembang. Dengan demikian, kepentingan Amerika Serikat bukan sekadar meningkatkan kapasitas Brasil, tetapi juga menciptakan suatu rezim internasional baru di mana bioetanol menjadi komoditas energi yang diperdagangkan secara global (de Mattos et al. 2016). Kerja sama tersebut juga didorong oleh meningkatnya perhatian terhadap isu perubahan iklim. Pengembangan bioetanol dipandang sebagai instrumen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor transportasi sekaligus mendukung agenda pembangunan *zero emission*. Dalam konteks ini, kerja sama energi menjadi bagian dari diplomasi iklim yang menghubungkan kepentingan ekonomi dengan komitmen lingkungan.

Kontribusi Amerika Serikat lebih dapat dipahami sebagai faktor yang mempercepat modernisasi dan internasionalisasi industri bioetanol Brasil. Salah satu bentuk kontribusi tersebut adalah melalui transfer teknologi dan kerja sama penelitian. Melalui berbagai lembaga penelitian seperti *National Renewable Energy Laboratory* (NREL), Amerika Serikat bekerja sama dengan institusi penelitian Brasil dalam mengembangkan bioetanol generasi kedua berbasis biomassa lignoselulosa, meningkatkan efisiensi fermentasi, serta mengembangkan teknologi pemanfaatan limbah pertanian. Kerja sama penelitian ini meningkatkan kemampuan inovasi industri bioetanol Brasil sehingga tidak hanya bergantung pada teknologi konvensional berbasis tebu. Selain transfer teknologi, Amerika Serikat juga berperan dalam harmonisasi standar internasional biofuel. Kedua negara bekerja sama menyusun metodologi penghitungan emisi karbon, *life cycle assessment*, dan standar keberlanjutan

yang menjadi syarat penting bagi perdagangan bioetanol di pasar internasional. Standardisasi tersebut meningkatkan daya saing bioetanol Brasil karena memberikan legitimasi bahwa bioetanol berbasis tebu merupakan salah satu bahan bakar dengan intensitas karbon yang rendah. Dengan demikian, kerja sama tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas produksi, tetapi juga memperluas akses bioetanol Brasil ke pasar global.

Analisis Kerja Sama Tiongkok-Brasil dalam Pengembangan *Green Energy*

Kerangka kerja sama antara Tiongkok dan Brasil dapat dipahami sebagai bentuk interdependensi sebagai jawaban atas kebutuhan Tiongkok terhadap pasokan energi dan Brasil yang memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi bioetanol berbasis tebu. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat menyebabkan konsumsi energi Tiongkok meningkat drastis. Ketergantungan yang tinggi terhadap batu bara dan minyak bumi tidak hanya meningkatkan impor energi, tetapi juga memperburuk kualitas lingkungan akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Tiongkok untuk mengembangkan energi terbarukan sebagai bagian dari strategi keamanan energi sekaligus memenuhi komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Akibatnya, Tiongkok membutuhkan pemasok eksternal yang mampu menyediakan bioetanol dalam jumlah besar dengan biaya produksi yang kompetitif. Oleh karena itu, meningkatnya permintaan Tiongkok membuka peluang baru bagi Brasil untuk memperluas pasar ekspor sekaligus meningkatkan investasi pada sektor bioenergi. Melalui konsep *south-south cooperation* diketahui bahwa keberlanjutan kerja sama Tiongkok dengan Brasil tidak hanya

sebatas perdagangan internasional, tetapi juga berkembang dalam bentuk kerja sama penelitian, inovasi teknologi energi bersih, dialog perubahan iklim, serta investasi pada sektor energi terbarukan. Dalam penelitian Rubio and Jáuregui (2022) diketahui bahwa kerja sama antara Tiongkok dan Brasil tidak hanya berupa pemberian pinjaman, tetapi juga melalui Foreign Direct Investment (FDI). Bentuk investasi terbesar Tiongkok adalah mengakuisisi perusahaan *renewable energy* yang telah beroperasi Brasil

Berdasar pada pendapat Araújo (2016) yang menyatakan bahwa perdagangan bioetanol antara Tiongkok dan Brasil merupakan bentuk kerja sama yang saling menguntungkan karena mampu menggabungkan kepentingan ekonomi, keamanan energi, serta menunjukkan komitmen negara dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Meningkatnya permintaan dari Tiongkok memberikan sinyal positif kepada industri bioetanol Brasil untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas areal budidaya tebu, mengembangkan teknologi pengolahan bioetanol, serta meningkatkan efisiensi industri. Dengan kata lain, Tiongkok tidak membangun industri bioetanol Brasil secara langsung melalui bantuan pembangunan sebagaimana dilakukan Amerika Serikat pada periode sebelumnya, tetapi melalui mekanisme pasar, yaitu dengan menciptakan permintaan yang besar sehingga investasi pada industri bioetanol Brasil menjadi semakin menguntungkan. Dalam konteks bioetanol melalui konsep *south-south cooperation*, Tiongkok tidak mendorong Brasil untuk melakukan liberalisasi ekonomi, privatisasi industri, ataupun reformasi kelembagaan sebagai prasyarat kerja sama. Sebaliknya, Tiongkok memanfaatkan hubungan

perdagangan, investasi, dan kerja sama teknologi untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus memberikan peluang pertumbuhan ekonomi bagi Brasil. Namun, Nascimento et al. (2021) mengemukakan pendapat yang berbeda, menurutnya terdapat asimetri dalam kerja sama Tiongkok-Brasil. Dominasi investasi dan kepentingan strategis Tiongkok menunjukkan bahwa agenda pembangunan berkelanjutan juga dimanfaatkan untuk memperluas pengaruh ekonomi dan geopolitik.

Kesimpulan

Kerja sama antara Amerika Serikat–Brasil dan Tiongkok–Brasil dalam pengembangan energi hijau sama-sama mencerminkan hubungan saling ketergantungan yang didorong oleh kepentingan ekonomi, ketahanan energi, dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, kedua negara mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam mendukung perkembangan industri bioetanol Brasil. Amerika Serikat lebih menekankan kerja sama yang bersifat institusional, melalui transfer teknologi, kolaborasi riset, harmonisasi standar internasional, serta pembentukan rezim pasar bioetanol global. Dengan pendekatan tersebut, Amerika Serikat berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas inovasi, modernisasi industri, dan daya saing internasional bioetanol Brasil. Sebaliknya, Tiongkok lebih mengutamakan pengembangan hubungan kerja sama yang berorientasi pada pola pasar dan investasi, yaitu melalui peningkatan permintaan impor bioetanol, FDI, akuisisi perusahaan energi terbarukan, serta pembiayaan proyek-proyek energi hijau. Berbeda dengan Amerika Serikat, Tiongkok tidak secara langsung membangun kapasitas industri melalui transfer teknologi atau reformasi kelembagaan, melainkan menciptakan

insentif ekonomi yang mendorong ekspansi produksi bioetanol Brasil melalui mekanisme pasar dan investasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok dalam mendukung pengembangan bioetanol Brasil tidak semata-mata mencerminkan kompetisi ekonomi, tetapi juga menunjukkan bagaimana isu perubahan iklim dan energi terbarukan telah menjadi arena baru rivalitas geopolitik, di mana kerja sama digunakan sebagai instrumen untuk membangun pengaruh, membentuk tata kelola energi global, serta memperluas kepentingan strategis masing-masing negara.

Daftar Pustaka

- Araújo, W. A. 2016. Ethanol Industry: Surpassing Uncertainties and Looking Forward.
- Association, Renewable Fuels. 2025. Global Ethanol Production by Region. <https://ethanolrfa.org/markets-and-statistics/annual-ethanol-production>.
- Cassiano, Demostenes R., João Ribau, Francisco Sales A. Cavalcante, Mona Lisa M. Oliveira, and Carla M. Silva. 2016. “On-Board Monitoring and Simulation of Flex Fuel Vehicles in Brazil.” *Transportation Research Procedia* 14: 3129–38. doi:10.1016/j.trpro.2016.05.253.
- Keohane, Robert O, and Joseph S Nye. 1987. “Power and Interdependence Revisited.” *International Organization* 41(4): 725–753. doi:10.1017/S0020818300027661.
- de Mattos Fagundes, Paloma, Antonio Domingos Padula, and Ana Claudia Machado Padilha. 2016. “Interdependent International Relations and the Expansion of Ethanol Production and Consumption: The Brazilian Perspective.”

- Journal of Cleaner Production 133: 616–30.
doi:<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.05.006>.
- Nascimento, Ademir M, Liguang Liu, Silva Alves, and Pierre Oria. 2021. “Chinese Investment in the Northeast Region of Brazil: An Analysis about the Renewable Energy Sector.” Emerald Publishing Limited 28(4): 376–89.
doi:10.1108/REGE-12-2020-0147.
- Pramudianto, Andreas. 2016. “Dari Kyoto Protocol 1997 Ke Paris Agreement 2015 : Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global Dan Asean Menuju 2020.” Global: Jurnal Politik Internasional 18(1): 76–94.
doi:<https://doi.org/10.7454/global.v18i1.119>.
- Quantum. 2025. Chinese Officials Considering Brazil Ethanol for SAF Goals: Report.
<https://www.qcintel.com/biofuels/article/chinese-officials-considering-brazil-ethanol-for-saf-goals-report-46627.html>.
- Rubio, Tatiana Gélvez, and Juliana González Jáuregui. 2022. “Chinese Overseas Finance in Renewable Energy in Argentina and Brazil: Implications for the Energy Transition.” doi:10.1177/18681026221094852.
- Silva, Rebeca Fasioli, Maria do Socorro Mascarenhas, and Margareth Batistote. 2022. “Biomass: Bioethanol Transformation and Production Process.” Revista de Agricultura Neotropical 9(4).
doi:10.32404/rean.v9i4.7089.
- Souza, J.G.M Pompermayer, F.M. 2015. “Variações Do Preço Do Etanol Em Comparação Ao Preço Da Gasolina: Uma Análise Da Resposta Do Consumidor.” IPEA: 39.

- States, Organization of American. 2014. Biofuels Outreach Support of the Implementation of the U.S. – Brazil MOU for Biofuels Development. <http://www.globalbioenergy.org/>.
- UNCC. 2024. “Bioethanol Activities in Brazil Case Study. Good Practices and Lessons Learned on the Setup and Implementation of National Systems of Innovation.” : 1–28.
- York, Richard, and Shannon Elizabeth Bell. 2019. “Energy Transitions or Additions?: Why a Transition from Fossil Fuels Requires More than the Growth of Renewable Energy.” *Energy Research & Social Science* 51: 40–43. doi:<https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.01.008>.

Lambung Pangan dan Rumah Sakit di Afrika: Rivalitas Bantuan Pembangunan Kemanusiaan AS vs Tiongkok di Ethiopia

Assyfa Bestari

Pendahuluan

Dalam hubungan internasional saat ini, bantuan pembangunan tidak lagi dipandang hanya sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan. Banyak negara menggunakan bantuan sebagai instrumen untuk memperluas pengaruh politik, memperkuat hubungan diplomatic, serta meningkatkan kepentingan ekonomi di negara penerima. Melalui bantuan tersebut, negara donor dapat membangun citra positif sekaligus memperoleh posisi strategis dalam dinamika politik global. Oleh karena itu, bantuan pembangunan sering kali memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ethiopia merupakan salah satu contoh yang menunjukkan bagaimana bantuan pembangunan menjadi bagian dari persaingan pengaruh antarnegara besar. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Afrika dan memiliki posisi strategis di kawasan Tanduk Afrika, Ethiopia menjadi tujuan utama berbagai program bantuan internasional. Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan dua negara yang memiliki peran paling menonjol dalam memberikan bantuan kepada Ethiopia (Hackennes, 2020). Meskipun sama-sama bertujuan mendukung pembangunan, kedua negara menggunakan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Selama beberapa dekade, Amerika Serikat menempatkan Ethiopia sebagai salah satu penerima bantuan terbesar di kawasan Afrika Sub-Sahara. Bantuan AS lebih banyak diarahkan pada sektor Kesehatan, Pendidikan, bantuan kemanusiaan, serta program ketahanan pangan. Setelah meningkatnya kehadiran Tiongkok di Afrika, AS semakin memperkuat program-program sosial, seperti penanganan krisis kemanusiaan, pelayanan kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kovrigin, 2021). Di sisi lain, Tiongkok lebih berfokus pada pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui pinjaman dan investasi, seperti pembangunan jalan, jalur kereta api, kawasan industri, dan fasilitas publik yang bertujuan meningkatkan konektivitas ekonomi Ethiopia (Geda, 2019).

Perbedaan strategi tersebut menunjukkan bahwa bantuan pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai transfer dana atau sumber daya, tetapi juga menjadi alat untuk membangun pengaruh dan memperkuat posisi politik di negara penerima. Dalam konteks ini, istilah “lumbung pangan dan rumah sakit” dapat dipahami sebagai simbol dua bentuk utama bantuan pembangunan yang menjadi arena persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yaitu ketahanan pangan dan Kesehatan publik. Melalui kedua sektor tersebut, masing-masing negara berupaya memperoleh kepercayaan pemerintah dan masyarakat Ethiopia sekaligus memperluas pengaruhnya di kawasan Afrika. Fenomena ini menunjukkan bahwa bantuan pembangunan telah berkembang menjadi bagian dari strategi geopolitik yang digunakan negara-negara besar untuk mempertahankan dan memperluas kepentingannya di tingkat internasional (Gulrajani,

2017). Maka dari itu makalah ini berusaha menjawab sebuah pertanyaan yaitu bagaimana Ethiopia memposisikan diri sebagai aktor penerima bantuan di tengah kompetisi kepentingan AS dan Tiongkok?.

Pembahasan ini menggunakan pendekatan neo-Gramscian yang berangkat dari gagasan Antonio Gramsci tentang hegemoni, yaitu dominasi yang bertahan karena memperoleh persetujuan, bukan hanya karena paksaan. Dalam konsep ini, tatanan internasional dipahami sebagai hasil interaksi antara kekuatan material, institusi, dan ide-ide yang membentuk apa yang dianggap normal dan sah (Cox, 1983). Pendekatan neo-gramscian sangat relevan untuk topik ini karena dapat menganalisis bantuan pembangunan yang tidak hanya berorientasi melalui uang dan proyek, tetapi juga melalui produksi legitimasi dan narasi pembangunan.

Menurut Robert Cox, setiap teori selalu dibuat untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Dengan kata lain, bantuan pembangunan tidak hanya bertujuan membantu negara lain, tetapi juga dapat menjadi cara bagi negara donor untuk mempertahankan atau memperluas pengaruhnya (Cox, 1983). Dalam kasus Ethiopia, bantuan pembangunan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan, seperti negara donor, lembaga internasional, perusahaan yang mengerjakan proyek pembangunan, pemerintah Ethiopia, serta lembaga yang menentukan arah kebijakan pembangunan. Akibatnya, bantuan menjadi penghubung antara kepentingan negara donor dengan kebutuhan Ethiopia, tetapi hubungan tersebut tidak sepenuhnya seimbang karena pihak donor memiliki pengaruh yang lebih besar.

Perspektif neo-Gramscia juga menjelaskan bahwa negara penerima bantuan tidak selalu berada pada posisi yang pasif. Ethiopia tetap memiliki ruang untuk menentukan strategi dengan menjalin hubungan dengan lebih dari satu negara donor, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, sehingga dapat memanfaatkan persaingan di antara keduanya (Bieler, 2004). Strategi ini memungkinkan Ethiopia memperoleh manfaat yang lebih besar dari masing-masing pihak. Namun, kebebasan Ethiopia tetap memiliki batas karena negara tersebut masih bergantung pada bantuan luar negeri, pinjaman, dan pembiayaan internasional untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan pembangunan. Oleh sebab itu, posisi Ethiopia lebih tepat dipahami sebagai negara yang terus melakukan negosiasi dengan para donor, bukan sebagai negara yang sepenuhnya bebas menentukan kebijakannya sendiri.

Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di Ethiopia

Persaingan antara AS dan Tiongkok di Ethiopia dapat dilihat dari cara kedua negara memberikan bantuan pembangunan. Meskipun sama-sama mendukung pembangunan Ethiopia, keduanya memilih sektor yang berbeda sesuai dengan kepentingan masing-masing. Berdasarkan data AidData, Tiongkok menjadi salah satu donor dan pemberi pinjaman terbesar bagi Ethiopia selama periode 2000-2023 (Sickell, 2026). Bantuan Tiongkok sebagian besar digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya, jalur kereta api, pembangkit energi, dan jaringan komunikasi. Melalui proyek-proyek tersebut, Tiongkok berupaya meningkatkan konektivitas ekonomi sekaligus memperkuat hubungan jangka panjang dengan Ethiopia. Sementara itu, Amerika Serikat lebih

memusatkan bantuannya pada sektor kemanusiaan, Kesehatan, Pendidikan, dan program sosial (Hackennes, 2020). Pada tahun 2045, AS bahkan mengumumkan tambahan bantuan kemanusiaan senilai hampir 154 juta USD untuk membantu Ethiopia menghadapi dampak konflik, krisis pangan, dan perubahan iklim. Bantuan tersebut menunjukkan komitmen AS dalam mendukung kebutuhan dasar masyarakat, terutama pada saat terjadi kondisi darurat (USAID., 2024).

Meski dikenal sebagai pembangun infrastruktur, peran Tiongkok di Ethiopia tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi. Tiongkok juga memberikan bantuan di bidang kesehatan, seperti mengirim tenaga medis, membangun rumah sakit, serta menyediakan vaksin dan peralatan Kesehatan (Brown, 2021). Langkah ini menunjukkan bahwa Tiongkok tidak hanya ingin memperkuat pengaruh ekonominya, tetapi juga membangun citra sebagai mitra pembangunan yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat Ethiopia.

Di sisi lain, Amerika Serikat terus mempertahankan posisinya sebagai penyedia bantuan kemanusiaan terbesar. Dalam kebijakan resminya, bantuan tersebut bertujuan menyelamatkan nyawa, meningkatkan ketahanan pangan, dan membantu masyarakat yang terdampak konflik maupun bencana (CRS, 2022). Namun, jika dilihat dari perspektif neo-gramscian, bantuan kemanusiaan juga memiliki dimensi politik. Melalui bantuan tersebut, AS berusaha mempertahankan pengaruh dan kepemimpinannya dalam tatanan internasional, terutama ketika pengaruh Tiongkok semakin berkembang di Afrika. Dengan demikian, persaingan antara AS dan Tiongkok di Ethiopia tidak hanya terjadi melalui pembangunan fisik dan investasi, tetapi

juga melalui upaya membangun kepercayaan, legitimasi, dan citra sebagai mitra pembangunan yang paling mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lambung Pangan dan Rumah Sakit

Istilah “lungbuq pangan” dan “rumah sakit” dalam makalah ini digunakan sebagai simbol dari dua bentuk bantuan pembangunan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu ketahanan pangan dan layanan Kesehatan. Lungbuq pangan melambangkan upaya untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap makanan yang cukup, menjaga stabilitas sosial, dan meningkatkan kesejahteraan. Sementara itu, rumah sakit melambangkan pelayanan Kesehatan yang bertujuan melindungi masyarakat dari penyakit serta meningkatkan kualitas hidup. Kedua sektor ini sangat penting bagi Ethiopia karena negara tersebut masih menghadapi konflik, kemiskinan, dan dampak perubahan iklim yang menyebabkan tingginya kebutuhan akan bantuan kemanusiaan (UNOCHA., 2024).

Amerika Serikat menyalurkan bantuan melalui USAID (*United States Agency for International Development*) yang bekerja sama dengan *World Food Programme* (WFP) untuk mengatasi krisis pangan parah di Ethiopia akibat kombinasi Krisis iklim, konflik, dan guncangan ekonomi. Melalui kemitraan ini, WFP secara bertahap memperluas jangkauan bantuan pangan darurat dan makanan bergizi khusus bagi jutaan masyarakat yang paling rentan, terutama di wilayah terdampak seperti Tigray. Amhara, Afar, dan Somali. Bantuan ini terbukti krusial dalam mencegah bencana kemanusiaan yang lebih besar, memitigasi resiko kelaparan, serta mendukung perbaikan gizi bagi jutaan anak-

anak serta ibu hamil dan menyusui di kawasan tersebut (WFP, 2024).

Program bantuan pangan AS berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, yaitu bantuan yang diberikan agar masyarakat tetap dapat bertahan hidup pada saat terjadi keadaan darurat. Namun, bantuan ini lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Sebagian besar pangan yang dibagikan merupakan hasil produksi dari Amerika Serikat dan diberikan secara gratis kepada masyarakat Ethiopia (Clapp, 2012). Meskipun efektif dalam mengatasi krisis, bantuan ini juga memiliki kelemahan. Jika bantuan pangan terus diberikan dalam jumlah besar, harga hasil pertanian lokal dapat menurun karena masyarakat lebih memilih pangan gratis. Kondisi tersebut dapat mengurangi pendapatan petani Ethiopia dan membuat mereka kurang termotivasi untuk meningkatkan produksi. Akibatnya, Ethiopia beresiko semakin bergantung pada bantuan luar negeri setiap kali terjadi krisis pangan (Tschirley, 2010).

Berbeda dengan AS, Tiongkok tidak berfokus pada pemberian bantuan pangan darurat. Sebaliknya, Tiongkok membantu Ethiopia meningkatkan kemampuan produksi pertanian melalui pembangunan *Agricultural Technology Demonstration Center* (ATDC) atau pusat percontohan teknologi pertanian, salah satunya di wilayah Oromia. Melalui pusat tersebut, para ahli dari Tiongkok memperkenalkan berbagai teknologi pertanian, seperti benih padi hibrida, sistem irigasi yang lebih hemat air, penggunaan mesin pertanian, serta pelatihan bagi petani (Gubo, 2019). Tujuannya adalah agar Ethiopia mampu meningkatkan hasil pertanian dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pangan dari luar negeri.

Meskipun demikian, pendekatan Tiongkok juga memiliki beberapa keterbatasan. Teknologi yang diperkenalkan memerlukan biaya yang cukup besar karena membutuhkan mesin, pupuk, dan peralatan yang sebagian besar masih didatangkan dari Tiongkok. Selain itu, program ini lebih banyak diterapkan pada proyek pemerintah atau pertanian berskala menengah dan besar, sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh petani kecil yang paling berdampak oleh kekeringan dan kemiskinan.

Implikasi bagi Ethiopia

Kompetisi antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok dalam memberikan bantuan pembangunan membawa dampak yang besar bagi Ethiopia. Bantuan yang diberikan kedua negara tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperluas pengaruh politik dan ekonomi di kawasan Afrika (Hackennes, 2020). Bagi Ethiopia, kondisi ini memberikan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, persaingan tersebut membuka kesempatan bagi pemerintah Ethiopia untuk memperoleh lebih banyak bantuan dan investasi guna mempercepat pembangunan. Di sisi lain, ketergantungan terhadap bantuan luar negeri juga dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti meningkatnya beban utang, pengaruh politik dari negara donor, serta kesulitan dalam mengoordinasikan berbagai program pembangunan yang berasal dari sumber yang berbeda.

Salah satu keuntungan utama dari persaingan antara AS dan Tiongkok adalah bertambahnya pilihan bagi Ethiopia dalam memenuhi kebutuhan pembangunannya. Pemerintah Ethiopia tidak harus bergantung pada satu negara saja, tetapi dapat

memanfaatkan keunggulan yang dimiliki masing-masing donor (Kovrigin, 2021). Tiongkok lebih banyak mendukung pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya, jalur kereta api, pembangkit listrik, rumah sakit, dan pusat penelitian pertanian. Infrastruktur tersebut menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi karena dapat memperlancar distribusi barang, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik, serta mendorong kegiatan produksi. Sementara itu, Amerika Serikat lebih berfokus pada bantuan kemanusiaan, kesehatan, ketahanan pangan, dan penanggulangan bencana. Melalui program-program tersebut, AS membantu Ethiopia menghadapi dampak konflik, kekeringan, kelaparan, dan wabah penyakit. Kombinasi bantuan dari kedua negara memberikan manfaat yang cukup besar karena Ethiopia memperoleh dukungan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek sekaligus membangun kapasitas pembangunan jangka panjang.

Namun, berbagai manfaat tersebut juga disertai dengan tantangan yang tidak kecil. Sebagian besar proyek infrastruktur yang didukung Tiongkok dibiayai melalui pinjaman. Meskipun pinjaman tersebut memungkinkan Ethiopia membangun berbagai fasilitas penting, pemerintah tetap harus mengembalikan dana tersebut di masa depan. Jika pertumbuhan ekonomi melambat atau kondisi politik dalam negeri tidak stabil, pembayaran utang dapat menjadi beban yang berat bagi keuangan negara (Geda, 2019). Oleh karena itu, Ethiopia harus mampu mengelola pembiayaan luar negeri secara hati-hati agar pembangunan yang dilakukan tidak justru menimbulkan masalah ekonomi pada masa mendatang.

Selain risiko utang, Ethiopia juga masih menghadapi ketergantungan yang cukup besar terhadap bantuan kemanusiaan dari Amerika Serikat dan berbagai organisasi internasional. Bantuan pangan, obat-obatan, dan layanan kesehatan memang sangat membantu masyarakat ketika terjadi krisis akibat konflik, kekeringan, maupun perubahan iklim. Akan tetapi, ketergantungan yang terus-menerus terhadap bantuan darurat dapat mengurangi kemampuan negara untuk membangun sistem ketahanan pangan dan kesehatan yang mandiri (Barrett, 2005). Dalam beberapa situasi, bantuan luar negeri juga dapat dipengaruhi oleh hubungan politik antara negara donor dan pemerintah Ethiopia. Misalnya, ketika terjadi perbedaan pandangan mengenai demokrasi atau hak asasi manusia, bantuan dapat dikurangi atau ditunda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bantuan pembangunan tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan politik.

Perbedaan pendekatan antara AS dan Tiongkok juga menjadi tantangan tersendiri bagi Ethiopia. Amerika Serikat lebih menekankan bantuan sosial dan kemanusiaan, seperti distribusi pangan, peningkatan layanan kesehatan, pelatihan tenaga medis, dan perlindungan masyarakat yang terdampak bencana. Sebaliknya, Tiongkok lebih mengutamakan pembangunan fisik melalui proyek infrastruktur, penggunaan teknologi pertanian, pembangunan rumah sakit, serta penyediaan peralatan medis. Di sektor pertanian, AS lebih banyak memberikan bantuan pangan darurat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang mengalami krisis, sedangkan Tiongkok berupaya meningkatkan kemampuan produksi pertanian melalui penggunaan benih unggul, sistem irigasi, dan mekanisasi pertanian. Perbedaan

strategi tersebut mengharuskan pemerintah Ethiopia memiliki kemampuan yang baik dalam mengoordinasikan berbagai program agar saling melengkapi dan tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Ethiopia. Apabila pemerintah mampu memanfaatkan bantuan dari kedua negara secara seimbang, Ethiopia dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, jika bantuan tersebut tidak dikelola dengan baik, Ethiopia berisiko menghadapi masalah seperti meningkatnya beban utang, ketergantungan terhadap bantuan luar negeri, dan semakin besarnya pengaruh negara donor terhadap arah pembangunan nasional. Dari perspektif Neo-Gramscian, kondisi ini menunjukkan bahwa Ethiopia memang memiliki ruang untuk memilih dan bernegosiasi dengan para donor, tetapi ruang gerak tersebut tetap dibatasi oleh struktur hubungan internasional yang masih didominasi oleh kepentingan negara-negara besar. Oleh karena itu, keberhasilan Ethiopia tidak hanya bergantung pada besarnya bantuan yang diterima, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam mengelola persaingan tersebut agar benar-benar mendukung kepentingan dan pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

- Barrett, C. B. (2005). Food aid after fifty years: Recasting its role. Routledge.
- Clapp, J. (2012). Hunger in the balance: The new politics of international food aid. Cornell University Press.
- Bieler, A. &. (2004). heoretical and methodological challenges of neo-Gramscian perspectives in International Political Economy. *International Relations*, 18(1), 85-113.
- Brown, S. (2021). The geopolitics of health aid: US and Chinese health diplomacy in Sub-Saharan Africa. *Global Public Health*, 16(8), 1245-1259. Retrieved from *Global Public Health*, 16(8).
- Cox, R. W. (1983). Gramsci, hegemony and international relations: An essay in method. *Millennium: Journal of International Studies*, 12(2), 162-175.
- Geda, A. &. (2019). The trade and development impact of China and India on Ethiopia. *African Development Review*, 31(3), 322-336.
- Gubo, Q. L. (2019). China's agricultural technology demonstration centers in Africa: The case of Ethiopia. *Development Policy Review*, 37(S2), 241-257.
- Gulrajani, N. (2017). Bilateral donors and the 'age of geopolitics': Foreign aid in a multipolar world. ODI Working Paper, 502, 1-28.
- Hackennes, M. (2020). Aid rivalry in the Horn of Africa: China and the US approach in Ethiopia. *Journal of International Development*, 32(5), 780-795.
- Kovrigin, E. (2021). Development assistance as an instrument of foreign policy: A comparative study of US and Chinese aid to Ethiopia. *Third World Quarterly*, 42(8), 1740-1758.

- Tschirley, D. &. (2010). Exploring the logic behind the food aid–food production debate: Empirical evidence from Eastern and Southern Africa. *Agricultural Economics*, 41(3-4), 231-250.
- CRS, C. R. (2022). Ethiopia: Background and U.S. policy (CRS Report No. R46920). U.S. Library of Congress.
- Sickell, J. a. (2026). Ethiopia: Chinese Development Finance, 2000-2023. Williamsburg: VA: AidData at William & Mary.
- UNOCHA. (2024). Ethiopia: Humanitarian Response Plan 2024. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
- USAID. (2024, April 16). United States Provides Nearly \$154 Million in Additional Humanitarian Assistance for the People of Ethiopia. Retrieved from press@usaid.gov: <https://reliefweb.int/report/ethiopia/united-states-provides-nearly-154-million-additional-humanitarian-assistance-people-ethiopia>
- WFP. (2024, February 06). WFP ramps up deliveries of vital food assistance to drought and conflict-affected areas of Ethiopia. Retrieved from World Food Programme: <https://www.wfp.org/news/wfp-ramps-deliveries-vital-food-assistance-drought-and-conflict-affected-areas-ethiopia>

Keamanan dan Pembangunan dalam Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok: Studi Kasus Djibouti

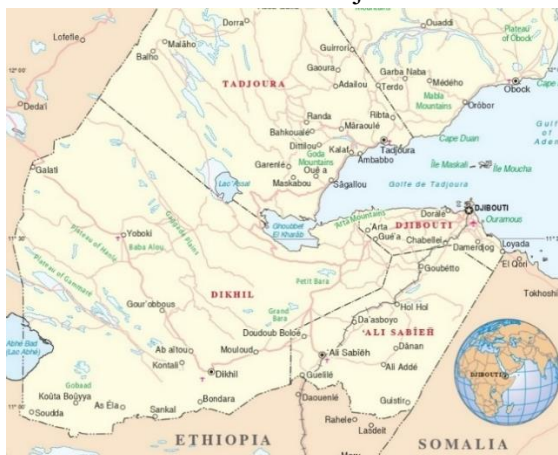
Sekar Putri Maharani

Pendahuluan

Djibouti merupakan salah satu negara terkecil di benua Afrika yang memiliki lokasi geografis yang strategis. Walaupun Djibouti memiliki kelemahan dalam sumber daya alam, Djibouti dianggap sebagai negara strategis bagi rivalitas *global power* dikarenakan letak geografisnya (Lawale & Ahmad, 2023). Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki rivalitas di wilayah Djibouti (Styan, 2022). Sebagai tuan rumah bagi beberapa pangkalan militer asing, Djibouti tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga meningkatkan relevansi geopolitiknya yang mampu memengaruhi sekuritas global (Kamski & Schröder, 2025). Djibouti terletak pada kawasan Tanduk Afrika, yaitu berbatasan langsung dengan Selat Bab el-Mandeb. Selat Bab el-Mandeb merupakan selat yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden yang merupakan bagian dari Samudra Hindia. Selat Bab el-Mandeb merupakan rute paling singkat untuk Laut Mediterania menuju Samudra Hindia. Selain berperan sebagai jalur perdagangan internasional yang strategis, Selat ini dilalui oleh sebagian besar perdagangan energi global, termasuk mobilitas minyak dari Timur Tengah menuju Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. Posisi geografis ini kemudian menjadikan Djibouti memiliki nilai strategis yang signifikan dalam aspek keamanan, perdagangan internasional, hingga arena rivalitas *global power*.

Badawi (2024) berpendapat bahwa kontrol letak geografis Djibouti pada jalur strategis *chokepoint* di Selat Bab el-Mandeb dapat memberikan suatu negara pengaruh yang sangat besar terhadap jalur perdagangan dunia. Dipahami bahwa dari seluruh *chokepoint* yang ada di dunia, Selat Bab el-Mandeb merupakan jalur paling strategis dan krusial bagi keamanan pangan global (Alexandre, 2021). Teluk Alden merupakan jalur perdagangan yang krusial bagi perdagangan minyak bumi oleh Semenanjung Arab. Diketahui 6,2 juta barel minyak bumi mentah dan olahan melewati Selat Bab el-Mandeb menuju Eropa, Asia, serta Amerika Serikat dalam kurun waktu satu tahun pada 2018. Selat tersebut juga merupakan salah satu jalur maritim terpenting bagi aspek sekuritas global. Djibouti merupakan salah satu dari tujuh *chokepoints* yang paling penting dalam sekuritas maritim. Lokasi geografis ini meningkatkan nilai strategis Djibouti dalam aspek sekuritas dan ekonomi. Hal tersebut membuatnya mampu menarik perhatian negara-negara *global power*:

Gambar 1 Peta Djibouti



Sumber: (United Nations, 2020)

Posisi strategis Djibouti mampu menyeimbangkan kompetisi kawasan intra-arab di tengah tekanan politik dan logistik yang terjadi di kawasan Tanduk Afrika (Styan, 2022). Djibouti memiliki kekuatan politik yang didapat dari pengawasan negara-negara *global power* pada jalur perdagangan di wilayahnya. Kelebihan geografis Djibouti mampu menarik perhatian negara-negara *global power*, khususnya Amerika Serikat dan Tiongkok. Djibouti telah menjadi arena rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok secara signifikan sejak tahun 2015. Terlebih ketika Tiongkok mendirikan pangkalan militernya pada tahun 2017. Djibouti merupakan tuan rumah dari pangkalan militer Amerika Serikat dan Tiongkok sekaligus. Selain itu, terdapat pula pangkalan militer Jepang, Prancis, Italia, Jerman, Britania Raya serta Uni Eropa. Tak hanya mendirikan pangkalan militer, Amerika Serikat dan Tiongkok juga memiliki proyek-proyek pembangunan di Djibouti. Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki model pembangunan yang sangat berbeda. Amerika Serikat memiliki konsensus Washington sebagai syarat untuk melakukan kerja sama pembangunan, sedangkan Tiongkok memiliki konsensus Beijing yang dinilai tidak terlalu mengikat untuk memulai kerja sama pembangunan.

Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok tidak hanya tercermin pada aspek militer, tetapi juga tercermin pada aspek pembangunan dan pendekatan pembangunan. Kedua negara berupaya untuk membentuk pembangunan Djibouti. Melalui Konsensus Washington, Amerika Serikat menekankan reformasi institusi dan tata kelola sebagai fondasi keamanan dan pembangunan, sedangkan Tiongkok dengan Konsensus Beijing mengaitkan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan

ekonomi dengan aspek keamanan. Konsep *security-development nexus* (SDN) memahami bahwa terdapat keterkaitan antara pembangunan dan keamanan, di mana keterkaitan tersebut telah bergeser. SDN menggeser agenda pembangunan murni menuju instrumen kepentingan negara donor. Djibouti berperan sebagai arena rivalitas di mana kedua konsensus terjadi secara bersamaan dan membentuk hubungan antara keamanan dan pembangunan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menganalisis hubungan antara keamanan dan pembangunan dalam rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di Djibouti. Penulis berargumen bahwa pembangunan dan keamanan saling berkaitan dan dapat digunakan sebagai instrumen rivalitas geopolitik.

Konsep Keterkaitan Sekuritas dan Pembangunan

Konsep *security-development nexus* (SDN) atau keterkaitan antara sekuritas dan pembangunan mempercayai bahwa tujuan kebijakan sekuritas dan pembangunan merupakan dua hal yang sangat berkaitan dan perlu dilakukan secara linier. Konsep ini telah menjadi tren dalam kebijakan perdamaian internasional sejak tahun 1990-an. Konsep ini telah menjadi pokok dalam kerja sama bilateral maupun asistensi organisasi internasional pada negara berkembang. Konsep SDN memahami bahwa kemajuan dalam pembangunan dapat memperkuat keamanan dan sebaliknya. Pengelolaan konflik dan keamanan harus dilakukan secara bersamaan untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan.

Kebijakan pembangunan barat telah mengalami sekuritisasi, di mana agenda pembangunan yang “murni” berfokus pada penanggulangan kemiskinan telah diarahkan untuk mendukung

kepentingan keamanan pihak donor (Walton & Johnstone, 2024). Hal ini berarti bantuan pembangunan digunakan sebagai instrumen untuk mewujudkan kepentingan *hard security* negara donor yang berupa pencegahan konflik, stabilitasi kawasan rawan, hingga perlindungan terhadap ancaman transnasional. Agenda pembangunan kini dipengaruhi oleh prioritas kepentingan geopolitik dan sekuritas negara donor. Sekuritisasi pembangunan menimbulkan benturan antara tujuan sosial dan tujuan strategis negara donor.

Djibouti dalam Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok

Amerika Serikat telah mendirikan pangkalan militernya di Djibouti selama lebih dari dua dekade. Eksistensi militer Amerika Serikat di Djibouti dimulai pada September 2003, ketika Amerika Serikat mendirikan fasilitas medis bagi ekspedisi angkatan lautnya. Fasilitas tersebut kemudian ditingkatkan secara bertahap dari pos hingga menjadi garnisun dalam kurun waktu dua dekade. Peningkatan fasilitas tersebut mencerminkan pergeseran eksistensi militer Amerika dari kehadiran *soft military* menuju tindakan impor strategi militer (Sun & Zoubir, 2016). Amerika memiliki agenda anti-terorisme, anti-proliferasi, perlindungan investasi energi, dan anti-perompak di Djibouti. Tak hanya kepentingan militer, Amerika Serikat juga memiliki kepentingan rivalitas. Amerika Serikat meningkatkan keterlibatan diplomatis, ekonomi, serta militernya setelah pengaruh Tiongkok meningkat di Djibouti (Ahmed & Hough, 2025).

Agenda Pembangunan Amerika di Djibouti berfokus pada bantuan kemanusiaan, ketersediaan energi dan air minum, pendidikan, hingga pengembangan tenaga kerja. Walaupun

terdapat beberapa agenda pembangunan, namun tidak terdapat bukti langsung mengenai total pendanaan Amerika Serikat di Djibouti. Selain pangkalan militer, Amerika Serikat memposisikan Djibouti sebagai pusat bantuan kemanusiaan regional bagi Asia dan Afrika (Çalışkan & Aliyev, 2023). Melalui gudang pangan pra-posisi milik *The Humanitarian Bureau* (BHA) dalam *US Agency for International Development* (USAID), Djibouti menjadi pusat bantuan kemanusiaan untuk melakukan respons cepat. Badan Amerika tersebut kemudian menjamin ketersediaan listrik dan air minum bagi masyarakat Djibouti.

Tak hanya itu, pada tahun 2021, BHA USAID memberikan pendanaan sebesar 8,5 miliar USD untuk mendukung pemulihan ekonomi pengungsi, pemrograman sistem pasar, bantuan pangan dan nutrisi, hingga koordinasi manajemen informasi di Djibouti. Amerika Serikat juga mendukung *The Ministry of Education and Professional Development* (MENFOP) Djibouti bagi program peningkatan standar pendidikan dasar melalui pendanaan penuh. Pendanaan tersebut sebagian disalurkan melalui peningkatan kurikulum membaca bagi 55.000 siswa sekolah dasar, Pendanaan termasuk untuk menghadirkan tenaga *pre-service* dan guru *in-service*. Tak hanya bagi sekolah dasar, Amerika Serikat juga memprioritaskan program edukasi vokasi, membina hubungan berkelanjutan antara pusat pendidikan vokasi dan penyedia lapangan kerja, serta meningkatkan layanan penempatan kerja.

Djibouti merupakan tuan rumah pangkalan militer luar negeri Tiongkok pertama yang merupakan fasilitas pasukan perdamaian Tiongkok. Pasukan perdamaian tersebut merupakan

instrumen untuk mengonfrontasi kelompok teroris dan memerangi perompak. Selain itu, kepentingan Tiongkok di Djibouti adalah untuk mengamankan pasokan minyak bumi. Djibouti merupakan bagian dari Jalur Sutra maritim yang strategis. Tiongkok berupaya melakukan inaugurasi jalur tersebut sebagai salah satu bentuk implementasi strategi sekuritas maritim Tiongkok (Badawi, 2024). Dalam kerangka strategi sekuritas maritim, Tiongkok juga melakukan perlindungan terhadap lingkungan maritim, kerja sama pembangunan, aliansi sekuritas maritim, promosi terhadap riset dan inovasi sains maritim, hingga tata kelola maritim. Tiongkok meningkatkan perannya untuk melindungi pengaruhnya di Djibouti. Tak hanya itu, Tiongkok juga berupaya melakukan *balancing* terhadap pengaruh Amerika Serikat pada kawasan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperkuat posisinya sebagai *global power* yang signifikan dalam tata kelola global (Ahmed & Hough, 2025).

Dalam sektor ekonomi, eksistensi Tiongkok menjadi sangat penting bagi sektor logistik Djibouti. Tiongkok memiliki agenda pembangunan *Belt and Road Initiative* (BRI) atau *One Belt One Road* (OBOR). Melalui kerangka BRI, Tiongkok menjalin kerja sama dan mendanai pembangunan infrastruktur di Djibouti. BRI direncanakan akan menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Samudra Hindia. Kerangka BRI ditujukan untuk meningkatkan konektivitas dan pembangunan infrastruktur, serta memimpin transformasi struktural bagi negara-negara mitra. BRI diharapkan dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memfasilitasi perdagangan, meningkatkan *foreign direct investment* (FDI), meningkatkan

taraf hidup masyarakat, serta meningkatkan integrasi regional. Maka dari itu BRI memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pembangunan ekonomi pada negara-negara yang bersangkutan (Haggai, 2016). BRI merupakan salah satu instrumen Tiongkok untuk meningkatkan pengaruh politik dan ekonomi.

Kerja sama Djibouti dengan Tiongkok dilakukan dengan tujuan membangun proyek infrastruktur strategis seperti 1) *Djibouti International Free Trade Zone* (DIFTZ), 2) Pelabuhan multiguna Doraleh, 3) Jalur kereta api Addis Ababa-Djibouti, 4) Ekspansi Pelabuhan Garam *Ghoubet*, 5) Saluran air yang menghubungkan Djibouti dan Ethiopia, 6) Ekspansi pada pelabuhan yang merupakan titik akhir jalur kereta Ethiopia-Djibouti, 7) Pelabuhan ekspor hewan ternak *Damerjog*. Investasi Tiongkok pada proyek-proyek infrastruktur seperti pelabuhan, jalur kereta api, hingga DIFTZ memiliki potensi untuk meningkatkan konektivitas transnasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. BRI menggunakan pinjaman, perdagangan, serta investasi pada infrastruktur dan manufaktur untuk meningkatkan pengaruh Tiongkok. Kerja sama jangka panjang dalam kerangka BRI memungkinkan bangkitnya dominasi Tiongkok dalam ekonomi negara-negara mitra. Dalam kerangka BRI, Djibouti mengalami gagal bayar yang kemudian menghasilkan persetujuan pembangunan pangkalan militer luar negeri Tiongkok pertama.

Pendekatan Amerika Serikat dan Tiongkok

Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki model pendekatan pembangunan yang berbeda. Walaupun keduanya ditujukan untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan, namun

terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Model pembangunan Amerika Serikat disalurkan melalui Konsensus Washington dan model pembangunan Tiongkok disalurkan melalui Konsensus Beijing. Konsensus Washington dipandang sebagai pendekatan *one-size-fits-all*, di mana seluruh negara perlu melakukan reformasi liberalisasi terlepas dari situasi negaranya. Konsensus Washington berfokus pada stabilitas (terutama stabilitas harga), liberalisasi, dan privatisasi. Hal ini dapat menghasilkan efek yang berbeda pada beberapa negara. Misalnya, pada negara-negara *global south*, konsensus ini sering berefek menurunkan GDP dan deindustrialisasi (Caravani & Labini, 2025). Karena itulah, Konsensus Beijing hadir sebagai alternatif. Konsensus Beijing lebih berfokus pada *state-led development* dan investasi strategis. Konsensus Beijing tidak merekomendasikan reformasi secara singkat, melainkan lebih bertahap dan pragmatis. Berlawanan dengan Konsensus Washington yang lebih mendorong liberalisasi, Konsensus Beijing merekomendasikan intervensi negara yang sebesar-besarnya pada ekonomi (Saray, 2019). Intervensi diarahkan untuk menarik *foreign direct investment* (FDI) dan mengarahkannya pada sektor-sektor strategis

Tabel 1 Perbandingan Pendekatan Amerika Serikat dan Tiongkok

	Peran Negara	Reformasi Institusi	Model Reformasi	Fokus Utama
Konsensus Washington	Lemah	Cepat	Liberalisasi	Stabilitas harga, liberalisasi, privatisasi
Konsensus Beijing	Kuat	Bertahap	Pragmatis	Infrastruktur, peningkatan ekonomi

Sumber: data diolah oleh penulis dari (Saray, 2019)

Perbedaan model pendekatan Amerika Serikat dan Tiongkok tercermin pada agenda pembangunan di Djibouti. Amerika Serikat mempertahankan eksistensi militer yang signifikan sebagai instrumen proyeksi kekuatan. Tak hanya itu, sejak menguatnya eksistensi Tiongkok di Djibouti, Amerika juga meningkatkan eksistensinya di Djibouti melalui bantuan pembangunan. Agenda pembangunan Amerika berfokus pada bantuan kemanusiaan, ketersediaan energi dan air minum, reformasi pendidikan, hingga pengembangan tenaga kerja. Berbeda dengan Amerika Serikat, Tiongkok lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur di Djibouti. Menurut konsep SDN, pembangunan dan keamanan merupakan agenda yang harus berjalan bersamaan. Amerika Serikat dengan model pendekatan Konsensus Washington berfokus pada reformasi institusi dan stabilitas keamanan bagi Djibouti. Di sisi lain, Konsensus Beijing milik Tiongkok lebih berfokus pada infrastruktur bagi peningkatan sekuritas dan ekonomi untuk pembangunan Djibouti. Di balik itu, agenda pembangunan Amerika Serikat merupakan instrumen untuk mempertahankan pengaruhnya di Djibouti, sedangkan Tiongkok menggunakan pendanaan infrastruktur untuk memperkuat pengaruh ekonominya di Djibouti, yang kemudian diperluas ke aspek militer.

Kesimpulan

Keamanan dan pembangunan memiliki keterkaitan dan dapat digunakan sebagai instrumen rivalitas geopolitik. Hal tersebut tercermin pada kasus rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di Djibouti. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok membawa keuntungan bagi Djibouti, terutama pada aspek ekonomi dan politik. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok memperkuat

peran Djibouti dalam tata kelola global. Tak hanya itu, melalui agenda anti-perompakan, keamanan Djibouti terjaga mengingat terdapat sejumlah kasus perompakan di sekitar kawasan tersebut. Djibouti, yang merupakan negara kecil yang memiliki kelemahan pada sumber daya alam, menjadi arena rivalitas yang membentuk tata kelola global. Amerika Serikat dan Tiongkok berusaha melakukan kontrol pada kawasan Selat Bab el-Mandeb yang signifikan bagi sektor ekonomi maupun keamanan global.

Sesuai dengan pergeseran konsep SDN, donor cenderung memberikan bantuan pembangunan untuk mendukung kepentingan keamanan negara donor. Amerika Serikat memanfaatkan bantuan pembangunan untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan strategis Selat Bab el-Mandeb, sedangkan Tiongkok melalui kerangka BRI menggunakan bantuan pembangunan infrastruktur untuk memperluas pengaruh militernya. Fenomena tersebut mencerminkan bahwa bantuan pembangunan tidak selalu bersifat netral, melainkan dapat bersifat pragmatis. Kedua negara memberikan manfaat pembangunan pada Djibouti, namun hal tersebut tidak semata-mata untuk peningkatan pembangunan di Djibouti melainkan terdapat tujuan strategis di dalamnya. Fenomena ini berpotensi menghadirkan paradoks pada keamanan kawasan, apabila terdapat konflik yang signifikan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kawasan ini juga dapat menjadi arena bagi konflik tersebut.

Daftar Pustaka

- Ahmed, F., & Hough, P. (2025). The Horn of Africa and great power rivalry. In *International Security Studies: Theory and Practice*, Third Edition (pp. 399–407). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781032641089-35>
- Alexandre, A. G. (2021). THE STRAIT OF BAB EL-MANDEB: STAGE OF GEOPOLITICAL DISPUTES. *Janus.Net*, 12(2), 58–74. <https://doi.org/10.26619/1647-7251.12.2.5>
- Badawi, H. (2024). Chinese Geoeconomics and Geostrategic Motives in a Changing International Order: Understanding the Significance of a Chinese Military Base in Djibouti. *International Journal of Politics and Security*, 6(1), 67–99. <https://doi.org/10.53451/IJPS.1401481>
- Bortnik, R. (2024). Political Evolution of the Washington and Beijing Consensus: Models of Globalization. *Ukrainian Policymaker*, 14. <https://doi.org/10.29202/UP/14/1>
- Çalışkan, G., & Aliyev, P. (2023). HOW DOES THE GEOPOLITICAL POSITION OF DJIBOUTI INFLUENCE ITS RELATIONS WITH GREAT POWERS? *Diplomasi ve Strateji Dergisi*, 4(2), 190–229. <https://doi.org/10.58685/DSD.1363485>
- Caravani, M., & Labini, F. S. (2025). China and the challenge to western scientific and technological hegemony[La Cina e la sfida al primato scientifico e tecnologico occidentale]. *Moneta e Credito*, 78(311), 271–292. <https://doi.org/10.13133/2037-3651/19012>
- Kamski, B., & Schröder, G. (2025). The gate of the Horn: The political economy of Djibouti in a shifting regional context. In *The Horn of Africa Since 2018: Continuities,*

- Transformations, and Prospects (pp. 257–272). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003531999-19>
- Lawale, S., & Ahmad, T. (2023). The Role of Small States in Power Contestations in the Horn of Africa Case Study of Djibouti. *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, 17(4), 325–340. <https://doi.org/10.1080/25765949.2023.2300581>
- Saray, M. (2019). Washington Consensus, Neo-Liberalism and Beyond: Does Beijing Consensus Break the Routine? *Journal of Yasar University*, 14, 299–317.
- Schmidt, C., & Johnson, J. (2005). Deployment of a Navy expeditionary medical facility to the Horn of Africa. *Disaster Management and Response*, 3(1), 17–21. <https://doi.org/10.1016/j.dmr.2004.10.006>
- Sun, D., & Zoubir, Y. H. (2016). The eagle's nest in the Horn of Africa: US military strategic deployment in Djibouti[Das adlernest am Horn von Afrika: Der us-stützpunkt in Dschibuti]. *Africa Spectrum*, 51(1), 111–124. <https://doi.org/10.1177/000203971605100107>
- Walton, O., & Johnstone, A. (2024). The fragmentation of the security-development nexus: the UK government's approach to security and development 2015-2022. *Peacebuilding*, 12(3), 429–444. <https://doi.org/10.1080/21647259.2023.2291920>

Kekuatan, Kelemahan, dan Masa Depan Kompetisi Pembangunan Amerika Serikat dan Tiongkok: Kontestasi Model Pembangunan dan Kepemimpinan Global

Alyaa Shaafiyah Arrasyid

Pendahuluan

Perubahan distribusi kekuatan global dalam dua dekade terakhir telah mendorong munculnya dinamika baru dalam studi pembangunan internasional. Jika pada era pasca-Perang Dingin pembangunan lebih banyak dipahami sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan melalui bantuan luar negeri, reformasi ekonomi, dan penguatan institusi, maka saat ini pembangunan telah berkembang menjadi salah satu arena utama kompetisi antarkekuatan besar. Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak lagi hanya berlangsung dalam bidang militer atau perdagangan, tetapi juga melalui berbagai instrumen pembangunan yang bertujuan membangun pengaruh politik, ekonomi, dan institusional di tingkat global (Nye, 2004; Blackwill & Harris, 2016). Kebangkitan ekonomi Tiongkok telah mengubah lanskap pembangunan internasional yang sebelumnya didominasi oleh negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Melalui pendekatan pembangunan yang berorientasi pada investasi, pembangunan infrastruktur, serta prinsip non-interference terhadap urusan domestik negara mitra, Tiongkok berhasil memperluas pengaruhnya di berbagai kawasan, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin (Rolland, 2017). Di sisi lain, Amerika Serikat tetap mempertahankan posisinya sebagai aktor utama dalam tata kelola pembangunan

global melalui kepemimpinan pada berbagai institusi internasional, promosi prinsip demokrasi dan good governance, serta dukungan terhadap pembangunan berbasis aturan internasional (Ikenberry, 2018).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai proses ekonomi atau sosial. Sebaliknya, pembangunan telah menjadi instrumen strategis dalam membangun legitimasi, memperluas pengaruh, dan membentuk preferensi negara lain. Dengan kata lain, pembangunan telah menjadi bagian dari persaingan geopolitik abad ke-21. Fenomena ini terlihat dari semakin banyaknya negara berkembang yang menjadi tujuan investasi, bantuan pembangunan, maupun kerja sama strategis dari kedua negara. Dalam konteks tersebut, negara-negara Global South tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga aktor yang memiliki ruang untuk menentukan mitra pembangunan sesuai kepentingan nasionalnya (Mawdsley, 2019). Meskipun demikian, pembahasan mengenai rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok masih banyak berfokus pada perang dagang, keamanan kawasan Indo-Pasifik, dan perkembangan teknologi digital. Kajian yang secara khusus mengevaluasi kekuatan, kelemahan, serta prospek jangka panjang dari model pembangunan yang ditawarkan kedua negara relatif masih terbatas. Padahal, keberhasilan suatu model pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi atau bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh legitimasi, keberlanjutan, serta kemampuan model tersebut dalam menjawab kebutuhan negara-negara berkembang.

Berdasarkan kondisi tersebut, esai ini mengajukan pertanyaan penelitian: bagaimana kekuatan dan kelemahan model pembangunan Amerika Serikat dan Tiongkok memengaruhi masa depan kompetisi pembangunan global? Esai ini berargumen bahwa kompetisi pembangunan antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah berkembang dari sekadar persaingan ekonomi menjadi kontestasi model pembangunan dan kepemimpinan global. Tiongkok menawarkan model pembangunan yang pragmatis, cepat, dan berorientasi pada hasil sehingga semakin menarik bagi banyak negara berkembang. Sebaliknya, Amerika Serikat tetap memiliki keunggulan dalam legitimasi institusional, pembentukan norma internasional, inovasi, serta tata kelola global. Oleh karena itu, masa depan kompetisi pembangunan tidak akan menghasilkan dominasi tunggal salah satu negara, melainkan membentuk tatanan pembangunan yang semakin multipolar, di mana negara-negara

Global South memiliki posisi tawar yang semakin besar dalam menentukan arah kerja sama pembangunan. Untuk menjelaskan argumentasi tersebut, esai ini menggunakan konsep Soft Power yang dikemukakan Joseph S. Nye serta konsep Geoeconomics dari Robert D. Blackwill dan Jennifer M. Harris. Soft Power digunakan untuk menjelaskan bagaimana pembangunan menjadi sumber daya tarik dan legitimasi internasional, sedangkan Geoeconomics menjelaskan bagaimana instrumen ekonomi dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencapai kepentingan strategis negara. Melalui kedua perspektif tersebut, esai ini menganalisis kekuatan dan kelemahan model pembangunan Amerika Serikat dan Tiongkok serta menjelaskan

bagaimana kompetisi tersebut berpotensi membentuk konfigurasi pembangunan internasional pada masa mendatang.

Kompetisi pembangunan antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak hanya mencerminkan persaingan ekonomi, tetapi juga menunjukkan kontestasi mengenai model pembangunan dan kepemimpinan global. Kedua negara menawarkan pendekatan yang berbeda dalam membangun pengaruh terhadap negara-negara berkembang, sehingga masing-masing memiliki keunggulan dan keterbatasan. Oleh karena itu, pembahasan ini diawali dengan pemaparan kerangka teori sebagai landasan analisis, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi terhadap kekuatan, kelemahan, serta masa depan kompetisi pembangunan Amerika Serikat dan Tiongkok.

Soft Power dan Geoeconomics dalam Kompetisi Pembangunan

Perubahan dinamika politik internasional menunjukkan bahwa kekuatan suatu negara tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan militer atau ekonomi, tetapi juga oleh kemampuannya memengaruhi preferensi negara lain melalui daya tarik nilai, institusi, maupun model pembangunan. Dalam konteks tersebut, konsep Soft Power yang diperkenalkan oleh Joseph S. Nye menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk menjelaskan bagaimana pembangunan digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh pengaruh internasional. Menurut Nye (2004), soft power merupakan kemampuan suatu negara untuk memperoleh hasil yang diinginkan melalui daya tarik (attraction), bukan melalui paksaan (coercion) maupun pembayaran (payment). Daya tarik tersebut berasal dari budaya, nilai politik, maupun kebijakan luar negeri yang dianggap

memiliki legitimasi oleh negara lain. Dengan demikian, pembangunan bukan hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan legitimasi internasional suatu negara apabila model pembangunan yang ditawarkan dianggap berhasil dan layak ditiru.

Namun demikian, kompetisi antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada abad ke-21 menunjukkan bahwa daya tarik saja tidak cukup untuk menjelaskan perilaku kedua negara. Persaingan tersebut juga melibatkan penggunaan instrumen ekonomi sebagai bagian dari strategi geopolitik. Oleh karena itu, konsep *geoeconomics* dari Blackwill dan Harris (2016) melengkapi analisis ini. Mereka mendefinisikan *geoeconomics* sebagai penggunaan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan geopolitik. Instrumen tersebut meliputi perdagangan, investasi, bantuan pembangunan, pembiayaan infrastruktur, hingga penguasaan teknologi strategis yang diarahkan untuk memperluas pengaruh suatu negara terhadap negara lain (Blackwill & Harris, 2016). Dalam perkembangannya, *geoeconomics* semakin menjadi ciri utama kompetisi kekuatan besar. Berbagai instrumen ekonomi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kebijakan pembangunan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi negara dalam mempertahankan posisi dan memengaruhi tatanan internasional.

Seiring meningkatnya rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, penggunaan investasi, teknologi, sanksi ekonomi, hingga rantai pasok strategis menjadi bagian dari kompetisi yang semakin kompleks. Berdasarkan kedua konsep tersebut, esai ini memandang bahwa kompetisi pembangunan antara Amerika Serikat dan Tiongkok bukan hanya mengenai siapa yang

memberikan bantuan atau investasi lebih besar, melainkan mengenai siapa yang mampu menawarkan model pembangunan yang lebih menarik, lebih kredibel, dan lebih berkelanjutan sehingga memperoleh legitimasi sebagai pemimpin pembangunan global.

Kekuatan Model Pembangunan Amerika Serikat dan Tiongkok

Amerika Serikat dan Tiongkok menawarkan pendekatan pembangunan yang berbeda sehingga masing-masing memiliki keunggulan tersendiri dalam membangun pengaruh global. Perbedaan tersebut mencerminkan karakter sistem politik, strategi pembangunan, serta orientasi kebijakan luar negeri masing-masing negara. Amerika Serikat selama beberapa dekade mempertahankan kepemimpinannya dalam pembangunan internasional melalui pendekatan yang berbasis pada good governance, demokrasi, supremasi hukum, transparansi, serta penguatan institusi. Pendekatan ini memperoleh legitimasi melalui berbagai lembaga internasional seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), maupun berbagai lembaga pembangunan bilateral Amerika Serikat. Keunggulan utama model ini bukan hanya terletak pada besarnya sumber daya ekonomi yang dimiliki, tetapi juga pada kemampuannya membentuk norma internasional mengenai tata kelola pembangunan yang dianggap baik (Ikenberry, 2018). Selain itu, Amerika Serikat tetap menjadi pusat inovasi global melalui dominasi perusahaan teknologi, universitas riset, dan kapasitas pengembangan ilmu pengetahuan. Kemampuan tersebut menjadikan Amerika Serikat memiliki soft power yang relatif kuat karena banyak negara masih menjadikan sistem

pendidikan, inovasi, dan tata kelola Amerika sebagai referensi pembangunan (Nye, 2004).

Sebaliknya, Tiongkok menawarkan pendekatan pembangunan yang berbeda. Berbeda dengan negara-negara Barat yang sering mengaitkan bantuan pembangunan dengan reformasi politik maupun demokratisasi, Tiongkok lebih menekankan prinsip *non-interference*, pragmatisme, dan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama. Pendekatan tersebut dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan banyak negara berkembang yang memerlukan pembangunan infrastruktur dan investasi tanpa persyaratan politik yang ketat (Mawdsley, 2019). Keunggulan lain model pembangunan Tiongkok terletak pada kapasitas negara dalam mengoordinasikan sumber daya secara cepat. Sistem pembangunan yang dipimpin negara (*state-led development*) memungkinkan implementasi proyek berskala besar dalam waktu relatif singkat. Hal ini meningkatkan daya tarik Tiongkok sebagai mitra pembangunan, terutama bagi negara-negara yang menghadapi keterbatasan pembiayaan infrastruktur. Keberhasilan Tiongkok dalam mengembangkan Belt and Road Initiative (BRI) juga menunjukkan bahwa pembangunan telah menjadi instrumen penting dalam memperluas pengaruh internasionalnya. Meskipun BRI sering dipahami sebagai proyek pembangunan infrastruktur, pada hakikatnya program tersebut juga berfungsi memperkuat konektivitas ekonomi, memperluas pasar, serta meningkatkan posisi strategis Tiongkok dalam tata kelola ekonomi global. Oleh karena itu, kekuatan utama Tiongkok tidak hanya terletak pada besarnya investasi yang diberikan, tetapi juga pada

kemampuannya menawarkan alternatif model pembangunan di luar paradigma liberal Barat.

Dengan demikian, baik Amerika Serikat maupun Tiongkok memiliki sumber kekuatan yang berbeda. Amerika Serikat unggul dalam legitimasi institusional, inovasi, dan pembentukan norma global, sedangkan Tiongkok unggul dalam efektivitas implementasi pembangunan, fleksibilitas kerja sama, dan kemampuan menyediakan pembiayaan dalam skala besar. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kompetisi pembangunan tidak hanya berkaitan dengan besarnya kapasitas ekonomi, tetapi juga mengenai daya tarik model pembangunan yang ditawarkan kepada negara-negara Global South.

Kelemahan Model Pembangunan Amerika Serikat dan Tiongkok

Meskipun Amerika Serikat dan Tiongkok sama-sama berhasil membangun pengaruh melalui kerja sama pembangunan, kedua negara juga menghadapi berbagai keterbatasan yang memengaruhi efektivitas model pembangunan yang mereka tawarkan. Kelemahan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu model pembangunan yang sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan negara berkembang yang semakin beragam. Amerika Serikat masih memiliki legitimasi yang kuat dalam tata kelola pembangunan global, tetapi pendekatan yang diterapkannya sering dianggap terlalu normatif. Bantuan pembangunan yang diberikan Amerika Serikat umumnya disertai persyaratan mengenai demokrasi, hak asasi manusia, transparansi, serta reformasi kelembagaan. Persyaratan tersebut bertujuan memastikan pembangunan berlangsung secara berkelanjutan dan akuntabel. Namun, bagi sebagian negara berkembang,

pendekatan tersebut dipandang mengurangi ruang kedaulatan nasional karena pembangunan menjadi bergantung pada agenda politik negara donor (Mawdsley, 2019). Selain itu, implementasi kerja sama pembangunan Amerika Serikat relatif lebih lambat dibandingkan dengan Tiongkok. Hal ini disebabkan oleh mekanisme birokrasi yang panjang, keterlibatan banyak lembaga, serta proses evaluasi yang ketat. Akibatnya, beberapa negara berkembang lebih memilih bekerja sama dengan Tiongkok karena dapat memperoleh pembiayaan dan pembangunan infrastruktur dalam waktu yang lebih singkat (Dollar, 2021).

Di sisi lain, model pembangunan Tiongkok juga menghadapi tantangan yang tidak kalah besar. Meskipun pendekatan *non-interference* dan pembiayaan yang cepat meningkatkan daya tarik Tiongkok, berbagai proyek kerja sama di bawah Belt and Road Initiative memperoleh kritik mengenai transparansi, keberlanjutan utang (debt sustainability), serta dampak sosial dan lingkungan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa beberapa negara mitra mengalami peningkatan beban utang setelah menerima pembiayaan proyek infrastruktur dari Tiongkok, sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai ketergantungan ekonomi terhadap Beijing (Malik et al., 2021). Selain persoalan pembiayaan, model pembangunan Tiongkok juga masih menghadapi keterbatasan dalam membangun legitimasi internasional. Berbeda dengan Amerika Serikat yang memiliki jaringan institusi internasional yang telah berkembang selama puluhan tahun, pengaruh Tiongkok masih sangat bergantung pada kapasitas ekonomi domestiknya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir,

disertai krisis sektor properti dan meningkatnya tekanan geopolitik, berpotensi mengurangi kemampuan Beijing dalam mempertahankan ekspansi pembangunan di berbagai kawasan (World Bank, 2025).

Kelemahan lain terletak pada persepsi internasional terhadap model pembangunan Tiongkok. Walaupun banyak negara berkembang mengapresiasi fleksibilitas kerja sama yang ditawarkan Beijing, sebagian negara tetap memandang meningkatnya investasi Tiongkok sebagai instrumen untuk memperluas pengaruh politik dan strategis. Persepsi tersebut menyebabkan beberapa negara mulai melakukan diversifikasi mitra pembangunan agar tidak terlalu bergantung pada salah satu kekuatan besar (OECD, 2024). Dengan demikian, baik Amerika Serikat maupun Tiongkok menghadapi tantangan yang berbeda. Amerika Serikat memiliki legitimasi yang tinggi tetapi kurang fleksibel dalam implementasi pembangunan. Sebaliknya, Tiongkok menawarkan pembangunan yang cepat dan pragmatis, tetapi masih menghadapi persoalan transparansi, keberlanjutan pembiayaan, serta kepercayaan internasional. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kompetisi pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan membangun legitimasi dan kepercayaan jangka panjang

Masa Depan Kompetisi Pembangunan Amerika Serikat dan Tiongkok

Perubahan struktur ekonomi dan politik global menunjukkan bahwa masa depan kompetisi pembangunan tidak akan menghasilkan dominasi tunggal seperti yang terjadi pada era pasca-Perang Dingin. Kebangkitan Tiongkok memang

mengakhiri dominasi absolut Amerika Serikat dalam pembangunan internasional, tetapi belum cukup kuat untuk sepenuhnya menggantikan posisi tersebut. Sebaliknya, sistem pembangunan global bergerak menuju pola yang lebih kompetitif dan multipolar, di mana berbagai negara memiliki lebih banyak alternatif dalam menentukan mitra pembangunan. Dalam perspektif Soft Power, keberhasilan suatu model pembangunan bergantung pada kemampuannya membangun daya tarik dan legitimasi. Amerika Serikat masih memiliki keunggulan melalui institusi internasional, universitas, inovasi teknologi, serta kemampuannya membentuk norma tata kelola global. Namun, meningkatnya polarisasi politik domestik, kebijakan luar negeri yang cenderung berubah mengikuti pergantian pemerintahan, serta menurunnya kepercayaan sebagian negara berkembang terhadap kepemimpinan Barat menyebabkan daya tarik tersebut tidak lagi sekuat sebelumnya (Nye, 2024). Sebaliknya, Tiongkok berhasil meningkatkan daya tariknya melalui keberhasilan pembangunan ekonomi domestik dan kemampuannya menyediakan pembiayaan pembangunan dalam skala besar. Model pembangunan Tiongkok dipandang lebih pragmatis karena menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama tanpa mengaitkannya dengan perubahan sistem politik negara mitra. Pendekatan tersebut menjadi alternatif yang menarik bagi banyak negara berkembang yang menghadapi kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam waktu cepat (Mawdsley, 2019).

Namun demikian, meningkatnya pengaruh Tiongkok tidak secara otomatis menjadikannya pemimpin pembangunan global. Dalam perspektif *geo-economics*, penggunaan instrumen

ekonomi sebagai alat memperoleh pengaruh juga memunculkan respons dari negara lain. Amerika Serikat bersama negara-negara G7 mulai mengembangkan berbagai inisiatif pembangunan sebagai alternatif terhadap meningkatnya pengaruh Tiongkok. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompetisi pembangunan akan terus berlangsung melalui berbagai bentuk kerja sama ekonomi, investasi, inovasi, dan pembentukan standar internasional, bukan melalui konfrontasi militer secara langsung (Blackwill & Harris, 2016).

Yang menarik, perubahan tersebut justru meningkatkan posisi tawar negara-negara berkembang. Berbeda dengan era Perang Dingin ketika banyak negara dipaksa memilih salah satu blok kekuatan, saat ini negara-negara Global South cenderung menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis. Mereka memanfaatkan kompetisi antara Amerika Serikat dan Tiongkok untuk memperoleh investasi, transfer teknologi, maupun akses pasar yang lebih menguntungkan tanpa harus sepenuhnya berpihak kepada salah satu negara (Acharya, 2023). Indonesia merupakan salah satu contoh yang menunjukkan dinamika tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memperkuat kerja sama investasi dan pembangunan infrastruktur dengan Tiongkok, tetapi pada saat yang sama tetap menjalin kemitraan strategis dengan Amerika Serikat dalam bidang perdagangan, pendidikan, energi bersih, serta transformasi digital. Strategi tersebut mencerminkan bahwa negara berkembang tidak lagi hanya menjadi objek persaingan kekuatan besar, melainkan aktor yang mampu memanfaatkan rivalitas tersebut untuk mendukung agenda pembangunan nasional.

Berdasarkan perkembangan tersebut, masa depan kompetisi pembangunan kemungkinan besar akan ditandai oleh tiga kecenderungan utama. Pertama, meningkatnya persaingan dalam menawarkan model pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Kedua, semakin pentingnya inovasi teknologi, transisi energi, dan ekonomi digital sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Ketiga, menguatnya posisi negara-negara Global South sebagai aktor yang memiliki keleluasaan lebih besar dalam menentukan arah kerja sama pembangunan sesuai kepentingan nasional masing-masing. Dengan demikian, masa depan kompetisi pembangunan tidak akan ditentukan oleh siapa yang memiliki kapasitas ekonomi terbesar, melainkan oleh kemampuan masing-masing negara membangun kepercayaan, legitimasi, serta kemitraan jangka panjang yang mampu menjawab kebutuhan nyata negara-negara berkembang. Kompetisi tersebut pada akhirnya tidak hanya akan membentuk hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, tetapi juga akan menentukan arah tata kelola pembangunan internasional pada abad ke-21.

Kesimpulan

Kompetisi pembangunan antara Amerika Serikat dan Tiongkok menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun pengaruh dan kepemimpinan global. Melalui perspektif Soft Power dan Geoeconomics, esai ini menunjukkan bahwa kedua negara menawarkan model pembangunan yang berbeda dengan karakteristik, keunggulan, dan keterbatasannya masing-masing. Amerika Serikat masih mempertahankan keunggulan dalam legitimasi institusional, inovasi, serta kemampuannya

membentuk norma dan tata kelola global. Sebaliknya, Tiongkok berhasil menawarkan alternatif model pembangunan yang lebih pragmatis, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan fisik negara-negara berkembang. Namun demikian, kedua model tersebut juga menghadapi tantangan yang tidak dapat diabaikan. Pendekatan Amerika Serikat sering dipersepsikan terlalu normatif karena mengaitkan kerja sama pembangunan dengan persyaratan demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi kelembagaan. Di sisi lain, Tiongkok menghadapi kritik terkait transparansi, keberlanjutan utang, dan meningkatnya kekhawatiran mengenai ketergantungan ekonomi negara mitra. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu model pembangunan yang sepenuhnya ideal bagi seluruh negara berkembang.

Berdasarkan analisis tersebut, argumentasi utama esai ini dapat ditegaskan kembali bahwa masa depan kompetisi pembangunan tidak akan menghasilkan dominasi tunggal oleh Amerika Serikat maupun Tiongkok. Sebaliknya, sistem pembangunan internasional bergerak menuju konfigurasi yang semakin multipolar, di mana negara-negara Global South memiliki ruang tawar yang lebih besar dalam menentukan mitra pembangunan sesuai kepentingan nasionalnya. Pergeseran ini sekaligus menandai perubahan paradigma pembangunan internasional dari hubungan donor dan penerima bantuan menuju hubungan kemitraan yang lebih kompetitif dan fleksibel. Perkembangan tersebut juga memperlihatkan bahwa keberhasilan suatu negara dalam memimpin pembangunan global tidak lagi hanya ditentukan oleh kapasitas ekonomi, tetapi juga oleh kemampuannya membangun kepercayaan, legitimasi, dan kerja

sama yang berkelanjutan di tengah meningkatnya fragmentasi geopolitik. Tren fragmentasi geoeкономи and meningkatnya peran negara berkembang memperkuat kecenderungan tersebut. Dengan demikian, lesson learned dari kasus kompetisi pembangunan antara Amerika Serikat dan Tiongkok adalah bahwa pembangunan telah berevolusi menjadi arena kontestasi kekuatan global yang tidak hanya memengaruhi hubungan antarnegara, tetapi juga membentuk arah tata kelola pembangunan internasional pada abad ke-21. Negara-negara berkembang bukan lagi sekadar objek persaingan, melainkan aktor strategis yang memiliki kapasitas untuk memanfaatkan rivalitas kedua kekuatan tersebut guna mempercepat agenda pembangunan nasionalnya.

Daftar Pustaka

- Acharya, A. (2023). The once and future world order: Why global civilization will survive the decline of the West. Basic Books.
- Blackwill, R. D., & Harris, J. M. (2016). War by other means: Geoeconomics and statecraft. Harvard University Press.
- Dollar, D. (2021). China's rise and the new era of U.S.-China strategic competition. Brookings Institution Press.
- Ikenberry, G. J. (2018). A world safe for democracy: Liberal internationalism and the crises of global order. Yale University Press.
- Malik, A., Parks, B., Russell, B., Lin, J., Walsh, K., Solomon, K., Zhang, S., Elston, T., & Goodman, S. (2021). Banking on the Belt and Road: Insights from a new global dataset of 13,427 Chinese development projects. AidData.

- Mawdsley, E. (2019). South-South cooperation 3.0? Managing the consequences of success in the decade ahead. *Oxford Development Studies*, 47(3), 259–274.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. PublicAffairs.
- Nye, J. S. (2023). *Soft power and great power competition: Shifting sands in the balance of power between the United States and China*. Springer.
- OECD. (2025). *Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2025: Preparing post-2025 transformation amid geo-economic tensions*. OECD Publishing.
- Rolland, N. (2017). *China's Eurasian century? Political and strategic implications of the Belt and Road Initiative*. National Bureau of Asian Research.
- World Bank. (2024). *World Development Report 2024: The middle-income trap*. World Bank.
- World Bank. (2025). *Global Economic Prospects*. World Bank.

KATA PENUTUP

Perjalanan intelektual melalui dua belas bab dalam buku ini memperlihatkan bahwa pembangunan global tidak lagi dapat dipahami sebagai proses teknokratis yang netral dan semata-mata bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di balik pembangunan infrastruktur, investasi, perdagangan, transformasi digital, transisi energi, hingga bantuan kemanusiaan, terdapat kontestasi kepentingan yang semakin intens antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Rivalitas tersebut tidak hanya membentuk arah ekonomi dunia, tetapi juga menentukan arsitektur kekuasaan internasional yang akan memengaruhi pilihan-pilihan pembangunan negara-negara berkembang selama beberapa dekade mendatang.

Melalui berbagai studi kasus yang disajikan dalam buku ini, tampak bahwa rivalitas kedua kekuatan besar bukanlah sekadar kompetisi antara dua model pembangunan yang berbeda. Rivalitas tersebut merupakan perebutan pengaruh terhadap standar, institusi, teknologi, rantai pasok, serta norma-norma yang akan menjadi fondasi tatanan global di masa depan. Amerika Serikat menawarkan pembangunan yang bertumpu pada tata kelola, transparansi, dan kemitraan berbasis aturan, sementara Tiongkok menghadirkan pendekatan yang lebih pragmatis melalui investasi infrastruktur, konektivitas, dan pembiayaan yang relatif lebih fleksibel. Kedua pendekatan tersebut membawa peluang sekaligus konsekuensi yang harus dipahami secara kritis oleh negara-negara penerima.

Buku ini juga menegaskan bahwa negara-negara berkembang bukanlah aktor pasif yang hanya menjadi arena perebutan

pengaruh dua kekuatan besar. Sebaliknya, mereka memiliki ruang untuk membangun strategi, memperkuat kapasitas nasional, serta memanfaatkan kompetisi tersebut demi kepentingan pembangunan domestik. Namun, ruang tersebut tidak akan menghasilkan manfaat yang optimal tanpa tata kelola yang kuat, birokrasi yang profesional, kemampuan negosiasi yang memadai, dan visi pembangunan jangka panjang yang berpijak pada kepentingan nasional. Tanpa fondasi tersebut, rivalitas global justru berpotensi melahirkan bentuk-bentuk ketergantungan baru, baik dalam bidang teknologi, pembiayaan, energi, maupun infrastruktur strategis.

Pada saat yang sama, dinamika yang dibahas dalam buku ini menunjukkan bahwa masa depan pembangunan global akan semakin ditentukan oleh isu-isu yang melampaui batas-batas ekonomi konvensional. Kompetisi atas kecerdasan buatan, keamanan siber, mineral kritis, energi hijau, rantai pasok strategis, serta tata kelola data akan menjadi arena baru yang sama pentingnya dengan perdagangan dan investasi. Dengan demikian, pembangunan tidak lagi sekadar persoalan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga persoalan kedaulatan teknologi, ketahanan nasional, dan kemampuan suatu negara mempertahankan otonomi kebijakannya di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik.

Harapan kami, buku ini tidak berhenti sebagai kumpulan kajian akademik mengenai rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, tetapi menjadi pijakan bagi lahirnya diskusi-diskusi baru tentang bagaimana negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dapat merumuskan strategi pembangunan yang lebih mandiri, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Dunia

sedang memasuki era ketika pembangunan, diplomasi, keamanan, dan teknologi tidak lagi dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap hubungan antara geoekonomi dan geopolitik menjadi semakin penting, baik bagi akademisi, pembuat kebijakan, maupun masyarakat luas.

Pada akhirnya, rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok bukanlah tujuan akhir dari pembahasan buku ini. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara-negara berkembang mampu membaca perubahan tersebut secara cermat, menghindari jebakan ketergantungan, serta mengubah kompetisi global menjadi peluang bagi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaulat. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu kontribusi kecil dalam memperkaya khazanah studi hubungan internasional dan pembangunan global, sekaligus mendorong lahirnya gagasan-gagasan baru yang lebih kritis dalam menghadapi perubahan tatanan dunia yang terus bergerak menuju era multipolar.

Buku ini mengupas secara komprehensif dinamika rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam membentuk arah pembangunan global pada abad ke-21. Persaingan kedua negara tidak lagi terbatas pada aspek ekonomi dan militer, tetapi juga merambah pembiayaan pembangunan, investasi infrastruktur, transformasi digital, perdagangan, energi terbarukan, bantuan kemanusiaan, hingga pembentukan norma dan tata kelola internasional. Melalui pendekatan yang kritis dan berbasis kajian ilmiah, buku ini mengajak pembaca memahami bagaimana kedua kekuatan dunia tersebut menggunakan strategi pembangunan sebagai instrumen untuk memperluas pengaruh geopolitik di berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara dan Afrika.

Lebih jauh, buku ini menyoroti posisi Indonesia dan negara-negara berkembang yang berada di tengah kontestasi tersebut. Berbagai isu strategis, seperti pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, konektivitas digital, ketahanan ekonomi, serta ruang kebijakan nasional, dibahas untuk menunjukkan tantangan sekaligus peluang dalam menjaga kepentingan nasional di tengah perubahan lanskap global. Dengan bahasa yang sistematis dan analisis yang mendalam, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi hubungan internasional, serta para pembuat kebijakan yang ingin memahami transformasi pembangunan global dan arah kepemimpinan dunia di masa depan.